

PARTISIPASI POLITIK
Pola Perilaku Pemilih Pemilu
Masa Orde Baru dan Reformasi

Yalvema Miaz

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5. 000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

PARTISIPASI POLITIK
Pola Perilaku Pemilih Pemilu
Masa Orde Baru dan Reformasi

Yalvema Miaz



UNP PRESS
2012

Miaz, Yalvema /
PARTISIPASI POLITIK
Pola Perilaku Pemilih Pemilu
Masa Orde Baru dan Reformasi
/ Miaz, Yalvema
editor, Tim editor UNP Press
Penerbit UNP Press Padang, 2012
1 (satu) jilid; 14 x 21 cm (A5)
205 hal.

PARTISIPASI POLITIK
Pola Perilaku Pemilih Pemilu
Masa Orde Baru dan Reformasi
ISBN: 978-602-8819-65-7

1. Partisipasi Politik
2. Pola Perilaku Pemilih Pemilu

1. UNP Press Padang

PARTISIPASI POLITIK
Pola Perilaku Pemilih Pemilu
Masa Orde Baru dan Reformasi

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang pada penulis
Hak penerbitan pada UNP Press

Penyusun: Drs. Yalvema Miaz, MA., Ph.D
Editor Bahasa: Afnita, M.Pd.
Layout & Desain Sampul Nasbahry Couto & Khairul

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pemilu dan Dinamikanya	4
C. Rangkuman	17
BAB II PARTISIPASI DAN PERILAKU POLITIK	20
A. Partisipasi Politik	20
B. Pola Memilih	33
C. Perilaku Politik.....	40
D. Kajian Relevan.....	50
E. Rangkuman	59
BAB III PARTAI POLITIK DAN PEMILU DARI MASA KE MASA	61
A. Partai dan Ormas Sebelum Merdeka	63
B. Partai Politik pada Awal Kemerdekaan	70
C. DEMOKRASI DAN SISTEM POLITIK	80
D. Pemilu	89
E. Pemilu di Kota Bukittinggi	121
F. Rangkuman	126
BAB IV STUDI KASUS: POLA PEMILIH PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI DI KOTA BUKITTINGGI	128
A. Jenis Kelamin dan Umur	128
B. Status Perkawinan dan Agama	129
C. Jenis pekerjaan	130

D. Pendidikan.....	133
E. Pendapatan.....	134
F. Daerah Asal Responden.....	135
G. Status Sosial Responden.....	137
H. Partisipasi Politik pada Pemilu.....	138
I. Pola Pemilihan Parpol Pemilu 1997 dan 1999.....	148
J. Faktor yang Mempengaruhi Pilihan.....	155
K. Rangkuman.....	163
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK DAN POLA PILIHAN PARTAI.....	165
A. STATUS DAN KEADAAN SOSIAL EKONOMI.....	165
B. KETERKAITAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN POLA MEMILIH 1997 DAN 1999.....	183
C. Rangkuman.....	187
BAB VI PENUTUP.....	190
A. Rangkuman.....	191
B. Implikasi Dasar.....	193
RUJUKAN.....	198
BIODATA PENULIS.....	205

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Piramid Peringkat Nilai Partisipasi Politik	25
2. Partisipasi politik, Huntington dan Nelson (1994:27).....	32
3. Kedudukan Responden Dalam Partai Politik di Kota Bukittinggi.	145

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengaruh Sosial Ekonomi dan Tingkat Partisipasi Politik....	51
2. Komposisi Pembagian Kursi Parlemen Pemilu 1995 dan 1998 di Taiwan	54
3. Komposisi Perolehan Kursi Parlemen Pemilu 1955	90
4. Perolehan Kursi Parlemen Pemilu 1971-1997	95
5. Perolehan Suara dan Kursi Parlemen Pemilu 1971(Juta orang)	96
6. Perolehan Kursi Pemilu 1977.....	99
7. Perolehan Kursi Pemilu 1982.....	99
8. Perolehan Kursi Pemilu 1987.....	101
9. Perolehan Kursi Pemilu 1992.....	102
10. Perolehan Kursi Pemilu 1997.....	103
11. Perolehan Kursi Partai Pemilu 1999	120
12. Perolehan kursi DPRD Bukittinggi dalam Pemilu Orba dan Reformasi	121
13. Parsentase Kelompok Jenis kelamin dan Usia Responden (N= 504).....	129
14. Jenis Pekerjaan Responden	132
15. Daerah Asal Responden Mendiami Kota	136
16. Daerah Asal Responden dan Tempo/Waktu Menetap di Kota Bukittinggi.....	137
17. Pola Pendaftaran Pemilih Pemilu 1997 dan 1999.	139
18. Alasan Menghadiri Kampanye Politik	142
19. Kegiatan Kampanye Partai Yang Disukai.....	143
20. Penilaian Responden Terhadap Pemilu 1997.....	145
21. Alasan Memilih Partai Lama (<i>Golkar, PPP, PDI</i>) Pada Pemilu 1999	147
22. Alasan Merubah Pilihan Partai Pemilu 1999	148
23. Pola Memilih Menurut Umur Responden (%) Pemilu 1997 dan 1999. N = 504.....	149

24. Persentase Pilihan Parpol Berdasarkan Etnis Pemilu 1997 dan 1999.	151
25. Pola Memilih Partai Pemilu 1999 Menurut Asal Daerah Responden	152
26. Penyebaran Memilih Partai Pemilu 1999 Menurut Pekerjaan	153
27. Pola Memilih Berdasarkan Sosial ekonomi.....	154
28. Pola Pembagian Kursi Dewan (DPRD) 1997 dan 1999 di Kota Bukittinggi.	155
29. Faktor Pendorong Responden Memilih Partai Tertentu	156
30. Pemimpin Tokoh Menjadi Ikutan Memilih.....	160
31. Kaitan Pendidikan dan Partai Pihak Keluarga dengan Perilaku Memilih Pemilu 1997.....	161
32. Partai yang Dipilih Berdasarkan Informasi politik Dari Media Masa	162
33. Keterkaitan antara Jenis Kelamin, Umur dan Status Perkawinan dengan Pola Partisipasi Politik	166
34. Pengaruh Jenis Kelamin dengan Sikap dan Tindakan Mendaftar untuk Memilih.....	167
35. Persepsi Tujuan Memilih Dengan Memastikan Mendaftar.....	168
36. Persepsi Politik dengan Kegiatan Menghadiri Kampanye .	170
37. Pengaruh Status Perkawinan dan Pendaftaran Memilih.....	174
38. Keterkaitan Sosial ekonomi dengan Pola Partisipasi Politik.....	177
39. Keterkaitan Asal Penduduk Kota dengan Kegiatan Partai .	183
40. Keterkaitan Status Sosial Ekonomi dengan Pola Memilih Partai Pemilu 1997 dan 1999.....	184
41. Keterkaitan Pendidikan, Partai Keluarga dengan Perilaku memilih Pemilu 1997.....	186

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Status Perkawinan	130
2. Tingkat Pendidikan Responden di kota Bukittinggi	133
3. Pendapatan Responden	135
4. Status Responden di dalam Masyarakat	138
5. Mayoritas Pemilih yang Menganggap Penting Pemilu	141
6. Kehadiran dalam Kampanye Partai Politik	141
7. Penyelenggaraan Kampanye Partai Yang Didukung.....	143
8. Pengaruh Keluarga dalam Memilih Partai	157
9. Media Masa Penyebar Informasi politik	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ra kemajuan teknologi informasi dan penyiaran media masa yang meluas telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan kebutuhan hiruk pikuk informasi. Peningkatan status sosial ekonomi yang diiringi berkembangnya pengetahuan politik masyarakat dan menjadikan informasi, isu-isu aktual sebagai santapan sehari-hari. Era keterbukaan informasi dan komunikasi dari berbagai sumber media masa termasuk internet secara tidak langsung meningkatkan pula kesadaran masyarakat peduli kepada masalah politik. Pada gilirannya di masyarakat terjadi berbagai perubahan sosial dan bahkan pola pikir masyarakat ke arah maju.

Proses perubahan sosial tidak hanya di pengaruhi oleh program-program pembangunan regional, tetapi juga oleh berbagai pengaruh luar. Salah satu di antaranya perkembangan politik. Kemajuan teknologi komunikasi informasi yang pesat pada era globalisasi telah mempersingkat “jarak” di antara penduduk yang mendiami seluruh pelosok dunia. Kemudahan berkomunikasi dan penyampaian informasi berlangsung sangat cepat dengan sistem teknologi yang semakin canggih seperti radio, televisi, telepon, internet, dan media cetak. Warga dunia dalam tempo singkat bisa membahas isu-isu perkembangan sosial ekonomi, budaya, dan bahkan isu politik terBaru baik pada peristiwa nasional maupun internasional.

Ketika arus teknologi informasi yang semuanya berlangsung dengan serba cepat akan menjadi faktor utama dalam mengubah pola berpikir orang untuk mengetahui dan memahami hak-hak

sebagai warga negara, sistem kenegaraan, dan kemasyarakatan. Asiah Sarji (1991:30) mengemukakan sebagian besar perkembangan kemajuan dan pola pikir kritis masyarakat adalah pengaruh media masa terutama televisi yang telah banyak mengubah kepedulian terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi negara.

Sejalan dengan itu menurut Cahyono (1998:151), perubahan status sosial ekonomi, pendidikan dan kemudahan sistem informasi media masa yang gencar dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat. Secara positif informasi yang cukup mengenai perkembangan politik akan meningkatkan kualitas pengetahuan politik masyarakat dalam praktik demokrasi. Demokrasi itu sendiri mengandung pengertian sistem politik dan kuasa pemerintahan berada di tangan masyarakat (Giddens 1993:330). Demokrasi adalah suatu sistem politik di mana memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk dan mengawal pemerintahan negara dan lembaga perwakilan (Sukdan 1999:45). Kemajuan pendidikan dan diiringi oleh berfungsinya sistem informasi, sangat berpeluang membuka minat masyarakat mengenal konsep-konsep demokrasi antara lain keinginan untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi, seperti partisipasi di dalam kegiatan pemilu. Dalam pendidikan politik itu masyarakat akan menjadi peka terhadap isu-isu terBaru kenegaraan.

Menurut Rauf (1998:12) bahwa kemajuan di bidang politik yang terjadi di negara-negara modern oleh masyarakat akan menjadi inspirasi untuk menilai perkembangan politik negara. Setiap orang dengan cepat dapat menilai perkembangan demokrasi di negara masing-masing dan membandingkannya dengan negara lain. Hal ini sangat positif dalam upaya menumbuhkembangkan pemikiran kritis masyarakat agar negara mereka dapat pula membangun suatu sistem demokrasi yang maju. Ketika warga negara telah memiliki pengetahuan politik akan diiringi oleh kesadaran untuk ikut terlibat berpartisipasi politik seperti ikut memilih dalam pemilu dan menegakkan sistem

demokrasi yang terus berkembang ke arah demokrasi yang ideal. Artinya di tengah masyarakat akan melahirkan rasa tanggung jawab, motivasi, minat, dan persepsi yang baik di dalam suatu proses pemilu.

Gejala adanya kepekaan politik yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan masyarakat di berbagai tempat di dunia menimbulkan bertumbuhnya sistem demokrasi. Menurut Huntington (1991:13) fenomena gelombang ke-3 demokrasi global telah terjadi di negara-negara modern dan perubahan praktik demokrasi telah dimulai di berbagai negara otoriter yang berkeinginan menggantinya menjadi negara demokrati. Dikatakan gelombang demokrasi dimulai di Portugis tahun 1974 dan meluas kepada 30 negara otoriter lainnya di Asia, Afrika dan termasuk di Korea Selatan dan negara-negara Amerika Latin yang menghancurkan sistem pemerintahan otoriter sejak tahun 1980-an dan di Eropah Timur sejak tahun 1990-an sejalan dengan era globalisasi.

Menurut Liddle (2000:5) kebangkitan demokrasi di negara-negara yang sedang membangun yang terjadi setelah tahun 1990-an seperti di Filipina, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, dan Pakistan. Pemerintahan otoriter di negara tersebut telah digantikan dengan sistem demokrasi dan pemerintahan berdasarkan pilihan masyarakat melalui pemilu. Diawali dari krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan tidak lagi mendukung para pemimpinnya seperti terjadi di Argentina dan Brasil. Di samping itu, ada indikasi tentang keinginan masyarakat untuk melibatkan diri dalam Reformasi politik. Di Filipina dan Pakistan bahkan ribuan pengunjung rasa ingin menumbangkan rezim berkuasa ketika Presiden Filipina Ferdinand Marcos menjalankan kekuasaan bertahun-tahun secara otoriter. Masyarakat di negara tersebut akhirnya berhasil membangun pemerintahan yang demokratis.

Ketika rezim lama telah tumbang dan diganti oleh pemerintahan demokrasi, maka kekuatan masyarakat dalam kekuasaan semakin besar dalam pemerintahan. Peranan dan

kekuatan masyarakat yang datang dari lapisan bawah (*people power*) untuk menumbangkan pemerintahan otoriter terbukti berhasil di banyak tempat di dunia (Noer 2003:26).

B. Pemilu dan Dinamikanya

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia yang merdeka sejak tahun 1945, namun di dalam praktik demokrasi seperti melaksanakan pemilu Baru berlangsung beberapa kali, hal ini karena Indonesia menghadapi banyak masalah internal. Pemilu demokratis pertama berlangsung pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan kepala pemerintahan akhirnya dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Lima besar pemenang dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada masa pemilu waktu itu demokrasi di Indonesia berkembang sangat positif. Masyarakat dengan bebas memilih partai yang bertanding secara jujur dan adil. Namun, suasana pemerintahan ketika itu tidak cukup kuat karena pemimpin politik masing-masing berusaha merebut jabatan Perdana Menteri. Kabinet yang dibentuk bahkan sering berganti-ganti pemimpin.

Selama 16 tahun setelah pemilu (1955) tidak ada lagi pemilu yang diadakan sampai rezim Soekarno berganti ke rezim Soeharto atau rezim *Orde Baru* (1966). Pemerintahan Soeharto menyebut era Soekarno sebagai rezim Orde lama (Orla). Pemilu dalam masa kekuasaan Soeharto Baru dilaksanakan tahun 1971 diikuti oleh 10

partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu pada tahun 1975 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, ketika itu dilakukan fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya. Dalam masa rezim Soeharto berkuasa pemilu tercatat sebanyak enam kali antara tahun 1971 sampai 1997. Pemilu ini disebut juga sebagai "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-pemilu ini kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu selanjutnya diselenggarakan pada tahun 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pemilu berikutnya, sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu pemilu 1999 dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak dengan perolehan suara nasional sekitar 35 persen, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu (Megawati Soekarnoputri), melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (pada saat itu, Megawati hanya menjadi wakil presiden). Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemilu 1999 hanya bertujuan memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR yang sudah terpilih dalam pemilu.

Pemilu yang diadakan tahun 1999 yaitu pemilihan yang dipercepat oleh rezim Baru atau Orde Reformasi. Presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden ketiga masa

peralihan pendek setelah Habibie dan Gus Dur mencanangkan pemilu terbagi dua bagian yaitu pemilu parlemen dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan parlemen diadakan pada 5 April 2004 yang dimenangkan oleh partai Golkar dan setelah itu diadakan pemilu presiden. Maka, Dr. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla (JK) dicatat sebagai presiden dan wakil presiden pertama dalam pemilu tersebut yang menjabat sampai tahun 2009. Pelantikan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Masyarakat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak masa Reformasi tersebut, Indonesia boleh dikatakan telah menggunakan sistem demokrasi “Baru” seperti di negara-negara demokrasi lain di dunia.

Walaupun pemilu sudah berlangsung secara teratur setiap lima tahun, tetapi praktik demokrasi belum lagi berjalan menurut sewajarnya (Gaffar 1999:33). Pemilu belum memberikan kebebasan sebagaimana yang dituntut oleh sebuah sistem demokrasi, justru dipenuhi banyak kecurangan. Pemilu tidak lebih sebagai upaya rezim untuk memberikan informasi kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara demokratis dan pemerintahan berkuasa (rezim Orde Baru) dicitrakan terbentuk berdasarkan pilihan rakyat secara demokratis. Padahal praktik demokrasi sama sekali tidak berjalan dan lembaga parlemen tidak lebih hanyalah sebagai stempel lambang demokrasi.

Rezim Soeharto yang berkuasa terdiri dari militer, elit-elit yang kebanyakan dari pejabat instansi negara termasuk pensiunan (purnawirawan). Menurut Lidle (2000:13) bahwa partai rezim tersebut menguasai mayoritas parlemen di lembaga tertinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Masyarakat (MPR) dan Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR). Oleh karena itu, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah seluruhnya berdasarkan pada kepentingan rezim Soeharto sehingga partai oposisi tidak berdaya di parlemen/legislatif.

Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto sangat dominan. Melalui kekuasaan itu pula Soeharto menjadi sangat kuat

berkuasa selama 32 tahun. Kekuatan otoriter ini pula telah memberi peluang besar terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik korupsi terjadi di berbagai instansi pemerintah. Keuangan negara digerogeti tanpa bisa disentuh hukum. Pemerintahan dijalankan dengan praktik kolusi dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan *konco-konco* pemegang kekuasaan.

Dengan pola pemerintahan sentralistik, menjadikan peranan pemerintah pusat sangat dominan, sebaliknya pemerintah daerah tidak punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat. Pembagian yang tidak adil inilah mencuat deras di awal Reformasi menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya (Papua). Setelah Reformasi tuntutan itu semakin memudar karena sistem birokrasi pemerintahan diserahkan ke daerah (desentralisasi).

Kekuatan bangsa seperti gerakan mahasiswa, intelektual, media masa dan pers hampir tidak bisa leluasa bergerak menyuarakan aspirasi masyarakat. Kebebasan mimbar di kampus senantiasa diawasi rezim Soeharto. Kebebasan pers belum mampu diwujudkan, seluruh unsur pers dikawal pemerintah dan jika ada media masa yang dianggap merugikan atau menyiarkan pemberitaan yang kritis kepada pemerintah, maka izin penerbitan media bersangkutan akan dicabut. Banyak media masa yang mengalaminya seperti Majalah berita Tempo, Ekspres, koran Indonesia Raya, Sinar Harapan dan sebagainya. Perbuatan semena-mena ini justru membangkitkan semangat perlawanan kepada pemerintah.

Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilu 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah untuk memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Kemenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik

di Indonesia dan asing sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil (jurdil) penuh intimidasi terhadap para pemilih. Dalam pemilihan presiden melalui parlemen, Soeharto selalu terpilih dan tanpa batas masa (periodesasi). Pemilihan Soeharto kembali dilakukan sebagai presiden dalam sidang umum MPR tahun 1998, waktu itu mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi presiden untuk periode 1998-2003.

Golkar yang pada mulanya disebut sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi masyarakat dan angkatan bersenjata, muncul satu tahun sebelum peristiwa G30S/PKI pada tanggal 20 Oktober 1964. Organisasi ini lahir dari pusat dan dijabarkan sampai kedaerah-daerah. Di samping itu, untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam Golongan Karya. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun, tidak ada satupun kritik dari infra struktur politik yang berani mengusiknya. Di Golkar Soeharto diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, yaitu kekuasaan tertinggi di tubuh partai itu.

Demokrasi semu dan kedaulatan masyarakat hanya ada di tangan kelompok tertentu dan penguasa. Kedaulatan di tangan masyarakat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR yang sebenarnya sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme). Situasi itu terpendam di tengah masyarakat bagai duri dalam daging yang selalu mengentak.

Seusai pemilu 1997, kekuatan perlawanan masyarakat makin tampak dipermukaan, dengan isu utama pemerintahan Orde Baru yang korup, penuh kolusi, dan nepotisme. Masyarakat kampus terdiri dari cendekiawan dan mahasiswa mulai menyusun kekuatan besar untuk menumbangkan Orde Baru. Di Jakarta dan kota-kota lain demonstrasi dan kemarahan masyarakat kepada rezim Soeharto sudah terang-terangan. Puncaknya ketika Soeharto

dilantik parlemen/legislatif setelah pemilu 1997 untuk menjabat Presiden untuk periode ke tujuh kali.

Rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu cepat gerakan Reformasi. Kaum reformis yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan masyarakat menuntut pergantian presiden, *reshuffle* kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan pemilu secepatnya. Gerakan menuntut Reformasi total disegala bidang, termasuk anggota DPR/MPR yang dianggap penuh dengan KKN dan menuntut pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Gerakan Reformasi menuntut pembaharuan lima paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu : (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu; (2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, Tugas, dan wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya; (4) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang organisasi masa.

Aspirasi masyarakat yang disekat parlemen telah mencetuskan unjuk rasa besar-besaran oleh ribuan orang terdiri dari mahasiswa, elemen-elemen organisasi masyarakat pada 13-15 Mei 1998 dan pada peristiwa tersebut ratusan orang menjadi korban Liddle (2001:94-116). Soeharto dipaksa meletakkan jabatan presiden pada 21 Mei 1998, maka rezim *Reformasi* lahir di Indonesia, kepemimpinan negara diganti oleh Wakil Presiden yaitu Prof. Dr. Burchanudin Jusuf Habibie.

Habibie pengganti Soeharto berusaha untuk menghilangkan citra otoriter pemerintahan sebelumnya. Beliau minta agar dilakukan perubahan ke arah pemerintahan yang demokratis dan mengganti undang-undang partai politik serta dapat menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang singkat (1999) yaitu suatu pemilu yang bebas, jujur dan adil. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi.

Selain itu, dalam masa pemerintahan Habibie kebijakan untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga sampai saat ini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Pada pemilu awal Reformasi yang diselenggarakan pada 1999 partai PDI-Pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Sejak itulah pintu demokrasi Indonesia sudah terbuka (Liddle 2002:5).

Secara keseluruhan sejak merdeka sampai pada awal Reformasi pemilu parlemen telah diadakan sebanyak tujuh kali, pertama pada tahun 1955, enam kali dimasa rezim *Orde Baru* (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997). Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama Reformasi. Selanjutnya secara beruntun dilakukan setiap 5 tahun.

Setelah pemilu era Reformasi sukses dilaksanakan pada bulan Juli 2004, maka untuk yang pertama telah diadakan pula pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Maka sejak tahun 2004 Indonesia dicatat dunia sepenuhnya telah mengamalkan demokrasi seperti yang dicita-citakan seluruh bangsa. Dari tiga rezim tersebut, maka penyelenggaraan pemilu yang difokuskan disini adalah khusus pemilu tahun 1997 dan 1999 yaitu antara dua masa rezim yang berbeda, rezim Soeharto dan era Reformasi politik di Indonesia. Hal ini penting karena selama rezim Soeharto sebanyak enam kali pemilu yang diadakan secara keseluruhan dimenangkan partai pemerintah (partai *Golkar*). Ini menunjukkan bahwa pola pemilihan partai mayoritas bertumpu kepada partai tertentu saja yaitu partai pemerintah.

Pemilu pada era Reformasi memperlihatkan perubahan pemilih yang cukup signifikan. Dukungan para pemilih kepada partai pemerintah yang telah berkuasa selama 32 tahun menurun. Partai *Golkar* hanya memperoleh 22 persen dan dibandingkan dengan partai oposisi yaitu *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)* yang meraih sebanyak 34 persen. Jumlah partai politik yang bertanding pada tahun 1997 sebanyak 3 partai dan tahun 1999 sebanyak 48 partai, ini karena perubahan Undang-undang pemilu yang disahkan (1998) dan memberikan peluang untuk mendirikan partai Baru sebelum pemilu tersebut dilangsungkan (1999).

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan ditentukan oleh jumlah suara dalam satu pemilu. Masyarakat diberi hak memilih partai atau pemimpin negara mereka sendiri (Abas 1987:3). Artinya, pemerintahan demokrasi adalah pemerintah yang takluk kepada persetujuan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas dan kebijakannya untuk melaksanakan kehendak masyarakat. Apabila suasana demokrasi telah berkembang seseorang akan lebih terbuka untuk berpolitik dan akan banyak melibatkan diri dalam kegiatan politik, termasuk memilih dalam pemilu.

Menurut Milbrath (1965:68) bahwa seseorang akan merasa peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik. Keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik itu seperti mengadakan komunikasi, memasuki organisasi politik dan mengikuti perkembangan politik melalui media masa.

Bagi seseorang yang sudah memiliki pemahaman politik, mereka akan memilih secara bebas dan jujur menurut hati nuraninya. Oleh karena itu, substansi pemilu adalah sebuah proses berpolitik yang terpenting, karena akan berpengaruh bagi penentuan kekuasaan dan kepemimpinan politik. Sistem pemerintahan demokrasi telah menekankan supaya wakil-wakil masyarakat mestilah dipilih secara terbuka berdasarkan kelayakan dan persyaratan pencalonan. Apabila sesuatu pemilu diadakan

untuk memilih anggota parlemen atau DPR daerah, persaingan ketat akan terjadi di kalangan partai politik. Partai-partai politik yang menang dan mendapat perolehan suara tertinggi secara otomatis akan membentuk pemerintahan. Ini berarti partai yang menang akan terus memimpin pemerintah atau menggantikan partai yang pernah berkuasa sebelumnya.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokrasi modern. Pemilu menjadi salah satu parameter utama untuk diakui masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara. Bagi Chehabi dan Linz (1998) menyatakan bahwa ketika perang dingin berlangsung, hampir semua negara ingin berusaha mengidentifikasi diri sebagai negara demokratis dengan cara melaksanakan pemilu secara berkala. Walau pada saat yang lain, pemilu seringkali dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rezim yang otoriter. Karena dalam kenyataannya, masyarakat internasional kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satu pun negara yang dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas dari bagaimana kualitas pelaksanaannya.

Pemilu hakikatnya merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan, dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas-normatif, bahkan, melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri. Karena itu pula, dalam konteks pemilu, perilaku pemilih menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji. Kajian atas perilaku pemilih bukan saja dimanfaatkan untuk mendulang suara, namun terutama

untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan kepentingan masyarakat dalam konteks politik demokratik.

Selanjutnya, pemilu adalah ruang memilih wakil masyarakat atau parlemen yang kelak akan berjuang untuk memenuhi seluruh harapan dan keinginan masyarakat (Gaffar 1999:xi). Maka negara yang bercorak demokrasi, kekuasaan ditentukan oleh jumlah suara sesuatu partai yang memenangi suara terbanyak pemilu. Masyarakat diberi hak memilih partai atau pemimpin negara mereka sendiri, pemilu sebagai praktik proses demokrasi menjadi arena satu-satunya ruang politik yang terbuka bagi masyarakat untuk menyatakan pendirian dan sekaligus memberikan suara terhadap partai yang bakal memerintah. Ini bermakna bahwa, negara bercorak demokrasi adalah negara yang takluk kepada persetujuan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas dan kebijaksanaan untuk melaksanakan kehendak masyarakat.

Menurut Lidle (2000:13) bahwa partai rezim berkuasa telah menguasai mayoritas parlemen yaitu di lembaga tertinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Masyarakat (MPR) dan Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR). Oleh karena itu, kebijakan yang dijalankan pemerintah secara keseluruhan menurut kepentingan dan kemauan Soeharto dan parlemen tidak berdaya, apa lagi partai oposisi.

Para pemerhati politik di Indonesia melihat bahwa fungsi partai politik di Indonesia tidak berkembang menurut sewajarnya. Walaupun partai Golkar senantiasa menang mayoritas pada setiap pemilu, tapi partai tersebut tidak dapat memainkan peranannya dalam pemerintahan karena kebanyakan jabatan-jabatan dalam pemerintahan tidak diberikan kepada partai Golkar tetapi kepada orang-orang yang terdekat dengan Soeharto seperti teman-teman atau keluarganya. Ini bertujuan agar kekuasaan negara tetap terpusat seluruhnya di tangan Soeharto. Keadaan inilah yang menjadikan Soeharto dikatakan sebagai pemimpin otoriter. Masyarakat beranggapan Soeharto sebagai pemimpin yang dipenuhi oleh KKN (Korupsi, Kroni, Nepotisme).

Pada masa rezim lama berkuasa partisipasi politik pada pemilu sangat diragukan validitasnya. Rezim Soeharto melakukan banyak melakukan kecurangan di mana pada akhirnya selalu dimenangkan Golkar. Berbagai cara untuk melemahkan partai lain kasusnya terjadi di mana-mana. Masyarakat pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara tidak seluruhnya atas kesadaran sendiri. Dalam hal ini, sulit untuk melihat bentuk partisipasi politik yang murni pada setiap pemilu berlangsung.

Fenomena partisipasi politik di Indonesia dalam Pemilu era Reformasi diduga berubah sejalan dengan pergantian rezim *Orde Baru* kepada *Orde Reformasi*. Sebagaimana diketahui, hal ini akibat perubahan sistem politik di Indonesia. Masalah partisipasi politik di Indonesia yang telah berubah adalah menarik untuk menjadi bahan perbincangan dalam diskusi.

Era kebangkitan demokrasi mencuat terutama sejak tahun 1990-an. Setelah berkuasa lebih dari 32 tahun Soeharto dinilai sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan negara. Kekuasaan yang dipenuhi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ditambah krisis ekonomi yang memburuk dan utang luar negeri yang sangat besar, terhitung bulan Pebruari 1998 tercatat utang swasta nasional Rp. 73.962 miliar dolar AS dan utang pemerintah Rp. 63.462 miliar dolar AS, jadi utang seluruhnya mencapai 137.424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), Radius Prawiro seusai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.

Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal. Negara eksportir tidak percaya kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya karena itu menerima *letter of credit* (L/C) dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan korupsi.

Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan

seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun *gross national product* (GNP) pada masa Orba pernah mencapai di atas US\$ 1.000,00 tetapi GNP tersebut tidak menggambarkan pendapatan masyarakat sebenarnya, karena uang yang beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat. Masyarakat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar.

Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Saat itu yang berkembang hanyalah ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi. Hal ini bertambah gawat karena suasana ekonomi dan krisis mata uang di Asia Timur 1997-98 telah turut menyumbangkan kegawatan politik yang hebat di Indonesia. Krisis tersebut mencetuskan pertukaran rezim pemerintahan di Indonesia dan Thailand (Mohd.Yusof Kasim dan Ahmad 2002:9). Nilai tukar mata uang rupiah Indonesia terhadap satu dolar Amerika bulan Juni 1997 adalah Rp 2.350, telah meningkat menjadi Rp 16.500 pada bulan Januari 1998 dan turun menjadi Rp 9.000 pada April 1999 (Suryadinata 2002:43).

Fenomena perkembangan teknologi informasi membuka peluang masyarakat menerima informasi dengan cepat dan berkomunikasi dengan bebas sesamanya, termasuk membicarakan masalah politik. Sejalan dengan perubahan yang terjadi di dunia, keadaan seperti itu juga melanda Indonesia terutama setelah perubahan sistem demokrasi dan pergantian antara Orde Baru dan Reformasi. Sebagai negara demokrasi Indonesia menjalankan sistem politik Baru yang dilaksanakan terutama sejak pemilu tahun 1999.

Menurut Rauf (1998) perkembangan ke arah menciptakan demokrasi di Indonesia banyak juga disumbangkan oleh informasi

yang disampaikan media masa dan perkembangan pendidikan meluas dan urbanisasi yang pesat. Sejak tahun 1990-an di berbagai tempat di Indonesia terjadi peristiwa unjuk rasa yang terus meluas mulai dari kalangan para buruh, mahasiswa dan intelektual serta masyarakat banyak terhadap pemerintah. Masyarakat sudah berani memprotes kebijakan pemerintahan yang menyimpang.

Sebagai salah satu negara yang membangun, Indonesia yang berpenduduk melebihi 200 juta orang memang telah melaksanakan pembangunan negara yang pesat sejak tahun 1966, perkembangan taraf sosial ekonomi umumnya telah meningkat, tingkat perkembangan ekonomi negara naik setiap tahun dan dari tahun 1987 sampai tahun 1992 dicatat laju pertumbuhan ekonomi 6.7 persen (Hal Hill 1996:15-17). Pendapatan per kapita meningkat pesat dari \$ 60 pada tahun 1966 menjadi \$ 800 tahun 1976 dan meningkat lagi \$ 1200 awal tahun 1990-an, namun turun kembali 800 dollar pada tahun 1997 seiring dengan krisis ekonomi yang berlaku di Asia.

Trend ekonomi negara yang meningkat terus selama 20 tahun kepemimpinan rezim *Orde Baru* yang sebenarnya hanya menguntungkan kroni Soeharto. Terutama semenjak akhir tahun 1980-an ekonomi negara telah dikuasai oleh rekan-rekan Soeharto dan bahkan anak Soeharto (Siti Hardiyanti, Bambang Triatmojo, Tommy Soeharto) memiliki perusahaan besar, mereka hidup dalam kemewahan tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Ini merupakan salah satu puncak ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah.

Perubahan besar akhirnya terjadi, rezim Soeharto tidak mampu mengendalikan kemarahan masyarakat yang sudah memuncak dan *Orde Baru* tumbang. Persoalan yang timbul sekarang adalah, mengapa setelah 32 tahun Rezim Soeharto berkuasa dan keamanan partai *Golkar* mampu dikalahkan di dalam pemilu tahun 1999. Benarkah partisipasi politik, pola pemilihan telah berubah di Indonesia, termasuk pula di kota Bukittinggi seiring dengan berakhirnya kekuasaan rezim *Orde Baru*?

Tujuan buku ini membahas fenomena politik terkini yang terjadi di antara dua masa pemilu (*Orde Baru* dan *Orde Reformasi*) di Indonesia dengan sebuah studi kasus di kota Bukittinggi. Kajian ini mencoba untuk memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola partisipasi politik, dan pola perilaku pemilih pemilu antara masa Orde Baru dan Reformasi.

Menurut Hussain (1987:2) pemilih dan pemilu adalah salah satu proses politik terpenting bagi masyarakat dalam memberikan mandat mereka kepada pemerintah atau partai politik. Ini sekaligus berarti amanah untuk menjalankan pemerintahan negara. Pemilihan partai dalam pemilu adalah sebuah proses terpenting dalam negara yang mengamalkan corak pemerintahan demokrasi (Mohd. Fuad dan Osman 2002: 117).

Untuk tujuan penulisan ini, maka *point* berikut menjadi tumpuan kajian: (1) melihat pengaruh identifikasi partai kepala keluarga terhadap anggota keluarganya yang telah berhak memilih; (2) melihat pengaruh individu pemimpin/tokoh suatu partai terhadap sikap politik pemilih; (3) bagaimana pengaruh pimpinan pemerintah terhadap partisipasi politik di kawasan kajian; (4) melihat pengaruh tingkat pendidikan dan umur (usia) terhadap pola memilih partai, dan; (5) meneliti pengaruh informasi media masa terhadap tanggapan dan sikap memilih sesuatu partai.

C. Rangkuman

Berkaitan dengan hal yang telah dibicarakan di atas, terdapat tiga permasalahan yang utama dalam kajian ini; pertama, masalah partisipasi politik yaitu sejauhmana individu peduli terhadap pemilu yang dilangsungkan. Apakah mereka mempunyai sikap dan persepsi yang positif terhadap proses pemilu seperti terlibat mengikuti pemilihan, berkampanye, dan sebagainya. Kedua, pilihan partai, adalah sejauhmana individu terikat kepada sesuatu partai politik. Apakah mereka mudah berpindah keanggotaan atau memilih partai lain selain partai lama yang sekian lama telah didukungnya ?. Ketiga, perilaku memilih,

sejauhmana partai politik menjadi identifikasi pemilih dalam pemilu ?. Apakah pemilihan seseorang pemilih didorong oleh faktor dirinya sendiri atau faktor lain seperti keluarga, pemimpin, media masa, manifesto partai atau program partai, dan isu-isu tentang reformasi politik dan lain-lain.

Tulisan ini merupakan sebuah kajian sosial yang lebih difokuskan kepada partisipasi politik dan pola perilaku pemilih dalam dua pemilu antara masa rezim Orde Baru (1997) dan Orde Reformasi (1999). Kajian ini juga menganalisis perilaku pemilih dalam konteks perubahan sistem politik, pembangunan negara, dan pengaruh globalisasi seperti informasi dari media masa.

Rasionalnya kajian ini adalah untuk melihat sebuah kasus sejauhmana trend dan corak pemilu dalam konteks Kabupaten/ Kota. Kesan yang paling kentara dapat dilihat dewasa ini di Indonesia yaitu semakin berkurangnya jumlah pemilih partai *Golkar* pada pemilu tahun 1999. Hal-hal seperti ini sangat penting untuk memberikan sumbangan ke arah pengembangan teori partisipasi politik dan pola pemilihan di negara yang sedang berkembang umumnya dan di Indonesia khususnya. Hal ini diharapkan memberikan pertimbangan dan manfaat dalam mengikuti perkembangan demokrasi untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap reformasi politik dan praktik demokrasi yang benar di masa datang.

Kajian ini minimal guna mengetahui proses perkembangan perilaku pemilih sehingga tampak perbedaan sikap tindakan memilih antara masa rezim Orde Baru (1997) dan Orde Reformasi (1999). Adakah perubahan pemilihan ketika itu karena di Indonesia telah terjadi suasana perubahan sistem demokrasi politik yang sejalan dengan era reformasi Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, dilihat kesan perilaku seseorang dalam memilih akankah dipengaruhi oleh beberapa faktor sikap dan persepsi memilih partai. Realitanya di dalam pemilu era reformasi di Indonesia telah terjadi kemerosotan jumlah suara cukup signifikan pemilih partai Orde Lama terutama *Golkar*. Artinya, telah timbul pembagian baru pemilih yang jelas di

antara dua masa yang berbeda antara pemilu Orde Baru dan Reformasi. Hal-hal seperti ini sangat penting untuk melihat proses perkembangan demokrasi baru di Indonesia dan dapat menyumbangkan khazanah ilmu khususnya ke arah pengembangan teori pola pemilihan yang kebanyakan telah dibuat para ahli di negara maju. Sedangkan kajian perilaku pemilih di negara yang sedang berkembang masih terbatas termasuk di Indonesia. Keberhasilan kajian ini diharapkan juga akan memberikan kontribusi kepada pemegang kekuasaan maupun partai politik untuk meningkatkan reformasi (pembaharuan) di bidang politik dan praktik demokrasi sebenarnya di masa depan.

BAB II

PARTISIPASI DAN PERILAKU POLITIK

A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mem-pengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas.

Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikut-sertaan. Menurut Adams (2004:83) partisipasi sangat

penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Menurut Miriam (1998:3) partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Selanjutnya menurut Davis (1997:76) penyertaan pikiran dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka agar menyumbangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas kelompoknya. Dari pengertian Davis tersebut, disimpulkan terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, yaitu: a)

adanya penyertaan pikiran dan perasaan; b) adanya motivasi untuk berkontribusi; dan c) adanya tanggung jawab bersama.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Cohen dan Uphoff (1997:23) yang juga dikutip oleh Kaho (2000:57) adalah sebagai berikut: a) partisipasi dalam pembuatan keputusan; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d) partisipasi dalam evaluasi.

Menurut Sulaiman dalam Sastropoetro (1998:41), merumuskan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut: a) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; b) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan d) partisipasi dalam bentuk dukungan. Sedangkan jenis-jenis partisipasi politik menurutnya adalah: a) partisipasi pikiran (*psychological participation*); b) partisipasi tenaga (*physical participation*); c) partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*); d) partisipasi keahlian (*participation with skill*); e) partisipasi barang (*material participation*); dan e) partisipasi uang/ dana (*money participation*).

Pengertian partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik, terdapat dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* yang dikutip oleh McClosky (1972:252), yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Definisi lain berdasarkan *Handbook of Political Sciences* yang dikutip Nie dan Verba (1975:1) mengungkapkan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Sedangkan partisipasi politik menurut Miriam (1998:4) adalah tindakan-tindakan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi

alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Di samping beberapa definisi di atas, partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1997:3) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Terbukanya saluran komunikasi politik sebagai wadah partisipasi politik menurut Alfian (1980a:37) akan mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan itu menjadi umpan balik (*feed back*) sistem politik.

Lebih lanjut Roth dan Wilson mengungkapkan kegiatan partisipasi politik yang berbentuk non-konvensional, berupa: pengajuan petisi (tuntutan), melakukan demonstrasi (seruan bersama dijalanan), melakukan konfrontasi (perlawanan) dan melakukan mogok (*non action*). Berkaitan dengan partisipasi politik, Rosenau dalam Nimmo (2000:47) membagi ke dalam dua kategori warga negara yang merupakan khalayak dari partisipasi dalam komunikasi politik, yaitu: pertama adalah orang-orang yang sangat memperhatikan politik dan kedua adalah orang-orang yang hanya dimobilisasi untuk kepentingan politik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan

memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Roth dan Wilson (1980:153), kegiatan partisipasi politik secara konvensional mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu (*voting*), menghadiri rapat umum (*campaign*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen.

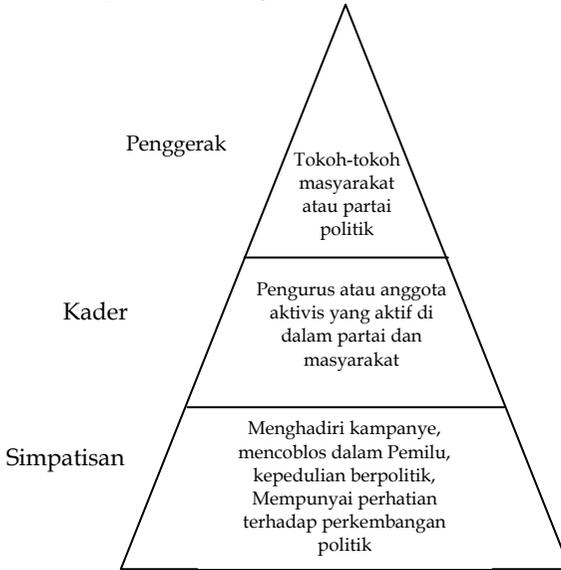
Selanjutnya, menurut Nimmo (2000:49) keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.

1. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
2. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.
3. Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Lebih lanjut partisipasi politik merupakan trend perkiraan jumlah orang yang terdaftar memilih berbanding dengan jumlah pemilih yang menentukan pilihan pada pemilu. Terdapat dua bentuk partisipasi, pertama adalah kegiatan masyarakat memilih dalam pemilu melibatkan penduduk yang banyak. Keduanya adalah keterlibatan sejumlah kecil orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, misalnya menjadi anggota politik atau

pemimpin partai politik atau kelompok-kelompok tertentu di dalam organisasi politik (Miriam 1998:7).

Peringkat nilai partisipasi politik dapat diringkaskan dalam sebuah bentuk piramid (bagan 1).



Bagan 1. Piramid Peringkat Nilai Partisipasi Politik

Pada peringkat paling atas atau tertinggi piramid tersebut adalah kelompok orang yang termasuk penggerak utama, yaitu para tokoh pemimpin politik. Di bawahnya, adalah para pendukung yaitu kader atau pengurus partai yang aktif di dalam organisasi politik. Selanjutnya pihak simpatisan yaitu orang banyak yang terlibat di dalam kegiatan politik. Masyarakat paling terendah adalah orang yang tidak berpolitik dan tidak mau terlibat di dalam politik. Peringkat tersebut dapat menunjukkan kelompok-kelompok partisipasi politik yang sangat rendah, sedang di dalam suatu masyarakat.

Partisipasi politik dapat memainkan peranan yang penting di negara demokrasi. Di negara-negara yang memiliki praktik demokrasi masyarakat memiliki peranan tertinggi, kedaulatan

negara berada sepenuhnya di tangan masyarakat. Dalam konteks tersebut masyarakat itu sendiri dapat memberikan partisipasi secara langsung untuk menentukan orang-orang yang dikehendaki untuk menduduki pucuk kepemimpinan negara. Oleh karena itu, dengan tata cara pemilihan yang jujur dan adil, maka masyarakat dapat menentukan pilihan untuk partai tertentu, yaitu memilih partai yang dianggapnya mampu menyalurkan aspirasi politik mereka.

Di negara demokrasi, makin banyak masyarakat berpartisipasi dianggap sangat baik, sebaliknya jika masyarakatnya kurang berpartisipasi maka dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Masyarakat kurang berpartisipasi kebanyakan disebabkan adanya pemimpin negara yang otoriter dan kurang aspiratif. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi bukan lagi berada di pihak masyarakat, tetapi berada di tangan pemimpin otoriter.

Para ahli dan pengkaji dari barat umumnya berpendapat bahwa partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang dilakukan tanpa dipaksa atau mendapat tekanan dari pihak manapun. Sarjana tersebut termasuklah Herbert McClosky, Gabriel Almond, Norman H. Nie dan Sidney Verba (Miriam 1998). Tetapi sebagian sarjana yang lain yang telah membuat kajian di negara komunis dan negara yang sedang membangun berpendapat bahwa agak sukar untuk membedakan di antara kegiatan sukarela dengan kegiatan yang dipaksakan dari segi partisipasi politik.

Di negara sedang berkembang tingkat partisipasi sangat tinggi disebabkan adanya unsur paksaan oleh pemerintah agar masyarakat haruslah memilih partai pemerintah. Huntington dan Nelson (1977) yang telah banyak membuat kajian di negara yang sedang berkembang menyatakan bahwa di negara-negara komunis atau negara berkembang partisipasi politik dilakukan dengan pemaksaan dan kecurangan hasil-hasil pemilihan oleh pihak yang berkuasa misalnya pada saat akhir penghitungan jumlah pilihan. Dia membagi jenis partisipasi politik di negara

yang sedang membangun kepada dua bagian, partisipasi politik otonom dan partisipasi politik yang digerakkan (*mobilization*).

Partisipasi politik otonom dilakukan seseorang (individu) berdasarkan persepsi dan kesadaran sendiri sebagaimana di negara-negara demokrasi. Partisipasi yang digerakkan atau partisipasi yang sengaja dipaksakan kepada masyarakat biasanya dipraktikkan di negara otoriter.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan para pakar pengamat politik, maka partisipasi tersebut mencakup kegiatan-kegiatan politik, perilaku warganegara di bidang politik termasuk perilaku memilih partai dalam pemilu dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dalam masyarakat negara demokrasi, konsep partisipasi politik ialah kedaulatan berada di tangan masyarakat yang dilakukan secara bersama untuk menetapkan tujuan masa depan dan menetapkan calon pemimpin negara. Pemilih dalam pemilu akan memilih partai yang dianggap mampu mewakili suara dan aspirasi mereka. Semakin banyak pemilih memilih suatu partai maka terbuka luas peluang partai tersebut untuk menang.

Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan individu yang mencakup tindakan memilih dalam pemilu, menghadiri kampanye, menjadi anggota partai, mengadakan hubungan dengan pemimpin negara, anggota parlemen dan sebagainya (Miriam 1996:183). Partisipasi politik tersebut dapat dilihat rendah, sedang, atau tinggi.

Menurut Huntington dan Nelson (1998) partisipasi politik di negara yang sedang berkembang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pembangunan negara. Kadar partisipasi politik berkaitan erat dengan perkembangan sosial-ekonomi negara dan tahap kemajuan pembangunan sebuah negara. Pembangunan yang pesat menciptakan perubahan terhadap nilai, sikap dan perilaku bagi setiap anggota masyarakat yang tertindas dengan pembangunan tersebut di kota atau luar kota. Partisipasi politik dalam pemilu bagi penduduk di luar kota dikatakan lebih tinggi dibandingkan

dengan di kota yang berkurang atau tidak berubah. Sebaliknya, perkotaan boleh mengubah corak perilaku pemilih. Namun, penduduk kota yang berasal dari desa pada umumnya tidak mudah dipengaruhi dan masih mengamalkan cara hidup dan berpikiran desa. Mee (1997:7) juga berpendapat bahwa kota merupakan salah satu basis bagi proses partisipasi politik. Ini karena modernisasi di kota membawa pengaruh terhadap kecerdasan melalui interaksi sosial maupun media masa.

Menurut Verba dan Nie (1972), Dahl (1978) bahwa partisipasi politik akan berkurang apabila seseorang berpindah dari kota kecil atau luar kota ke kota besar. Situasi luar kota berlainan dengan kota, penduduknya mempunyai kekerabatan yang kental dan saling mudah berinteraksi. Sebaliknya di kota politik terasa lebih rumit dan tidak lagi menjadi perhatian penduduk. Akibatnya partisipasi politik berkurang di kota.

Perkembangan demokrasi terkini di dunia termasuk di negara berkembang diperkirakan berubah sejak tahun-tahun terakhir abad ke-20 dan kepekaan masyarakat terhadap pemahaman demokrasi senantiasa meningkat seiring dengan era globalisasi. Keadaan tersebut oleh Huntington (1997:13) dikatakan sebagai proses gelombang demokrasi. Perubahan tersebut dikesan dengan banyaknya pergantian rezim otoriter di dunia. Pada suasana demokrasi, seseorang akan lebih terbuka untuk mempedulikan perkara politik dan seterusnya akan banyak melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Perubahan arah praktik demokrasi pada tahun 1990-an terjadi karena kegawatan ekonomi di beberapa negara terutama di Asia. Pada masa itu keutuhan ekonomi di beberapa negara Asia Timur jatuh drastis (Kamarudin 2000:2). Serangan ekonomi mengakibatkan mata uang negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, serta bursa-bursa saham negara-negara tersebut turut jatuh. Di beberapa negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia rezim pemerintah berkuasa yang otoriter dan sulit mengatasi krisis ekonomi.

Demokrasi dan masyarakat adalah dua komponen terpenting sebuah negara. Antara peranan masyarakat yang terpenting di dalam proses demokrasi ialah partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah perkembangan negara seperti membentuk pemerintahan demokrasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di dalam demokrasi dikenal pula budaya politik.

Menurut Almond dan Verba (1963:13) budaya politik merupakan sikap seseorang terhadap sistem politik dan komponen-komponen politik serta peranan yang dimainkannya di dalam sistem politik. Budaya politik adalah keinginan psikologi terhadap objek sosial yaitu sistem politik dalam hal ini dikatakan sebagai orientasi *kognitif* (pemahaman), *afektif* (perkaitan emosi) dan *evaluasi* (penilaian). Kognitif ialah pemahaman dan keyakinan seseorang terhadap sistem politik dan perannya seperti ibunegara, logo negara, pemimpin negara, batas-batas negara, mata uang yang digunakan dan lain-lain. Sedangkan afektif adalah keterkaitan perasaan seseorang terhadap sistem politik. Manakala evaluasi ialah penilaian seseorang terhadap sistem politik yang ada di negara mereka dan adakah peranan mereka di sana. Oleh karena itu, terbentuklah budaya politik yang berbeda.

Di dalam masyarakat yang mayoritas mempunyai sikap kognitif akan membentuk budaya politik *parokial* (sempit). Bagi yang bersikap afektif membentuk budaya subjektif (perasaan pribadi) dan bagi masyarakat yang mempunyai penilaian (evaluasi) positif terhadap proses politik yang ada terbentuklah budaya politik partisipasi ialah budaya politik yang sangat mendukung sistem politik demokrasi yang stabil atau dikenal sebagai *civic culture* (Almond dan Verba 1963:178).

Kedua ahli tersebut telah mengaitkan antara tingkat budaya politik dengan demokrasi di beberapa buah negara (Amerika Serikat, Inggeris, Jerman, Italia, dan Meksiko). Kajian ini mendapati negara yang mempunyai budaya politik yang tinggi akan mendorong proses demokrasi yang stabil dan negara yang mempunyai budaya politik rendah, mendapati demokrasinya

belum berkembang sebagai mana mestinya. Menurut Asnarul-khadi (1997:13) negara yang sudah “berpandangan dunia” masyarakatnya hidup aman damai tanpa dipisahkan oleh elemen-elemen sempit etnik, sentimen kedaerahan, kebudayaan, kepercayaan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat “pandangan dunia” politik yang dimaksud, Milbrath (1965:68) mengemukakan bahwa seseorang akan peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mendalam berdasarkan pengetahuan politiknya. Keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik seperti mengadakan interaksi sosial, memasuki organisasi politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media masa cetak maupun elektronik.

Seseorang yang sudah memiliki pemahaman politik, ia akan memilih secara bebas dan bersih menurut hati nuraninya. Di Indonesia partisipasi politik dipengaruhi oleh budaya politik lokal. Dewasa ini pengaruh itu masih terkait yang mencirikan corak hubungan antara kekuasaan tradisional dan modern. Kekuasaan tradisional didasarkan kepada konsep *patrimonial* dan hubungan antara *patron-client*. (Noer 2003:29).

Partisipasi politik di negara yang telah melaksanakan demokrasi diyakini sebagai hak oleh setiap warganegara, tetapi setiap negara mempunyai kadar partisipasi politik yang berbeda, artinya tidak semua warga negara terlibat di dalam proses pemilu. Menurut Surbakti (1992:144) bahwa kadar tinggi atau rendahnya partisipasi politik warganegara disebabkan oleh faktor kesadaran politik seseorang tentang hak dan kewajibannya kepada negara dan kepercayaannya terhadap pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan politik, minat, dan sikap kepada politik di negaranya yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Huntington dan Nelson (1994:27) mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat digolongkan kepada dua tahap perkembangan, pertama tahap perkembangan yang meluas bagi kelas atau kelompok menengah di kota-kota, kedua tahap

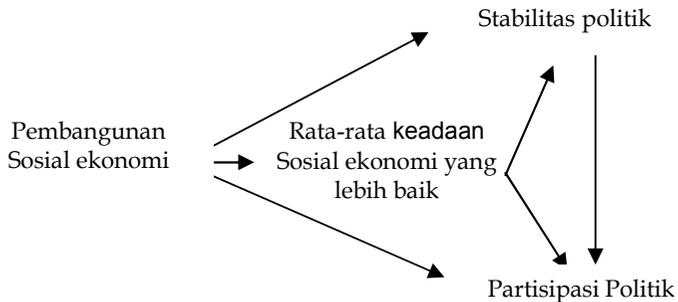
perkembangan yang mencakup kelompok masyarakat jelata di desa dan kota. Apabila pembangunan sosial ekonomi pesat dan menaikkan peringkat kesejahteraan ekonomi umumnya maka terjadi tingkatan kesejahteraan yang adil, hal ini akan dapat memajukan keseimbangan politik.

Menurut Paige (1971:810-820) sekurang-kurangnya terdapat empat macam bentuk partisipasi politik, pertama apabila kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi maka partisipasi sangat tinggi. Keduanya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik juga rendah. Ketiga, sikap militan atau radikal yaitu apabila kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik adalah rendah. Terakhir, kesadaran politik rendah tapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik adalah tidak aktif atau nol.

Walaupun demikian, variabel-variabel tersebut berkaitan dengan kadar tinggi atau rendahnya berdasarkan faktor-faktor status sosial, ekonomi, partai ibu bapak, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial dimaksud yaitu kedudukan seseorang di dalam masyarakat berdasarkan keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Manakala status ekonomi ialah status sosial berdasarkan kekayaan yang diukur dari penghasilan, keluaran atau kepemilikan benda-benda berharga mahal. Seseorang yang telah memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi akan mempunyai pengetahuan politik dan mereka merasa peduli terhadap politik serta mempunyai minat, kepercayaan kepada pemerintah atau pemimpin/tokoh.

Masyarakat yang berada dalam kelas bawah di desa dan kota berada dalam bentuk *pembangunan teknotat* dan *pembangunan kemasyarakatan*. Namun kedua bentuk pembangunan ini akan menciptakan *lingkaran setan* karena dapat menghasilkan partisipasi yang meluas dan partisipasi dapat berkurang. Sebab-sebab berkurangnya partisipasi politik di kalangan penduduk adalah karena terjadinya krisis ekonomi negara, sebaliknya pula

apabila berlaku modernisasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, taraf kesejahteraan hidup masyarakat meningkat, maka partisipasi politik akan semakin meluas. Hubungan sebab dan akibat demikian dapat digambarkan oleh “garis lembut” bentuk liberal (bagan 2).



Bagan 2. Partisipasi politik, Huntington dan Nelson (1994:27)

Di negara yang sedang membangun biasanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik adalah faktor pembangunan sosial ekonomi yang bertumpu kepada masyarakat di kelas menengah di kota dan kelas rendah di desa. Pembangunan sosial ekonomi yang dirancang secara pesat di kota terjadi jurang ekonomi terutamanya bagi masyarakat di desa. Apabila pembangunan digalakkan bagi kelas menengah di kota maka ekonomi akan pesat, tetapi kemerosotan kelas bawah akan bertambah terpuruk dan partisipasi politik menjadi berkurang.

Menurut model pembangunan teknokrat adalah partisipasi politik lebih rendah, hal ini yang dikehendaki oleh rezim berkuasa agar pembangunan menjadi lancar dan ekonomi menjadi lebih baik. Tetapi pemerintah otoriter tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat yang bebas, keadaan tersebut akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengadakan perlawanan kepada pemerintah dan menimbulkan ledakan partisipasi yang bisa menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Hal demikian dapat disaksikan saat

unjuk rasa yang sudah meluas di Indonesia, masyarakat bersama-sama melakukan tekanan sehingga Presiden Soeharto dipaksa meletakkan jabatan dan rezim *Orde Baru* pun tumbang.

Partisipasi politik digolongkan atas dua, pertama partisipasi individu yang dilakukan oleh seseorang. Kedua adalah partisipasi bersama-sama, dilakukan oleh orang banyak mempengaruhi kedudukan pihak berkuasa seperti pemilu (Sastroatmodjo 1995:9). Berkaitan dengan partisipasi politik seperti itu diwujudkan masyarakat dalam bentuk perilaku memilih partai. Di negara-negara yang banyak penduduknya berpendidikan tinggi, perbedaan jenis kelamin dan status sosio ekonomi sangat mempengaruhi aktivitas partisipasi politik. Misalnya laki-laki lebih aktif dibanding wanita dan orang yang status ekonomi tinggi juga paling tinggi berpartisipasi berbanding yang berpendapatan rendah.

Bagi masyarakat yang berpartisipasi seperti pada pemilu atau kegiatan yang lain, mereka berkeyakinan bahwa kegiatannya akan mendapat perhatian serius dari pihak yang berkuasa untuk menetapkan suatu kebijakan yang berguna untuk seluruh masyarakat. Selain itu, perilaku memilih berkaitan dengan aspek letak geografi wilayah tertentu juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemilih partai tertentu seperti yang pernah berlaku di Amerika Serikat karena ikatan harmoni antara sesama warganya dalam satu kawasan asal sekampung yang senantiasa memilih partai tertentu. Contohnya selama berabad-abad masyarakat yang bertempat tinggal di bagian selatan Amerika Serikat adalah pendukung yang sangat kuat bagi *Partai Demokrat*.

B. Pola Memilih

Pola memilih dalam pemilu dapat dikelompokkan kepada tiga golongan yaitu pertama, pendekatan sosiologi yang dikemukakan oleh *Columbia's University Bureau of Applied Social Sciences* Amerika Serikat. Para pakarnya (Saymor Martin Lipset, Paul F. Lazarsfeld, Berelson Bernard R dan Harel Gaudeet) yang berpendapat bahwa kedudukan sosial, ekonomi, agama, warna

kulit, jenis kelamin, pekerjaan berpengaruh kepada perilaku memilih partai. Kedua, pendekatan psikologi yang dikembangkan pengajurnya, *University of Michigan's Survey Research Center*, dan ketiga, pendekatan Ekonomi atau Politik Rasional yang dibuat oleh Malweit menyatakan bahwa pemilihan partai dipengaruhi oleh aspek-aspek kesukaan seseorang kepada partai tertentu, ketokohan (pemimpin) masyarakat, calon wakil masyarakat dan isu-isu politik negara. Artinya identifikasi partai sangat dominan mempengaruhi pemilih. Namun, kedua pendekatan tersebut tidak memuaskan pengkaji paling akhir karena itu pendekatan ekonomi telah timbul setelah itu (Kristiadi 1996:76). Tiga pendekatan dimaksudkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan *sosiologi* mendasarkan kepada susunan lapisan masyarakat beberapa keterkaitan faktor sosial berpengaruh dengan pola pemilihan antara lain keadaan sosio ekonomi, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan pekerjaan pemilih. Teori tersebut banyak digunakan untuk menganalisis pola pemilu di negara-negara Eropah. Di antara sarjana tersebut adalah Seymour Martin Lipset, Paul F Lazarsfeld, Berelson, Bernard R, dan Harel Gandet.

Pendekatan sosiologi didasarkan kepada peranan kelas/kelompok (kumpulan) atau kedudukan seseorang atau kelompok terhadap pola pemilihan partai. Kelas yang dimaksud yaitu kelompok politik yang sudah berkembang dalam kumpulan-kumpulan masyarakat yang berbeda karena aspek sosio ekonomi tertentu (Kristiadi 1996:76). Variabel keterkaitan adalah ciri-ciri sosial ekonomi dan kelompok-kelompok sosial masyarakat. Status sosial meliputi umur (tua-muda), jenis kelamin, dan agama. Kelompok sosial adalah status keanggotaan seseorang di dalam organisasi keagamaan, pekerjaan, keluarga, hubungan dengan teman-teman, atau kelompok-kelompok yang lain.

Setiap kelompok sosial mempunyai peranan yang amat besar membentuk sikap dan persepsi seseorang ketika memilih partai tertentu pada suatu pemilu. Hal tersebut juga seiring

dengan pendapat (Asfar 1996:47) bahwa kelompok sosial berpengaruh terhadap perilaku memilih, antara lain umur, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Pengelompokan yang dimaksud meliputi keanggotaan seseorang dalam organisasi agama, jenis pekerjaan dan kelompok keluarga, dan teman-teman sebaya.

Menurut Nurhasansyah (1997:415) variabel sosial ekonomi seseorang (pemilih) dan keluarganya mempunyai kaitan erat dengan pola memilih. Menurutnya, perilaku orangtua dalam memilih suatu partai tertentu akan dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh anaknya. Sikap atau persepsi seseorang terhadap politik terbangun sejak kanak-kanak sampai dewasa karena ia telah melalui proses sosialisasi politik di rumah. Selain itu, pengetahuan politik diperoleh dalam lingkungan sekolah, organisasi, dan sebagainya. Di samping itu, kaitan agama, tempat tinggal, dan kelas sosial juga berpengaruh kepada perilaku memilih.

Dari kajian perilaku yang dilakukan Lipset (1960) merumuskan bahwa kelompok sosial ekonomi adalah paling terkait terhadap pola pemilihan. Orang-orang yang berpendapatan rendah dan buruh memilih partai *sosialis* dan *komunis* di Eropah. Di sana orang-orang berpendapatan menengah dan tinggi memilih partai Konservatif. Namun di Inggris, penelitian Heath (1991) dan Mc Allister (1990) mendapati pengaruh kelas sosio ekonomi sangat tipis kesannya terhadap perilaku memilih (Asfar 1996:49).

2. Pendekatan Psikologi

Pendekatan *psikologi* atau pendekatan Michigan, mendasarkan kepada faktor psikologi atau sikap yaitu yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang seperti hubungan seseorang dengan sebuah partai politik, perasaan seseorang terhadap calon Presiden atau wakil masyarakat yang bertanding dan pengaruh isu-isu politik saat itu.

Pendekatan ini dibuat oleh Pusat Penelitian *Universiti Michigan* Amerika Serikat yang dipelopori oleh August Campbell

dan rekan-rekan (1954 dan 1960) timbul karena perasaan kurang puas para anggota lain terhadap pendekatan sosiologi sebagaimana yang telah berkembang di Eropah. Para anggota berpendapat bahwa perilaku pemilih tidak dapat diukur dengan pasti semata-mata dengan memeriksa keadaan sosial ekonomi penduduk, pendidikan, agama, dan lain-lainnya. Maka, lahirlah pendekatan psikologi yang didasarkan kepada faktor sikap dan persepsi seseorang untuk memilih.

Penganut *Michigan* (pendekatan psikologi) menumpukan kepada pengenalan (identifikasi) partai seperti emosi seseorang dengan partai yang tertentu dan sikap seseorang terhadap isu-isu politik serta calon (tokoh) yang bertanding. Pendekatan tersebut beranggapan bahwa sikap atau persepsi seseorang akan membentuk pola perilaku memilih sebuah partai politik tertentu. Terdapat tiga fungsi yang berkaitan dengan sikap atau persepsi yang dimaksud. *Pertama*, sikap merupakan fungsi sesuatu keperluan, artinya sikap, minat terbentuk atas dasar keperluan seseorang terhadap objek (partai politik). *Kedua*, sikap yang terbentuk setelah adanya proses menyesuaikan diri dengan pihak lain, artinya seseorang sama-sama tertarik atau tidak tertarik dengan seseorang tokoh yang disegani atau kumpulan yang disertainya, apabila ia tertarik maka akan memilih partai yang dipilih tokoh tersebut. *Ketiga*, sikap merupakan pertahanan diri yaitu upaya untuk mengatasi berbagai bentuk konflik batin atau tekanan psikologi yang terjadi seperti wawasan, idealisme, pemikiran, dan sebagainya dalam diri seseorang.

Seseorang anak mendapat pengajaran pertama dari ibu bapaknya, sikap dan perilaku. Menurut orang tuanya seperti pengenalan terhadap norma-norma, undang-undang masyarakat, dan juga selukbeluk politik. Pengalaman bersama orang tua tersebut berpengaruh terhadap perilaku seseorang apabila telah dewasa. Hal-hal demikian juga didapati oleh seseorang apabila ia bersekolah dan mempelajari masalah-masalah negara. Teman-teman dan media masa dapat pula membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam memilih partai tertentu.

Namun, sikap seseorang tidak terbentuk dalam jangka masa yang singkat. Hal ini dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada peringkat awal perkembangan kejiwaan seseorang amat dipengaruhi oleh pengajaran dari ibu-bapak mereka. Dalam konteks tersebut seseorang akan banyak belajar dari perilaku ibu-bapak atau keluarganya dalam membentuk kecenderungan berpolitik dan memahami isu-isu politik. Apabila telah dewasa pengaruh luar seperti teman-teman di sekolah, tempat pekerjaan, tempat ibadah, dan kegiatan organisasi akan mempengaruhi sikap politik mereka.

Kehidupan di luar keluarga dan proses sosialisasi yang dilalui akan membentuk ikatan psikologis seseorang yang amat kuat terhadap sebuah organisasi atau partai politik. Keadaan ini menjadikan seseorang merasa memiliki ikatan psikologi dengan sesuatu organisasi atau partai politik tertentu dan akan memilih partai tersebut dalam pemilu. Hal tersebut dikenal juga sebagai identifikasi partai. Lazimnya orang yang termasuk ke dalam kategori identifikasi partai senantiasa memilih partai yang sama secara terus menerus setiap pemilu berlangsung.

3. Pendekatan Ekonomi Politik Rasional

Pendekatan *ekonomi politik rasional* adalah berdasarkan kaitan antara faktor-faktor keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh seseorang apabila ia memilih sebuah partai politik. Pendekatan *ekonomi* atau pendekatan *politik rasional* adalah untuk menghubungkan kedua pendekatan tersebut di atas (sosiologi dan psikologi). Pendekatan ini dikemukakan oleh Melweit dikenal juga sebagai pendekatan *Consumer Model of Party Choice*. Pendekatan ini mendasarkan pengaruh taraf ekonomi negara berkaitan erat dengan pola pemilihan. Apabila perkembangan ekonomi pesat dan masyarakat memperoleh keuntungan yang besar, masyarakat akan memilih partai pemerintah yang dianggap telah mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menghindari kerugian. Oleh karena itu, pemilih menilai suasana isu-isu politik yang diutarakan pada masa tersebut yang artinya, pemilih akan

memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keuntungan atau kerugian yang rasional (nyata).

Di samping itu, pemilih juga terpengaruh dengan ketokohan dan reputasi calon partai yang bertanding. Penilaian yang sewajarnya diberikan kepada calon-calon yang bertarung dari aspek jabatannya, informasi pribadinya yang berkompeten di bidang seni, film, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, pola pemilihan senantiasa akan berubah menurut situasi ekonomi dan peristiwa-peristiwa politik terkini serta ketokohan seseorang calon yang populer.

Dari ketiga pendekatan corak perilaku tersebut, agak sukar untuk dijadikan model dalam menganalisis pola pemilihan di Indonesia, karena pendekatan sosiologi lebih menumpukan kepada hal-hal berkaitan dengan keadaan kelas masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan politik. Di Indonesia pembagian kelas demikian belum nyata terbentuk, kecuali di beberapa kawasan di Jawa. Pendekatan psikologi, lebih menumpukan kepada keanggotaan partai dan isu-isu politik, dalam konteks Indonesia belum sesuai karena masih ada partai tertentu wujud secara dominan. Sedangkan pendekatan ekonomi rasional hanyalah menjuruskan dari segi logika pemilih yang sebagian besar di Indonesia tidak mengenal secara dekat tokoh-tokoh dan kurang memahami isu-isu politik yang berkembang tentu tidak dapat mempertimbangkan untung rugi.

Menurut Surbakti (1992:145) kegiatan masyarakat memilih dalam pemilu merupakan kegiatan mengambil keputusan bersama-sama memilih atau tidak memilih partai. Jika ia memilih apakah memilih partai atau tokoh yang tertentu. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan kelas sosial, sosiologi, ekologi (persekitaran), psikologi sosial, dan pendekatan berdasarkan pemikiran yang wajar (rasional).

Pendekatan kelas sosial meliputi perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan masyarakat kota dan luar kota, bahasa dan wawasan kebangsaan. Selain itu jumlah partai, asas partai tertentu, dan program partai. Pendekatan sosiologi adalah

kaitan antara pemilih dengan keadaan demografi, sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal (kota atau desa), pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan agama. Manakala pendekatan ekologi (persekitaran) yaitu perbedaan pemilih karena daerah seperti kampung, negeri dan lain-lain. Di sini terdapat golongan-golongan tertentu seperti berdasarkan penganut agama, buruh, etnik, pekerjaan mereka bertempat tinggal pada suatu kawasan tertentu.

Pendekatan psikologi sosial, berdasarkan kepada identifikasi partai, yaitu persepsi pemilih memilih partai tertentu karena kedekatan dengan partai. Setiap suara pemilih ini akan memilih partai tertentu dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Pendekatan rasional lebih ditujukan kepada faktor untung atau rugi bagi seseorang jika memilih sebuah partai.

Walaupun di Indonesia pemilu sudah dimulai sejak tahun 1955, namun kajian perilaku memilih belum begitu banyak dilakukan. Penelitian Clifford Geertz (1960) menumpukan perilaku memilih dari sudut golongan *aliran* (pemahaman agama) dan kelas sosial masyarakat di Jawa. Golongan politik aliran yaitu golongan *abangan* terdiri dari masyarakat menganut pemahaman kepercayaan lama beragama campuran Hindu, Budha dan Jawa Kuno. Manakala golongan *santri* ialah orang-orang penganut Islam syariat. Golongan *abangan* di Jawa cenderung memilih *Partai Nasional Indonesia* (PNI) dan *Partai Komunis Indonesia* (PKI). Manakala golongan *santri* pula memilih partai-partai Islam *Nahdlatul Ulama* (NU), *Partai Tarbiyah Islamiyah* (Pertida) dan *Partai Serikat Islam Indonesia* (PSII). Geert juga mengaitkan di antara kelas sosial dan perilaku memilih. Masyarakat kelas rendah telah memilih partai PKI dan NU, kelas menengah memilih partai *Majelis Syura Muslimin Indonesia* (Masyumi). Kelas atas atau *ningrat* Jawa memilih PNI.

Untuk melihat partisipasi politik khususnya pola pemilihan perlu dibuat struktur kajian partisipasi politik; pola pemilihan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor; *pertama*, identifikasi partai yang berkaitan dengan kepala keluarga, apabila kepala keluarga

telah menjadi anggota suatu partai maka diperkirakan pula anggota keluarganya turut terpengaruh seperti isteri, menantu, anak yang layak memilih, dan keluarga lain mereka. Anggota keluarga kerap dipengaruhi oleh pilihan yang dibuat oleh kepala keluarga mereka. *Kedua*, kepribadian tokoh lokal seperti tokoh agama, adat, dan cendekiawan. Tokoh yang telah dianggap pemilih layak sebagai pemimpin idola mereka berpengaruh bagi memilih sesuatu partai tokoh tersebut.

Ketiga, pemimpin negara yang memberikan keteladanan, punya prinsip teguh, dan berkharisma. Pemimpin yang dianggap berhasil menyelenggarakan negara dan senantiasa berpihak kepada masyarakat sehingga kehidupan masyarakat yang sejahtera berpengaruh kepada seseorang untuk memilih partai pemerintah atau partai tokoh yang bersangkutan. *Keempat*, tahap pendidikan dan umur pemilih berpengaruh bagi memilih partai karena orang berpendidikan tinggi mempunyai motivasi, persepsi, pengetahuan mendalam dan punya sikap politik otonom. Bagi orang yang sudah dewasa dan tua juga mempunyai motivasi dan sikap yang lebih konsisten dalam menentukan suara partai yang dilihatnya dan *kelima*, penyampaian media masa seperti iklan, sosialisasi politik, kampanye pemilihan yang disiarkan oleh media cetak dan elektronik pada hari-hari tertentu (pada surat kabar, majalah, radio, televisi, video, internet, dan lain-lain) berpengaruh terhadap pengetahuan, kesadaran politik pemilih, dan sikapnya memilih.

C. Perilaku Politik

Perilaku memilih atau perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Surbakti (1992:131), mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Di samping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti

perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen ekonomi, perilaku keagamaan, dan lain sebagainya.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Fadillah Putra, 2003:200). Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian di antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil masyarakat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perilaku pemilih dalam pemilu adalah dengan menggunakan pendekatan *voting behavior* (perilaku pemilih). Dieter Roth (2009) menyebutkan bahwa apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak ada hanya satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya. Namun menurutnya, secara umum terdapat tiga macam pendekatan atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilu, yaitu pendekatan sosiologis atau sosial struktural, model psikologi sosial, dan model pilihan rasional (Fadjar 2010: 113) Menurut Dieter Roth, ketiga pendekatan itu tidak sepenuhnya berbeda, dan dalam beberapa hal ketiganya bahkan saling membangun dan mendasari serta memiliki urutan kronologis yang jelas. Perbedaan antara ketiga pendekatan ini terletak pada titik beratnya satu sama lain.

Pertama, pendekatan sosiologis atau sosial struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (a) status sosial ekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, dan (e) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman). Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960) dan Lazarsfeld (1968) hanya untuk menyebut beberapa nama, mempunyai kaitan kuat dengan perilaku pemilih. Penelitian mengenai perilaku ini awalnya diprakarsai sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia (*Columbia's School*) yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940. Mereka mendapati pola perilaku pemilih yang menunjukkan adanya kaitan erat antara pemilih dengan aspek-aspek sosial struktural yang lebih dominan. Lazarsfeld (1968) misalnya memberi contoh bahwa dari segi kelas, para pemilih dari kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai Republik. Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik.

Kedua, pendekatan psikologis atau psikologi sosial. Model ini dikembangkan beberapa sarjana ilmu politik dari Michigan University di bawah *The Michigan Survey Research Centre* atau sering disebut sebagai *Michigan's School*. Dieter Roth menjelaskan bahwa para peneliti dari *Michigan's School* lebih melihat perilaku pemilu dengan mengkaji sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut mereka, persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihannya dalam pemilu. Selain itu, "keanggotaan psikologis" dalam sebuah partai dapat diukur juga dalam bentuk variabel identifikasi partai yang juga turut mempengaruhi keputusan atas pilihannya dalam pemilu.

Ketiga, pendekatan pilihan rasional atau *rational choice*. Menurut Dieter Roth, pendekatan ini dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurut Anthony Downs, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya.

Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Morris P Fiorina dalam model keputusan pemilu restospektif. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasikan satu sama lain.

Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bagian dari kajian partisipasi politik. Menurut Sastroatmodjo (1995:4), perilaku seseorang yang memilih partai tertentu dipengaruhi oleh beberapa sebab internal dan eksternal kehidupan seseorang seperti keadaan sistem politik, ekonomi, budaya, dan media masa. Selain itu dikatakan pengaruh keluarga, agama yang dianut pendidikan, dan hubungan personal di dalam masyarakat. Faktor lain juga membawa pengaruh seperti suasana iklim, keadaan internal keluarga dan lingkungan serta unsur pemaksaan dari pihak tertentu.

Menurut Almond (1965:87) perilaku memilih dalam pemilu terbentuk oleh pendidikan politik dalam keluarga, sekolah, teman sepergaulan, di tempat pekerjaan, pengaruh media masa dan hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh politik. Menurut Robert dalam Sumarno (1989:133) bahwa perilaku politik tindakan atau emosi seseorang dalam suasana politik yang tertentu berasaskan

kepada sikap atau persepsi, misalnya mendukung partai atau membangkang kepada pemerintahan. Persepsi dimaksudkan di sini adalah perilaku seseorang atau kumpulan masyarakat yang dirujuk ke keterkaitan faktor-faktor sosiologi dan psikologi serta keadaan ekonomi masyarakat maupun negara. Impak faktor tersebut menimbulkan minat seterusnya dilakukan dalam sikap perbuatan yang diinginkan seperti memilih partai yang tertentu.

Seluruh aktivitas kejiwaan seseorang diawali oleh motivasi atau minat yang menjadi penggerak perilaku tertentu (Irwanto 1994:193). Sebagai daya pendorong, motivasi adalah memberi arah dan mengatur perilaku. Ravianto (1985), Armtrong (1990) dan Handoko (1994) dalam Nurhasansyah (1997:420) mengatakan bahwa terdapat dua bagian motivasi yaitu, pertama motivasi yang datang dari dalam diri sendiri seperti seseorang bergiat melakukan sesuatu pekerjaan karena merasa amat senang melakukan pekerjaannya dan ia merasa puas hati. Keduanya, motivasi karena ada perangsang dari luar, seperti seseorang bergiat bekerja sangat kuat jika ia diberi hadiah atau kenikmatan dari hasil usahanya.

Motivasi dapat membawa perubahan kepada sikap atau persepsi seseorang untuk mencorakkan perilakunya memilih (Newcomb 1978:32). Sikap ialah penampilan dalam bentuk pernyataan perilaku secara lisan maupun perbuatan. Bagi seseorang yang telah mempunyai persepsi politik yang mendalam ia akan berpartisipasi politik dan memastikan pemilihan terhadap partai tertentu. Menurut Mar'at (1992:131) bahwa persepsi politik adalah kesediaan seseorang untuk bertindak cerdas kepada objek politik sebagai tindak balas dari pemahaman mereka yang cukup mendalam mengenai politik dan apabila persepsi sudah ada di dalam pemahamannya, maka seseorang boleh memastikan sikap memilih partai yang disukainya. Oleh karena itu, persepsi politik adalah pemahaman seseorang terhadap sebuah konsep umum politik yang berpengaruh terhadap pola perilaku pemilihan saat

pemilu dan perilaku seseorang untuk menyertai aktivitas politik semasa pemilu.

Tingkah laku politik dapat diartikan sebagai kegiatan setiap warganegara yang berkaitan dengan situasi perkembangan politik sebuah negara. Tingkah laku politik didasarkan kepada keadaan masyarakat yang tidak terlepas dari budaya politik. Menurut Almond dan Verba (1972) bahwa, perilaku pemilih adalah persepsi dan arah yang khas warganegara terhadap sistem politik yang memainkan peranan di dalam sistem pemerintahan tersebut. Tingkah laku seseorang akan terbentuk oleh adanya pengalaman, keterlibatan bersama-sama untuk menolak atau menerima setiap objek atau peristiwa politik (Arifin 1998:50). Di dalam proses demikian seseorang melakukan interaksi dengan pemerintah, masyarakat, kelompok maupun individu untuk membuat, melaksanakan dan menetapkan sebuah keputusan politik. Oleh karena itu, maka tingkah laku politik mempunyai makna yang berbeda-beda bagi setiap orang dan tergantung kepada budaya politik di tempat mana ia berada dan perilaku politik mencakup aktivitas menentukan pilihan pemilu, menghadiri perhimpunan awam, menjadi anggota partai politik, mengadakan hubungan pribadi dengan orang-orang lain mengenai seluk beluk politik seperti dengan pihak elit pemerintah, elit politik dan sebagainya (Miriam 1982:23). Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa perilaku politik ialah kegiatan seseorang dalam politik yang lebih meluas.

Kajian pemilihan menumpukan perbincangan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat menentukan pilihan dalam suatu pemilu. Bagi seseorang memilih, ada secara konsisten memilih sebuah partai tertentu atau ada kemudiannya pemilihan kepada partai yang lain (Kristiadi 1996:73). Maka kajian pemilihan menumpukan penelitian terhadap beberapa aspek pengaruh yang berkaitan dengan hal-hal pemilu. Apakah faktor-faktor atau aspek yang mempengaruhi seseorang untuk ikut memilih dan membuat suara partai, apakah seseorang secara konsisten (tetap) memilih sebuah partai atau seseorang telah merubah pilihan partai kepada

partai yang lain karena sebab-sebab tertentu pada saat pemilu berlangsung.

Dalam konteks kajian pemilihan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang memilih antara lain ialah faktor-faktor sosiologi, psikologi dan ekonomi (Kristiadi 1996:76). Perilaku seseorang memilih secara umum terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut, ia menentukan sikap dan persepsi untuk ikut memilih. Misalnya seseorang memilih partai tertentu karena dorongan faktor psikologi dan sosiologi. Seseorang telah mengalami pengalaman hidup yang panjang di dalam pergaulan sosial, sikap politiknya dapat terbentuk karena pengaruh praktik politik keluarganya dan lingkungan tempat tinggal, termasuk juga pengaruh dari pergaulan dengan teman yang terlibat berpolitik. Seseorang juga terpengaruh memilih sebuah partai apabila mengharapkan keuntungan ekonomi dan ada pula karena pengaruh tokoh calon bertanding yang populer. Selain itu, pengaruh penyebaran informasi politik yang meluas melalui media masa terutama di kalangan masyarakat kota telah merubah persepsi dan pola berpikir masyarakat ke arah yang kritisal mengamalkan demokrasi yang sebenarnya sebagaimana yang berlaku di negara-negara maju.

Dari perbincangan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perilaku politik adalah perbuatan seseorang dalam suasana pemilu dan merupakan bagian lain dari bentuk partisipasi politik ini secara keseluruhan akan menciptakan pola pemilihan partai. Manakala memilih dalam pemilu ialah pemilihan sesuatu partai atau calon pemimpin kerajaan yang dikehendaki memilih.

Menurut Miriam (1982:1) bahwa perilaku politik mencakup aktivitas menentukan pilihan pemilu, menghadiri perhimpunan awam, menjadi anggota partai politik, mengadakan hubungan pribadi dengan orang-orang lain mengenai seluk beluk politik bersama-sama dengan pihak elit pemerintah, elit politik, dan sebagainya.

Penelitian mengenai perilaku memilih (*voting behavior*) pertama kali sebagaimana dibicarakan tadi dilakukan oleh para

peneliti dari Universitas Columbia, yang lalu dikenal dengan sebutan *mazhab Columbia* atau *Columbia School*. Menurut model Columbia ini, perilaku memilih ditentukan oleh status sosial ekonomi (SSE), agama, dan daerah tempat tinggal. Jadi, jika seseorang berada di SSE tertentu, berarti ia memilih parpol tertentu. Jika ia beragama tertentu, ia akan memilih parpol tertentu. Dan, jika ia tinggal di daerah tertentu, ia maka akan memilih parpol tertentu. Mazhab ini juga dikenal dengan nama pendekatan sosiologis atau sosial struktural (Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; & Roth, 2008).

Setelah pendekatan sosiologis, kemudian muncul pendekatan sosial psikologis yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Michigan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan pada faktor kelompok sosial di mana individu berada (sosiologis), pada pendekatan sosial psikologis penekanan lebih pada individu itu sendiri. Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai, orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat. Identifikasi partai yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar partai apa yang dipilih tetapi juga tingkat identifikasi individu terhadap partai tersebut misalnya, lemah hingga kuat. Lalu, yang dimaksud dengan orientasi isu atau tema adalah tema atau isu-isu apa saja yang diangkat oleh parpol tersebut. Sedangkan, yang dimaksud orientasi kandidat adalah siapa yang mewakili parpol tersebut. Menurut pendekatan sosial psikologis, tiga faktor itulah (identifikasi partai, orientasi tema dan orientasi kandidat) yang akan menentukan perilaku memilih (Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; & Roth, 2008). Lalu, setelah pendekatan sosial psikologis, muncul pendekatan Baru yang dinamakan dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis biasa juga disebut dengan pendekatan *rational-choice*.

Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada.

Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya (Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; & Roth, 2008). Berhubungan dengan pemilu, melalui pendekatan ini, pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap parpol yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu, dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya.

Namun pada kenyataannya, ketika mengambil keputusan, individu jarang sekali melakukan hal-hal yang diasumsikan oleh pendekatan ekonomis. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa, biasanya individu tidak mengetahui setiap alternatif yang ada dan juga tidak mempertimbangkan setiap hasil yang mungkin muncul dari setiap alternatif. Oleh karena itu, setelah pendekatan ekonomis, muncul lagi pendekatan Baru dalam melihat perilaku memilih. Pendekatan tersebut adalah pendekatan *behavioral decision theory* (BDT), Lau (2003) & Redlawsk (2006).

Pendekatan *behavioral decision theory* (BDT) mengasumsikan bahwa individu sebagai *limited information processors*. Pendekatan ini menganggap bahwa jumlah informasi yang dapat diolah oleh individu sangat terbatas. Keterbatasan individu dalam memproses jumlah informasi, biasa juga disebut *bounded rationality*. Menurut pendekatan ini, sebagai makhluk rasional kognisi individu masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut di antaranya adalah keterbatasan dalam menyimpan jumlah informasi, keterbatasan dalam mengolah informasi dan keterbatasan dalam memanggil kembali informasi yang telah diolah (Lau, 2003; Lau & Redlawsk, 2006).

Meskipun sebenarnya individu tidak bisa melakukan pengambilan keputusan yang benar-benar rasional, seperti yang diasumsikan oleh pendekatan ekonomis, di tengah-tengah keterbatasannya tiap-tiap individu masih bisa membuat keputusan yang baik. Hal tersebut dimungkinkan karena individu

mengembangkan sejumlah mekanisme kognitif untuk mengatasi keterbatasannya itu.

Terkait dengan pemilu, ada tiga mekanisme kognitif yang biasanya digunakan oleh individu, yaitu *decomposition*, *editing* dan *heuristics* Lau (2003) & Redlawsk (2006). *Decomposition* berarti individu memecah keputusannya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Mekanisme ini biasanya lebih dilakukan oleh para kandidat atau parpol yang sedang bertarung di pemilu. Misalnya, para kandidat membagi strategi kampanyenya menjadi beberapa bagian. Ada yang khusus iklan di televisi, ada yang khusus di radio, ada yang khusus penampilan, dan seterusnya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *editing* berarti, ketika individu menyederhanakan pengambilan keputusannya dengan menghilangkan atau menghiraukan aspek-aspek relevan yang berhubungan dengan keputusannya tersebut. Misalnya dengan hanya memperhatikan satu kandidat saja dan menghiraukan kandidat yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *heuristics* adalah jalan pintas kognitif (*cognitive shortcuts*) yang dilakukan oleh individu untuk membuat keputusan atau penilaian tertentu, yang biasanya didasarkan pada *rules of thumb*. Baron, Branscombe dan Byrne (2008) menjelaskan bahwa *heuristics* adalah cara mudah untuk mencapai keputusan yang kompleks atau membuat kesimpulan, dalam waktu yang singkat dan efisien. Bless, Fiedler, dan Strack (2004) juga menyebutkan bahwa untuk mengatasi kompleksitas, individu mengembangkan strategi tambahan yang memungkinkan mereka untuk mempermudah pengambilan-keputusan dengan berpegang pada *rules of thumb*, dan proses itu disebut *heuristics*.

Hamilton (2005) menyebutkan bahwa *heuristics* biasa digunakan dalam membuat keputusan dan dapat meringankan beban yang dialami oleh kognisi individu, tidak hanya membantu individu dalam kehidupan sehari-hari, *heuristics* juga dapat digunakan individu dalam kehidupan politik. Ottati (1990) menemukan bahwa *heuristics* bisa juga digunakan saat membuat keputusan politik. Hal ini juga disebutkan oleh Mondak (1994)

bahwa dengan menggunakan *heuristics* dapat membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diakibatkan terbatasnya pengetahuan tentang politik.

Ada lima jenis *heuristics* yang bisa digunakan individu untuk membantu dirinya dalam mengambil keputusan dalam politik, khususnya pada saat pemilu (perilaku memilih). Menurut Lau (2003) & Redlawsk, (2006), lima jenis *heuristics* tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. *Affect referral*: individu akan memilih kandidat yang paling menarik secara emosional atau yang lebih disukainya (emosional).
2. *Endorsement*: individu akan memilih kandidat berdasarkan hasil rekomendasi dari kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, ataupun kelompok-kelompok sosial yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, individu membiarkan orang lain di luar dirinya yang memutuskan pilihannya.
3. *Familiarity*: individu memilih kandidat yang telah dikenal atau yang telah diketahui sebelumnya.
4. *Habit*: individu memilih kandidat berdasarkan pilihan pada pemilu sebelumnya dan tetap pada pilihannya itu.
5. *Viability*: individu memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih besar.

D. Kajian Relevan

Kajian relevan yang pernah dibuat oleh Lipset (1960:62) mendapati keterkaitan agama yang dianut seseorang sangat berpengaruh terhadap bentuk pemilihan. Di Amerika Serikat penganut agama Katolik dan kaum Yahudi, penduduk berkulit hitam dan keturunan Latin (*Hispanic*) adalah di antara pendukung yang amat setia partai *Demokrat*. Manakala penganut agama Protestan *Anglo Saxon* pula adalah pemilih yang sangat fanatik terhadap partai *Republik*.

Kajian Lipset juga memastikan faktor-faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pola perilaku pemilih di Eropah (1981). Penduduk yang berpendapatan rendah seperti para buruh lebih

condong memilih partai *Sosialis* dan *Komunis* dan kelompok yang berpendapatan sederhana dan tinggi memilih partai *Konservatif*. Manakala kajian yang dibuat oleh Milbrath memastikan hasil yang tidak terlalu berbeda dengan kajian Lipset yaitu kumpulan masyarakat rendah lebih suka memilih partai *Liberal* dan kelompok tinggi memilih partai *Konservatif*.

Kajian yang dibuat oleh Lipset tersebut di Amerika Serikat dan beberapa buah negara di Eropah Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia, dan Finlandia telah menemukan pola yang sama. Di negara-negara berkenaan, keadaan status sosial ekonomi tinggi dan ciri-ciri penduduk tertentu di kota lebih banyak memilih dibanding orang desa. Kumpulan pemilih berumur 35 dan 55 tahun lebih banyak memilih dibanding kumpulan umur di bawah 35 tahun atau yang berumur di atas 55 tahun.

Manakala laki-laki lebih banyak memilih dibanding yang perempuan, mereka yang sudah kawin lebih banyak memilih dibanding yang tidak kawin, begitu juga dengan kelompok yang berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi dan berstatus sosial tinggi didapati juga telah melibatkan diri dalam politik dengan aktif dibanding dengan mereka yang berpendidikan dan berpendapatan rendah. Rumusan kajian tersebut ditunjukkan Tabel berikut.

Tabel 1
Pengaruh Sosial Ekonomi dan Tingkat Partisipasi Politik

Status Sosial Ekonomi	Partisipasi tinggi	Partisipasi rendah
Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Rendah
Pekerjaan	Pengusaha	Buruh Rendah
Ras	Kulit Putih	Kulit Hitam
Jebis kelamin	Laki-laki	Perempuan
Umur	Dewasa	Muda (<35 Tahun)
Tempat tinggal	Penduduk Lama	Penduduk Baru
Situasi	Situasi Krisis	Situasi Normal
Status	Kawin	Belum kawin
Organisasi	Anggota Organisasi	Bukan Anggota Organisasi

Sumber : Seymour Martin Lipset (1960: 84)

Kajian yang dibuat oleh Almond dan Sidney Verba (1965:160) mendapati bahwa orang Amerika kurang menggalakkan partisipasi politik dalam pemilu dibanding orang di Eropah Barat, tapi mereka lebih bersemangat untuk berpartisipasi untuk mengupayakan jalan yang terbaik untuk menghilangkan sesuatu hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakatnya. Namun, mereka sangat aktif menjadi anggota organisasi misalnya bidang politik, pengusaha, profesional, petani, dan sebagainya.

Di Jepang berdasarkan kajian pemilu yang dibuat Ikuo Kabashima dan Steven R.Reed (2001) mendapati bahwa pola perilaku memilih masyarakat Jepang berhubung dengan identifikasi partai seperti 75 persen memilih partai *Liberal Democratic Party (LDP)*. Artinya, masyarakat Jepang memilih berdasarkan kepada tokoh partai mereka yang bertanding pada pemilu di negara tersebut. Walaupun masyarakat Jepang ingin perubahan kekuasaan pemerintahan selain *LDP* tetapi partai oposisi seperti *JSP (Japan Socialist Party)* sukar mencapainya terutama setelah tahun 1980-an partai *JSP* senantiasa mendapat hasil pemilihan merosot. Namun partai yang Baru didirikan seperti *Democratic Socialis Party (DSP)* dan *Clean Government Party (CGP)* pada pemilu 1993 kalah memenangi mayoritas di parlemen karena partai-partai tersebut hanya bertanding pada kawasan-kawasan tertentu saja.

Manakala di negara-negara komunis, pemilih pemilu selalu mencapai jumlah yang tinggi yaitu 99 persen sebagaimana dicatat dibekas negara Soviet Union. Sistem pemilihan di negara berkenaan amat berbeda dibanding di negara demokrasi, karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang dipertandingkan. Calon yang dinamakan adalah ditetapkan oleh partai komunis yang menjadi kuasa negara dan masyarakat banyak-banyak memilihnya. Oleh karena itu, masyarakat di negara komunis tidak punya suara partai yang lain dan mereka hanya memilih partai tunggal.

Kajian partisipasi politik dan pemilu di negara yang sedang membangun seperti di Taiwan, mendapati tidak ada perubahan pola memilih mayoritas kepada partai pemerintah ialah *KMT (Koumintang)*. Setelah diadakan pemilihan demokrasi sejak tahun 1990-an telah disertai banyak partai seperti pada tahun 1995 dan 1998 masyarakat mendapat kebebasan memilih, mendirikan partai-partai politik serta media masa yang bebas (*Gatra: 1998*). Tetapi partai *Koumintang* yang berkuasa selama 40 tahun tetap saja menang mayoritas setiap pemilu dan sampai ke hari ini partai tersebut mentadbir kerajaan. Hal tersebut karena masyarakat sangat percaya terhadap pentadbiran rezim berkuasa tersebut.

Partai *Koumintang* yang dikenal sebagai tulang punggung pemerintah Taiwan dan pemilih (masyarakat) menganggap inilah partai terbaik karena mampu mengatasi krisis ekonomi negara. Selain itu, para pemimpin negara dianggap bijak dan berwibawa. Partai *KMT (Koumintang)* juga mayoritas menang di parlemen secara terus menerus dalam pemilu dan tokoh partai menang pertandingan pemilihan Gubernur (1994), Presiden Taiwan (1996). Manakala partai oposisi *DPP (Democratic Progressive Party)* dan partai *CNP (Chenese New Party)* tidak mendapat mayoritas kursi parlemen pada pemilu tahun 1995 dan 1998 (*Electoral Studies 2000: 19*).

Di Kamboja partai *National United Front for Independent Neutral Peaceful and Co-operative Cambodia (Funcinpec)* dipimpin oleh Putera Ranaridh ialah anak Raja Sihanouk. Partai tersebut mayoritas menang karena berhubung kepopuleran dan wibawa raja Sihanouk di kalangan masyarakat jelata (tabel 2). Tetapi partai *Funcinpec* pada pemilu (1993) mendapat persaingan dari partai *Cambodian People's Party (CCP)* dipimpin Hun Sen yang berpahamkan komunis.

Tabel 2
Komposisi Pembagian Kursi Parlemen
Pemilu 1995 dan 1998 di Taiwan

Partai	Desember 1995		Desember 1998	
	Kursi	Persen	Kursi	Persen
<i>KMT</i>	83	49.4	90	53.6
<i>DPP</i>	54	32.1	52	30.9
<i>CNP</i>	21	12.5	7	4.16

Sumber: *Electoral Studies* 2000 : 19

Partai *Funcipec* menang 58 dari 120 kursi parlemen Kamboja. Manakala partai *CCP* (51) dan *Buddhist Liberal Democratic Party (BLDP)* 10 kursi. Para pemimpin partai tersebut khawatir terjadi perpecahan di kalangan masyarakat Kamboja dan setelah pemilu tahun 1993 mencanangkan mendirikan kerajaan campuran (*Electrolal Studies* 2000:19). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perang saudara yang senantiasa terjadi di Kamboja. Maka, sejak tahun 1993 kerajaan dipimpin oleh dua orang tokoh politik yaitu Putera Norodom Ranaridh (*Funcipec*) sebagai Perdana Menteri I dan Hun Sen (*CCP*) sebagai Perdana Menteri II. Kerajaan tersebut dapat diperintah oleh kedua partai sampai tahun 1996. Tetapi pada tahun 1997 terjadi perpecahan antara pendukung partai *Funcipec* dan *CCP* yang mengakibatkan bentrokan sengit dan pendukung partai *Funcipec* mengalami kekalahan, pemimpin partai Norodom Ranaridh melarikan diri ke luar negara. Ia kembali pulang tahun 1998 atas tekanan negara-negara di dunia kepada pemimpin *CCP* dan pemilu Kamboja dapat diadakan kembali tahun 1998.

Pemilihan tersebut disertai oleh 5,401.280 pemilih terdaftar dan 42 partai bertanding. Partai *Funcipec* hanyalah mayoritas menang di Phnom Penh dan tiga kawasan luar kota. Manakala partai *CCP* umumnya mayoritas memenangkan kawasan-kawasan parlemen Kamboja. Partai *Funcipec* dalam pemilu 1998 pemenang kedua dan partai *Sam Rainsy's* bagi peringkat ketiga. Walaupun pemilu 1998 dianggap jujur dan adil tetapi banyak pemerhati

mencatatkan bahwa partai CCP curang karena banyak kesan pemaksaan memilih partai tersebut. Maka banyak pemilih di Kamboja takut dan sangat tertekan mereka terpaksa memilih CCP. Selain itu partai berhaluan komunis tersebut juga menguasai media masa Kamboja. Media masa di Kamboja telah memihak dan menyuarakan kepentingan-kepentingan CCP.

Namun setelah pemilu tersebut kerajaan Kamboja terhindar dari perpecahan karena adanya kewibawaan Raja Norodom Sihanouk, ia dapat menyatukan para pemimpin partai yang selama ini saling bermusuhan dalam idiologi politik dan mendapat pembagian kekuasaan untuk memimpin negara. Maka terpilihlah Hun Sen sebagai Perdana Menteri dan putera Ranaridh sebagai Ketua Parlemen Kamboja. Manakala pemimpin partai lain ada pula yang dilantik sebagai Menteri-menteri Kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen.

Di Papua Nugini kajian yang dibuat oleh David Hagerty (1997) mendapati pola pemilihan ditumpukan kepada tokoh bertanding. Menurut David (*Jurnal Ilmu Politik*: 1998) bahwa pemilih lebih tertarik kepada seseorang tokoh populer dibanding partainya, masyarakat memilih tokoh dari kalangan kaum mereka atau tokoh yang ada di desa/kota yang kebanyakan korporat, orang kaya, orang berpendidikan tinggi dan sebagainya.

Namun kajian dibuat Bhakti di Papua Nugini (1993) sejak tahun 1990-an perubahan ke arah pemilihan partai lain mulai terjadi, tapi usia kerajaan sangat pendek karena persatuan partai pemerintah amat lemah, sehingga senantiasa terjadi perselisihan untuk menjatuhkan pemimpin dan Perdana Menteri sering bertukar Perdana Menteri Somore (1980-1982), Wingti (1985-1988) dan Namiliu (1988-1992).

Di Asia Tenggara kajian pernah dibuat di Malaysia tahun 1990-an oleh Afitra Salamm (*Jurnal Ilmu Politik* 1993: 103). Kajian tersebut mendapati pola pemilu di Malaysia senantiasa terkait dengan isu yang bercorak kaum dan agama seperti di kalangan orang Melayu, Cina, dan India. Orang Melayu memilih *Barisan Nasional* karena mereka menjadi anggota partai UMNO (*United*

Malays National Organisation) dan partai tersebut menjadi komponen terbesar *Barisan Nasional*. Hal demikian juga dilakukan oleh orang-orang Cina dan India dari partai MCA (*Malaysian Chinese Association*) dan partai MIC (*Malaysian Indian Congress*) di mana kedua-dua partai bercorak kaum Cina dan India. Kedua partai tersebut juga menjadi komponen *Barisan Nasional* (*Commonwealth Comparative Politics*: Mac 2001, 54).

Ketiga partai besar tersebut bekerjasama dalam komponen perikatan sejak tahun 1955 dan sejak tahun 1974 menggunakan nama *Barisan Nasional*. Partai komponen tersebut sejak pemilihan 1952 sampai saat ini adalah mayoritas memiliki kursi di parlemen karena dipilih secara mayoritas oleh ketiga kaum tersebut. Namun terdapat di Malaysia, partai yang semata-mata mementingkan perjuangan untuk satu kumpulan kaum/agama dan menang mayoritas pada peringkat negeri. Misalnya partai Melayu (Islam) PAS (*Partai Islam Se-Malaysia*) menang mayoritas dan berjaya menguasai kerajaan negeri di Kelantan dan Terengganu (1999). Pemilih di kawasan tersebut sangat terpengaruh oleh faktor perkauman dan agama Islam serta tokoh politik yang populer memimpin partai seperti Tuan Guru Datok Nik Azis Nik Mat di Kelantan dan Abdul Hadi Awang di Terengganu.

Di Indonesia, pola pemilu semasa rezim *Orde Baru* umumnya mayoritas dimenangkan partai *Golkar* karena berlaku faktor pengerahan (mobiliasi) oleh pihak berkuasa (rezim Soeharto), banyak di antara pemilih menerima tekanan amat kuat dari pemerintah untuk memilih partai *Golkar* (Sundhaussen 1996:10). Para pemilih dipaksa oleh tokoh-tokoh yang tertentu memilih partai *Golkar* sehingga partai tersebut menang mayoritas setiap pemilu berlangsung sejak tahun 1971 sampai 1997. Selain itu, orang-orang memilih *Golkar* karena takut dituduh sebagai bekas anggota partai terlarang PKI (*Partai Komunis Indonesia*) yaitu partai yang pernah melakukan usaha rampas kuasa yang gagal tahun 1965, seluruh bekas anggota partai PKI banyak yang ditangkap dan tidak dibenarkan ikut memilih, maka pemilih yang

bukan partai tersebut juga takut dianggap anggota partai terlarang dan mereka banyak memilih partai *Golkar*.

Para pemilih pemilu banyak mendapat tekanan rezim berkuasa dalam bentuk ancaman (Asfar 1996:54). Seseorang yang diduga tidak memilih partai *Golkar* maka ia menghadapi masalah untuk mendapatkan tanda pengenalan. Bagi kaki tangan pemerintah yang memasuki partai oposisi diberi teguran dan umumnya mereka sukar mendapat kedudukan pada jajaran pimpinan di suatu jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, kaki tangan pemerintah atau orang-orang yang ingin hidup tentram, aman menjalankan pekerjaan terpaksa memilih partai pemerintah tersebut.

Namun pada beberapa kawasan negeri tertentu yang banyak penganut agama Islam para pemilih ada yang tidak menghiraukan tekanan dari rezim berkuasa, mereka memilih partai Islam *PPP* (*Partai Persatuan Pembangunan*) seperti di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Kajian yang pernah dibuat oleh Taqwa (1996:36), pemilu tahun 1971, 1977 dan 1982 di Lekkong Sulawesi Selatan mayoritas memilih *PPP* karena pemilih menuruti elit-elit politik dan ulama Islam tempatan. Pada pemilu 1987, 1992 dan 1997 pemilih tempatan tersebut kebanyakan pindah memilih *Golkar* karena mendapat tekanan yang amat kuat pihak pemerintah. Para elit dan tokoh agama dipaksa pindah memilih partai *Golkar* dan pemilih lain turut pula menyertai merubah pilihannya dan *PPP* kalah di daerah tersebut.

Manakala di kota Bukittinggi Sumatera Barat keadaan demikian juga terjadi, pemilu 1971, 1977 dan 1982 partai pemerintah tersebut mendapat perlawanan yang sengit daripada *PPP* yang berhasil menang mayoritas. Pemilih beragama Islam umumnya memilih *PPP*. Manakala pemilu 1987, 1992 dan 1997 berubah memilih partai *Golkar*. Banyak di antara golongan elit dan tokoh ulama yang dipaksa pemerintah menjadi anggota *Golkar* sehingga partai *PPP* mengalami kekalahan telak. Partai *PDI* pula sejak pemilu tahun 1971 tidak pernah menang di kota tersebut

karena asas partai tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Partai *PDI* berasas kebangsaan dan dahulu lagi ditubuhkan oleh bekas anggota-anggota partai Kristian (*Partai Kristian Indonesia* dan *Partai Katolik*) dan partai *PNI*.

Tetapi pada pemilu 1999 berlangsung pada masa Indonesia melaksanakan demokrasi yang dicita-citakan setelah pergantian rezim Soeharto kepada era *Reformasi*. Sebanyak 48 partai bertanding dan orang bebas mendirikan partai politik atau dicalonkan menjadi wakil masyarakat bersama-sama pada peringkat negeri (kota/kabupaten) maupun anggota parlemen. Media masa telah bebas menyampaikan informasi politik bagi masyarakat sangat lancar melalui media masa elektronik, internet, dan cetak.

Fenomena Reformasi atau era pembaharuan telah merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam politik. Masyarakat telah peka dengan perkembangan politik terkini di negara-negara yang mengamalkan demokrasi dan masyarakat akan memilih sesuatu partai berdasarkan kepada hak dan kebebasan mereka menjalankan demokrasi. Maka suasana demikian ada di Indonesia terutama sejak tahun 1998. Pemilu 1999 berlangsung dalam keadaan aman dan masyarakat tidak takut atau tidak mendapat tekanan dari pemerintah yang berkuasa memilih partai tertentu sebagaimana berlaku di masa rezim Soeharto berkuasa.

Di kota Bukittinggi saat itu suasana pemilih adalah bebas tanpa ada paksaan dari pemerintah mereka memilih partai yang menjadi suara mereka. Hasil pemilihan mendapati *Partai Amanat Nasional (PAN)*, *Golkar*, *PPP*, *PDI-P* dan partai lain adalah antara suara pemilih. Khususnya partai *PAN*, *PPP* dan *PBB* serta *PK* adalah berasaskan kepada agama Islam dan pemimpin partai adalah dari kalangan tokoh Islam. Oleh karena itu, diperkirakan pemilih *Golkar* berubah memilih partai yang lain tersebut. Menurut Liddle dan Mujani dalam *Gamma* (2001:2) bahwa secara keseluruhan perubahan perilaku pemilih partai tertentu pada pemilu 1999 di Indonesia disumbangkan oleh pemilih yang terpengaruh oleh para tokoh partai populer yang bertanding

untuk jabatan calon presiden seperti Prof. Dr. Burchanuddin Jusuf Habibie (*Golkar*), Megawati (*PDI-P*), Amien Rais (*PAN*), Gus Dur (*PKB*), Hamzah Haz (*PPP*) dan Yusril Ihza Mahendra (*PBB*). Manakala program atau manifesto politik tidak banyak dirasakan pemilih, maka faktor tokoh populer antara yang berkait dengan corak memilih dalam pemilu 1999 di Indonesia.

Perkembangan media masa dan teknologi informasi pada era globalisasi telah menciptakan perhubungan yang lancar dan pesat di antara penduduk. Seiring dengan hal tersebut, pengetahuan dan perkembangan demokrasi turut pesat terutama di negara-negara yang sedang membangun. Informasi demokrasi berlaku di negara maju dikabarkan media masa ke seluruh penjuru dunia termasuk kepada penduduk negara yang sedang membangun. Penyampaian tersebut membangkitkan pendidikan dan kesadaran politik dan kepekaan masyarakat terhadap partisipasi politik dan perubahan corak pemilihan pemilu. Sosialisasi politik, kampanye pemilihan yang disiarkan oleh media masa telah menumbuhkan persepsi dan sikap yang matang pemilih.

E. Rangkuman

Di Indonesia, perkembangan ke arah demokrasi bangkit setelah tahun 1990-an dengan pesat yang diperparah akibat krisis ekonomi dan rezim Soeharto yang otoriter. Walaupun pemilu berlangsung terus selama masa *Orde Baru* tapi dianggap tidak adil. Pemilih pemilu merasa ditekan dan dipaksa oleh pihak berkuasa. Masyarakat menginginkan adanya demokrasi dan mengganti pemimpin yang sudah lama memerintah. Soeharto akhirnya dapat ditumbangkan 21 Mei 1998 dan era *Orde Reformasi* pun lahir di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, sebanyak delapan kali pemilu dilangsungkan di dalam tiga rezim berkuasa yaitu *Orde Lama*, *Orde Baru* dan *Orde Reformasi*. Di antara yang terpenting difokuskan dalam kajian ini adalah pemilu era *Orde Baru* dan *Reformasi*. Ini dijadikan bahasan karena terdapat perubahan besar

di mana *Partai Golkar* yang berkuasa selama era *Orde Baru* telah tumbang oleh partai yang lain dalam pemilu. Pemilu 1999 dimenangkan partai oposisi yaitu *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* (PDI-P) dan menjadi pemenang mayoritas mengalahkan partai *Golkar*. Diperkirakan terdapat paradigma perubahan pola pemilihan di antara kedua masa pemilu 1997 dan 1999. Perubahan dimaksud karena faktor-faktor dalam dan luar. Faktor dalam adalah sosiologi, psikologi dan faktor luar adalah ekonomi, penyampaian informasi dari media masa, suasana euforia reformasi. Untuk menyelidiki pola perilaku pemilih terdapat tiga pendekatan yaitu, Sosiologi, Psikologi dan Ekonomi atau Rasional. Untuk mengkaji perilaku pemilih di Indonesia kajian mencoba memadukan ketiga pendekatan tersebut.

Diketahui pula, beberapa konsep mengenai partisipasi politik dan pola pemilu di negara maju dan negara yang sedang membangun. Konsep-konsep ini sangat penting terutama untuk menganalisis sampai sejauhmana pola pemilu telah berlaku di dalam masyarakat Indonesia dalam dua tempo masa *Orde Baru* dan *Orde Reformasi* untuk itu sebuah studi kasus telah dilakukan di kota Bukittinggi.

Adalah cukup penting bagi pimpinan negara, partai politik memahami konsep partisipasi politik dan pola-pola pemilihan pemilu guna dijadikan pengetahuan untuk membangun demokrasi sesungguhnya, terlebih-lebih di era reformasi Indonesia. Di antara konsep-konsep tersebut tentu ada yang relevan untuk menciptakan demokrasi baru di Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, bab ini telah berusaha memaparkan ide dan konsep partisipasi politik dan perilaku pemilih pemilu. Untuk mengkaji isu yang dibicarakan tadi, kajian difokuskan untuk studi kasus di kota Bukittinggi Sumatera Barat. Walaupun kota Bukittinggi belum bisa mewakili keadaan sebenarnya situasi yang diinginkan kajian ini, tetapi minimal dapat menggambarkan setidaknya perubahan pola partisipasi politik maupun pola perilaku pemilih pemilu kita ketika itu.

BAB III

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DARI MASA KE MASA

Ada dua era perkembangan partai-partai politik di Indonesia yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang dan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Topik yang difokuskan pada perkembangan partai dan rezim-rezim yang berkuasa sampai saat ini.

Perbincangan dari aspek sejarah perkembangan partai politik dan pemilu dibagi kepada empat bagian; yaitu *pertama* awal organisasi partai politik zaman kolonial Belanda dan Jepang, *kedua* partai politik dan pemilu setelah kemerdekaan (17 Agustus 1945). *Ketiga*, partai politik di masa Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba) dan masa *Reformasi* Indonesia. Perodesasi masa penjajahan pertumbuhan partai politik lebih bertujuan kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Partai politik lebih banyak bertujuan untuk menyatukan tekad dan perjuangan melawan Belanda. Oleh karena itu peranan partai politik belum ada pada lembaga pemerintahan sebagaimana di negara yang telah merdeka. Sedangkan masa kemerdekaan Indonesia partai politik yang didirikan sejak masa kolonial baru ditujukan untuk pemerintahan negara. Hal tersebut muncul terutama sebelum tahun 1955 di mana puluhan partai politik telah mengikuti pemilu.

Sejak merdeka sampai saat ini, Indonesia telah dipimpin oleh enam orang presiden yaitu, Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masa jabatan sampai 2014. Indonesia telah dipimpin oleh beberapa rezim yang berbeda dan melaksanakan sistim demokrasi yang berbeda-beda pula yaitu; *pertama* Demokrasi Berparlemen atau *Liberal* (1950-1959), di mana

semua partai politik berpeluang dengan bebas memenangkan kursi pemilu untuk duduk pada pemerintahan negara, seperti praktik demokrasi di barat. *Kedua*, demokrasi *terpimpin* (1959-1966), adalah sistim ciptaan Presiden Soekarno di mana kekuasaan tertinggi pada kuasa Presiden dan fungsi partai politik dikawal sepenuhnya oleh presiden (Alfian 1977:11). Demokrasi *Pancasila* (1966-1998) yaitu demokrasi yang didasarkan kepada dasar negara (*Pancasila*) yang mengutamakan praktik musyawarah antara pemerintah dan partai. Partai-partai tidak bebas seperti lazimnya demokrasi liberal, tetapi dijadikan “teman” pemerintah. Maka, partai politik dianggap oleh rezim berkuasa sebagai alat legitimasi kepada dunia dan bangsa lain bahwa Indonesia telah menjalankan demokrasi yang benar. Sistem tersebut dibuat rezim Presiden Soeharto (Hara 1993:46). Rezim Soeharto mayoritas dikuasai oleh militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI (Lidle 2000:54). *Ketiga*, melaksanakan demokrasi *moderen* atau *liberal* sejak tahun 1998 yaitu setelah Presiden Soeharto ditumbangkan oleh gerakan pembaruan dikenal sebagai *Reformasi* Indonesia.

Pembaruan demokrasi pada masa *reformasi* tersebut mulai digerakkan oleh Presiden Burchanuddin Yusuf Habibie yang menggantikan Soeharto. Setelah dilantik waktu itu langsung mendapat tekanan yang kuat dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mendesak untuk mempercepat pemilu (1999). Rezim Habibie dan parlemen dituduh adalah tidak sah karena hanya penerus rezim lama (Soeharto).

Habibie bersama *Majelis Permusyawaratan Rakyat* (MPR) akhirnya telah mengamandemen Undang-undang sistem pemilu dan institusi parlemen di Indonesia yaitu dengan sistem demokrasi yang membolehkan setiap orang atau kelompok mendirikan partai politik. Maka sejak itu ditandai sebagai awal pelaksanaan sistem demokrasi liberal seperti yang pernah berlaku pada pemilu 1955.

A. Partai dan Ormas Sebelum Merdeka

Ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda banyak para tokoh dan cendekiawan mendirikan organisasi dan partai politik, umumnya visi politik yang mengemuka ketika itu semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, organisasi partai-partai politik diutamakan untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Organisasi atau organisasi politik yang pertama berdiri di Indonesia pada 20 Mei 1908 adalah *Budi Utomo* di Jakarta, didirikan oleh Dr. Sutomo dan rekan-rekan. Pada saat itu Indonesia masih dikuasai oleh kerajaan Hindia Belanda.

Organisasi *Budi Utomo* didirikan berdasarkan dorongan oleh pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo akibat perkembangan politik yang berlaku pesat di antara bangsa sesama negara yang telah merdeka atau yang masih dijajah. Tujuan mendirikan organisasi tersebut untuk memajukan kecerdasan bangsa Indonesia yang terjajah oleh Belanda.

Perhimpunan bumiputera *Budi Utomo* didirikan dalam suasana rakyat yang masih tertindas oleh kolonial dan banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dan tahap pendidikan yang rendah. Keadaan demikian menyebabkan pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran *Stovia* Jakarta bertekad mendirikan *Budi Utomo* diketuai oleh Dr. Sutomo. Gerakan awalnya semata-mata untuk mengumpulkan para pelajar anggota *studieclub* dalam bentuk kelompok sosial ekonomi dan pendidikan, yang pada akhirnya terus berkembang menjadi cikalbakal partai-partai politik di Indonesia. Kongres pertama *Budi Utomo* diadakan di Jakarta pada 5 Oktober 1908, bertekad memajukan tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaan di kalangan rakyat yang masih dijajah oleh Belanda. Walaupun *Budi Utomo* mempunyai keanggotaan yang cukup banyak terutama di seluruh Jawa dan Madura, namun masih belum secara nyata terlibat dalam kegiatan politik.

Bagaimanapun, para cendekiawan pelajar *Stovia* banyak yang mendesak agar organisasi *Budi Utomo* dapat menjadi sebuah

partai politik, sebagian anggota yang lain berkehendak agar tetap menjalankan tujuan organisasi seperti pada awalnya berdiri. Maka terjadi silang pendapat di antaranya yang menimbulkan perpecahan di kalangan anggota *Budi Utomo*. Akibatnya ada anggota yang keluar dan bergabung ke organisasi lain dan mendirikan kelompok baru yaitu *Serikat Islam (SI)* dan *Indische Partajj*. Kedua organisasi inilah yang kemudian dapat dikatakan sebagai cikal bakal partai pertama yang lahir di Indonesia pada tahun 1912.

Organisasi *Budi Utomo* dengan tujuan mewujudkan kemajuan yang seimbang di antara pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri dan kebudayaan untuk rakyat. Dalam masa setahun, *Budi Utomo* mempunyai cabang sebanyak 40 buah dengan anggota 10.000 orang dari seluruh kawasan jajahan Belanda (khususnya di Indonesia). Keanggotaan *Budi Utomo* terdiri dari berbagai kaum yang menganut berbagai agama, adat dan bahasa. Sejarah awal organisasi *Budi Utomo* sekarang diperingati sebagai *Hari Kebangkitan Nasional*. Setiap tahun pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia itu setiap adanya peringatan hari kebangkitan nasional tujuannya untuk dapat dikenang dan memberikan semangat kepada generasi muda sekarang sebagai penerus cita-cita bangsa. Setelah organisasi *Budi Utomo* dan partai politik tersebut, kemudian banyak partai politik didirikan di seluruh wilayah Indonesia. Di antara partai-partai dan organisasi masa tersebut adalah berikut ini.

1. Serikat Islam

Organisasi Serikat Islam didirikan atas adanya ide yang disampaikan oleh seorang pedagang bernama Haji Samanhoe di dari kota Solo yang pernah mendirikan Syarikat Dagang Islam (*SDI*). Pada tahun 1912 Haji Omar Said Tjokroaminoto mengganti nama organisasi tersebut menjadi Syarikat Islam (*SI*) yang mulai mengadakan gerakan ke arah politik. *SI* didirikan berdasarkan kepada perjuangan untuk memperbaiki status sosial ekonomi, politik dan budaya bangsa Indonesia serta ke arah dasar ajaran

Islam. Organisasi *Serikat Islam* (SI) lahir pada awalnya disebabkan perpecahan diantara anggota-anggota *Budi Utomo*. Menurut Karim (1993:15), *Serikat Islam* menitikberatkan gerakan ke arah pembangunan ekonomi berdasar ajaran Islam dan politik yang bercorak revolusi dan nasional. Gerakan ini menitikberatkan kepada penghapusan pemerintahan kolonial Belanda dengan cara radikal (keras). *SI* pada awalnya dipelopori oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911, mayoritas anggotanya adalah anak bangsa. Dari segi perdagangan, *SI* berusaha untuk melawan kegiatan perdagangan orang Cina yang sangat berleluasa di Indonesia. Organisasi *SI* menurut Deliar Noer (1977: 18-39) merupakan kebangkitan anak bangsa untuk menunjukkan kebolehan kekuatan menghadapi orang-orang Cina yang dianggap menguasai perdagangan. Orang Cina juga dihalmangi agar tidak meneruskan penyebaran agama non Islam di kalangan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Anggota-anggota *Syarikat Islam* tersebut terdiri dari berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, petani, pedagang dan lain-lain yang mempunyai ideologi yang berbeda-beda misalnya yang berajarkan komunis, sosialis, dan Islam.

Situasi itu telah menyebabkan perpecahan serius (1923) yang melahirkan *SI merah* yang menjadi akar kelahiran *Partai Komunis*. Sedangkan yang lainnya, *SI Putih* mendirikan *Partai Syarikat Islam* (*PSI*) dan terakhir menjadi *Partai Syarikat Islam Indonesia* (*PSII*) pada tahun 1930. Pada tahun 1932 hingga 1936 *PSII* terpecah juga menjadi *Partai Islam Indonesia* (*PARLI*) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman dan *Partai Penyedar* yang didirikan Haji Agustus Salim. Sedangkan Sukarmadji Karto Suwirjo mendirikan pula *Komite Pembela Kebenaran PSII*.

Organisasi *SI* yang dipimpin oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto dan didaftarkan sebagai partai politik pada tahun 1912. Ia dianggap sebagai pendiri politik yang terbesar ketika itu dengan jumlah anggota sebanyak 3,000,000 orang. Bagaimanapun pihak Belanda berpandangan lain, organisasi *SI* dianggap musuh yang utama dan sangat berbahaya sebagai pengancam pemerin-

tahannya. Oleh karena itu Belanda tidak membenarkan organisasi tersebut ada.

Pihak *SI* tidak gentar dan bahkan membentuk tiga kelompok yang lebih besar yaitu, kelompok yang berdasar ke arah ajaran komunis dikenal sebagai *SI merah*, kelompok Islam radikal fanatik adalah *SI Putih*, dan kelompok *nasionalis*. *SI merah* kemudian telah mendirikan *Partai Komunis Indonesia* (1923). Sedangkan yang menganut ajaran Islam (putih) mendirikan *Partai Politik Islam Indonesia (Parli)* tahun 1932 dan *Partai Penyedar* yang didirikan pada tahun 1936 oleh Haji Agustus Salim. Sedangkan *SI* lama tetap kukuh sebagai organisasi yang *non-koperatif* (tidak mau bekerjasama) dengan kolonial Belanda.

2. Muhammadiyah

Organisasi atau kelompok ini dimasa kolonial yang bernama *Muhammadiyah*, yaitu organisasi yang bukan berbentuk partai politik namun anggotanya dapat berhubungan dengan partai politik Islam. *Muhammadiyah* bertujuan untuk mengembangkan pendidikan Islam yang modern untuk pembaruan terhadap ajaran agama bagi orang Islam dengan praktik yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad. Organisasi ini diketuai oleh KH. Achmad Dahlan, didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912 di Solo, Jawa Tengah.

Tujuan gerakan ini tidak mau terlibat di dalam pemerintahan, melainkan untuk mencegah praktik yang menyimpang dari Islam dan melakukan *Amar Makruf Nahi Munkar*. Oleh karena itu, *Muhammadiyah* sejak didirikan sampai hari ini tidak pernah menjadi partai politik. Ratusan sekolah sampai saat ini berhasil dibangun *Muhammadiyah* di seluruh Indonesia seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Universitas. Selain itu, organisasi Islam tersebut membangun rumah sakit, panti asuhan untuk anak yatim, orang tua dan sebagainya. Bagaimanapun, banyak di antara anggota-anggota *Muhammadiyah* diperbolehkan menjadi anggota atau tokoh partai politik secara individu, misalnya bekas Ketua Parlemen (Majelis

Permusyawaratan Rakyat) Indonesia Prof. Dr. Amien Rais adalah mantan Ketua Umum *Muhammadiyah* dan penggagas *Partai Amanat Nasional* (PAN) pada era *Reformasi* (1998). Sampai saat ini *Muhammadiyah* adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia selain *Nahdlatul Ulama* yang pernah dipimpin oleh Gus Dur mantan Presiden Indonesia.

3. *Indische Partaij*

Partai ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker atau namanya yang lain Setiabudi. Walaupun beliau berbangsa Belanda, namun Douwes Dekker bagaikan turut merasakan penderitaan penduduk bumi putra yang dijajah oleh Belanda. Tujuan organisasi *Indische Partaij* adalah agar Belanda keluar dari wilayah jajahannya (Indonesia) untuk menjadikan Indonesia merdeka. Pada awal tahun 1898, partai ini sudah didirikan dengan nama organisasi *Indische Bond* yaitu organisasi orang-orang Indonesia yang berasal dari keturunan Belanda.

Karena Partai ini sangat mendukung perjuangan rakyat sehingga tidak mendapatkan dukungan Belanda dan dianggap sebagai partai terlarang. Para anggotanya mencoba menukar nama Partai menjadi *Insulinde* dan seterusnya menjadi *National Ische Partaij* tetapi Belanda tetap melarang.

4. *Indische Sociaal Democratische Partaij (ISDP)*

Partai ini disingkat *ISDP* yang merupakan cabang partai yang berpusat di negeri Belanda didirikan bulan September 1917. *ISDP* sendiri berdiri pada bulan Juni 1919 di Indonesia. Walaupun partai bervisi ke arah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi partai ini tidak banyak pendukung dan akhirnya lenyap.

5. *Christelijke Ethische Partaij*

Partai berdasar kepada ajaran Kristen ini didirikan pada bulan September 1917 bertujuan untuk Indonesia yang tetap bersatu dan menjadi bagian dari pemerintahan Belanda. Partai ini tidak mendukung perjuangan rakyat untuk kemerdekaan

Indonesia. Oleh karena visi partai ini tidak mendapat dukungan orang banyak maka partai inipun lenyap.

6. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada bulan Mei 1914 Sneevelit, Branstender dan Bergsma orang yang berasal dari Belanda telah mendirikan *Indische Sosial Democratische Vereniging (ISDV)* di mana mereka mencoba memasukkan ajaran *Maxisme* ke dalam dasar partai. Pada 23 Mei 1920 *ISDV* bertukar nama menjadi *Partai Komunis Indonesia (PKI)*. Di antara anggota partai *ISDV* terdapat juga dari kalangan bumiputera, termasuk dua orang tokoh adalah Semaun dan Darsono. Keduanya dulu adalah mantan anggota *Serikat Islam* yang telah dikeluarkan karena sering bertengkar yang mengakibatkan terbelahnya organisasi *Syarikat Islam* menjadi *SI putih* dan *SI merah*.

Pada awalnya, seorang tokohnya bernama Tan Malaka menghimbau agar visi politik partai dan perjuangan harus sejalan dengan ajaran agama Islam, tetapi mendapat sanggahan dari kelompok anggota yang sudah dimasuki ajaran komunis. Setelah perhimpunan agung pertama *PKI* di Semarang, partai ini menyatakan sebagai bagian dari Partai Komunis Internasional dan menentang ajaran Islam. Pada tahun 1926 *PKI* melakukan pemberontakan yang dirancang oleh Sardjono, Budi Sutjitra dan Sugono. Kekacauan tersebut dibuat *PKI* di Jakarta, Jawa, dan Sumatera Barat. Belanda menyatakan *PKI* sebagai partai dilarang mulai 23 Maret 1928 (Karim 1993:29). Namun, pada bulan April 1935 gerakan komunis internasional mendatangkan Muso yaitu orang Indonesia yang telah lama berada di luar negeri untuk mendirikan *PKI* kembali namun gagal karena tetap dilarang Belanda. Bagaimanapun *PKI* didirikan lagi ketika Indonesia merdeka setelah 17 Agustus 1945.

7. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai ini didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927. Soekarno menyaksikan ketika itu semangat pergerakan

nasionalisme kian merosot di kalangan bangsa Indonesia terutama setelah kemunduran *Syarikat Islam*. Oleh karena itu, Soekarno berkeinginan untuk menyatukan komponen perjuangan nasional bagi kemerdekaan Indonesia. Visi perjuangan PNI adalah melenyapkan berbagai bentuk kuasa besar ekonomi atau kapitalisme dan kolonialisme. Partai PNI pada masa kemerdekaan adalah termasuk partai yang besar.

8. Partai Indonesia (Partaindo)

Partaindo didirikan pada tanggal 30 April 1931 dengan tujuan utama adalah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajahan Belanda. Partai ini didirikan oleh mantan anggota *Partai Nasional Indonesia* partai bersikap netral terhadap seluruh ajaran penganut berbagai agama. Pada tahun 1933 *Partai Indonesia* mempunyai cabang sebanyak 71 buah dengan anggota sebanyak 20.000 orang. Malangnya akibat perpecahan didalam partai, maka tahun 1936 partai ini dibubarkan.

9. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Partai ini didirikan di Jakarta 24 Maret 1937 oleh mantan anggota-anggota partai *Partaindo*. Visi Partai berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, memajukan tingkat sosial ekonomi dan politik di kalangan rakyat. Ketua partai adalah Drs. A.K. Gani dan wakilnya Mr. Sartono, masa sekarang partai ini tidak ada lagi.

10. Partai Rakyat Indonesia (PRI)

Agak berbeda dengan partai lain, *Partai Rakyat Indonesia* (PRI) bertujuan untuk meraih kemerdekaan dengan cara politik yaitu di parlemen. Upaya perjuangan mereka adalah mewujudkan kawasan otonomi yang bebas. Partai ini tidak begitu lama ada karena kurang mendapat perhatian dari rakyat sehingga dibubarkan tahun 1930 dengan cabang tercatat hanya sebanyak 2 buah di Indonesia.

11. Partai Indonesia Raya

Partai ini juga didirikan oleh Dr. Sutomo di Surabaya tahun 1931 mayoritas anggotanya adalah mantan kelompok pelajar Indonesia *Budi Utomo*. Visi partai adalah meningkatkan persatuan seluruh bangsa Indonesia, memperjuangkan hak berpolitik rakyat, mewujudkan sistim negara demokrasi dan memajukan tingkat sosial ekonomi rakyat.

Setelah organisasi partai-partai politik, maka pada tahun 1939 didirikanlah dua buah partai yang menganut dasar yang sama, misalnya partai berdasarkan nasional telah mendirikan *GAPI (Gabungan Partai Indonesia)* sedangkan yang berdasar ajaran agama Islam telah mendirikan *MIAI (Majelis Islamil a'lla Indonesia)*, kelompok ini seterusnya mendirikan gerakan bernama *KRI (Komite Rakyat Indonesia)* dan terakhir dirubah menjadi *MRI (Majelis Rakyat Indonesia)* tahun 1941. Walaupun *MRI* tidak lagi giat tetapi ia menjadi akar untuk sistim banyak partai setelah Indonesia merdeka.

B. Partai Politik pada Awal Kemerdekaan

Setelah merdeka keadaan menjadi sangat berubah dan Indonesia lahir sebagai sebuah negara Republik. Pada 18 Agustus 1945 Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Mohamad Hatta terpilih menjadi pemimpin negara. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan rencana untuk dapat tumbuhnya partai-partai politik sebagai alat untuk perjuangan negara masa depan.

Musyawarah persidangan PPKI juga telah mendirikan *Badan Keamanan Rakyat (BKR)* yang kemudian menjadi *Tentara Nasional Indonesia (TNI)* dan *Komite Nasional Indonesia (KNI)*. Kedua institusi tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Parlemen yaitu *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)* dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memang belum ada.

Untuk mengisi kekosongan anggota-anggota *KNI* maka dipilihlah elit-elit dari seluruh negeri atau daerah, mereka berperanan sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia atau parlemen.

Oleh karena itu, *KNI* sejak tanggal 14 November 1945 telah mulai melaksanakan semacam demokrasi berparlemen dan jabatan Presiden saat itu sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah adalah Perdana Menteri, dan terpilihlah pertama sekali Syahrir. *KNI* telah mencanangkan agar masyarakat dapat mendirikan partai-partai politik sebagai rencana untuk Pemilihan tahun 1946 (Sinar Harapan 1985:244). Rencana mengadakan pemilihan tahun 1946 tetapi tidak dapat diwujudkan sampai tahun 1955. Hal tersebut karena faktor internal negara yang belum stabil.

Partai-partai politik yang didirikan pada era kemerdekaan Indonesia sejak 7 November 1945 antara lain:

1. Partai Masyumi

Partai *Masyumi* (*Majelis Syura Muslimin Indonesia*) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945 oleh Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh Islam, yaitu ulama dan cendekiawan. Visi *Masyumi* yaitu mengawal negara Indonesia yang telah berdaulat dengan melaksanakan ajaran agama Islam untuk setiap pengurusan negara.

Partai Islam *Masyumi* juga menjalankan program visi politik yaitu *pertama*, mengembangkan pengetahuan orang Islam di segi politik, *kedua*, merapatkan persatuan antara umat Islam, *ketiga* adalah meningkatkan praktik iman, taqwa, perikemanusiaan, kemasyarakatan dan persaudaraan yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam dan *keempat* yaitu, bekerjasama dengan kaum dan orang-orang yang beragama lain untuk menetapkan kedaulatan negara.

Sampai tahun 1950, partai *Masyumi* mempunyai cabang sebanyak 237 di Indonesia dan 10.000.000 orang anggota. Oleh karena partai didirikan oleh tokoh Islam dan cendekiawan yang populer maka *Masyumi* telah menjadi sebuah partai Islam terbesar saat itu. Pada masa reformasi Indonesia 1998 partai ini kembali didirikan dengan nama partai *Masyumi* dan *Masyumi Baru*. Bahkan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra seorang murid Muhammad Natsir

pendiri partai *Masyumi* lama mendirikan partai yang sealign dengan *Masyumi* tersebut yaitu *PBB* (Partai Bulan Bintang) yang tetap menggunakan logo partai bulan bintang. Pada pemilu 1999 *PBB* termasuk di antara 10 partai besar di Indonesia.

2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

Partai yang disingkat dengan sebutan *PSII* adalah penerus dari *Syarikat Islam* yang pernah didirikan di Solo saat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. *PSII* bertujuan utama mengembangkan ajaran Islam berdasarkan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Bagi orang-orang yang bukan beragama Islam *PSII* tetap menganggap mereka mempunyai hak yang sama sebagai bangsa Indonesia. Pada saat Reformasi di Indonesia *PSII* didirikan kembali menjadi dua partai baru yaitu *PSII* dan *PSII 1905*. Akan tetapi partai tersebut gagal memperoleh suara yang signifikan pada pemilu 1999.

3. Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PARTI)

Didirikan pada 30 Mei 1930 di Bukittinggi oleh ulama-ulama besar yaitu Syekh Suleman Ar-Rasuli, Syekh Muhamad Djamil Djaho, Syekh Abbas Ladang Laweh, Syekh Abdul Wahid es Salihiy, dan Syekh Arifin Arsyadi. Organisasi semula bertujuan semata-mata untuk kegiatan pendidikan agama Islam, membantu orang miskin, meningkatkan rasa tolong menolong.

Setelah musyawarah pada tanggal 22 Nopember 1945 organisasi *PARTI* diwujudkan menjadi *Partai Islam PARTI* dengan anggota sebanyak 1.007.400 orang. Visi partai adalah *pertama*, meningkatkan mutu praktik Islam dan cinta terhadap tanah air, *kedua* penyebaran ajaran agama Islam ke seluruh negara. Sedangkan *ketiga*, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. *Keempat*, memajukan pendidikan dan mutu kecerdasan rakyat dan *terakhir* meningkatkan kegiatan ke arah sosial ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun partai tersebut tidak didirikan kembali pada tahun 1998 sebagaimana partai yang lain. Banyak di antara anggota partai

PARTI pada saat ini menjadi anggota partai PPP dan Golkar dan partai Islam yang lain.

4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Penganut agama Kristen di Jakarta mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tanggal 18 Nopember 1945 yang berdasarkan kepada ajaran agama Kristen. Partai ini semula bernama *Partai Kristen Nasional (PKN)* dan *Partai Kristen Indonesia*. Mengikuti musyawarah kedua partai tersebut telah dipadukan menjadi sebuah partai yaitu *Parkindo*. Pada era Reformasi *Parkindo* tidak didirikan kembali tetapi sebagian mantan anggota partai mendirikan *Partai Kristen Indonesia (KRISNA)* tapi gagal mendapatkan suara untuk parlemen.

Selain melaksanakan ajaran agama Kristen, visi *Parkindo* adalah menegakkan keadilan dan meningkatkan persaudaraan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena pengikutnya tidak banyak, maka jumlah anggotanya sedikit, terkecuali di sebagian daerah di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan bagian timur Indonesia terutama di Ambon serta Sulawesi Utara. Namun, kebanyakan orang Kristen lebih menyukai menjadi anggota partai yang bukan berdasar agamanya.

5. Partai Katolik

Partai Katolik didirikan di Yogyakarta oleh penganut agama Kristen Katolik pada 8 Desember 1945. Partai ini sebelum Indonesia merdeka pernah didirikan orang Belanda dengan nama *Indische Katholieke Partij* dan *Kelompok Katolik Djawi* yang didirikan oleh I.J.Kasimo.

Partai Katolik berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran agama Katolik dan memajukan kemerdekaan Indonesia. Partai Katolik hampir sama dengan partai *Kristen Indonesia (Parkindo)* yaitu jumlah anggotanya sedikit dan tidak dapat mengembangkan partai di seluruh Indonesia. Partai ini pada masa Reformasi didirikan menjadi *Partai Katolik Demokrasi (PKD)* tetapi tidak berhasil pada pemilu 1999.

6. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai *PNI* didirikan di Kediri (Jawa Tengah) pada tanggal 29 Januari 1946. *PNI* adalah penggabungan dari partai-partai yang kecil yaitu *Serikat Rakyat Indonesia*, *PNI Pati*, *PNI Madiun*, *PNI Palembang*, *PNI Sulawesi*, *Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Republik Indonesia*. *PNI* diketuai oleh S. Mangunsarkoro. Tujuan *PNI* adalah mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara, mengutamakan keadilan sosial dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.

Partai *PNI* yang didirikan oleh Ir. Soekarno (1927) mengamalkan ajaran *marhaenis* yaitu suatu ideologi untuk membangkitkan semangat rakyat kecil terutama golongan petani di desa, buruh dan orang-orang miskin yang banyak hidup di desa-desa untuk hidup selayaknya. Ribuan orang banyak yang telah menjadi anggota partai tersebut. Setelah Indonesia merdeka anak-anak Soekarno seperti Guruh dan Megawati mendirikan *Partai Demokrasi Indonesia (PDI)* yaitu meneruskan ide ayah mereka Soekarno. Oleh karena itu mantan anggota partai *PNI* pada masa kemerdekaan banyak yang menjadi anggota *Partai Demokrasi Indonesia* pada masa sekarang terutama kelompok *Wong Cilik* (rakyat yang masih hidup miskin).

7. Partai Indonesia Raya (PIR)

Didirikan pada 10 Januari 1948 dengan visi membina bangsa ke arah ajaran nasional dan keadilan. Selain itu *PIR* juga berupaya mengembangkan demokrasi, persatuan seluruh rakyat dan perjuangan bagi hak asasi manusia (*Universal Declaration of human rights*). Organisasi partai bertujuan untuk turut mengawal negara Republik Indonesia, mewujudkan keadilan perkembangan kebudayaan Indonesia dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain dalam perdamaian dunia. Namun keanggotaan partai ini sedikit. Partai ini kemudian dipecah dua menjadi *PIR Hazairin* dan *PIR Wangsanegara*.

8. Partai Indonesia Raya (PARINDRA)

Visi politik *PARINDRA* adalah membangun persatuan bangsa, peningkatan tingkat ekonomi rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai didirikan di Solo pada 25 Desember 1935 dari persatuan mantan yayasan Rukun Tani, Koperasi Kredit, dan organisasi lain yang pernah ada. Walaupun partai tidak pernah berkembang secara baik karena anggotanya sedikit tetapi setelah kemerdekaan didirikan kembali.

9. Partai Rakyat Indonesia

Partai ini didirikan pada 20 Mei 1950 dengan dasar *Pancasila* dengan visi politik adalah membina tenaga rakyat yang berpadu untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, pemerintahan yang demokrasi. Partai juga bertujuan ikut mengembangkan keadilan, persahabatan dengan negara-negara lain, menghargai kemerdekaan yang sudah dimilikinya. Keanggotaan partai juga tidak banyak sehingga perkembangan partai tidak mulus.

10. Partai Banteng Republik Indonesia

Partai ini didirikan pada 26 Maret 1950 dengan visi yaitu meningkatkan partisipasi politik dikalangan seluruh rakyat Indonesia terutama untuk membangun kegiatan politik, sosial ekonomi dan membatasi berbagai pengaruh yang datang dari pihak luar yang bertujuan merusak sosial ekonomi rakyat umumnya.

11. Partai Rakyat Nasional (PRN)

Perpecahan yang terjadi di dalam *Partai Nasional Indonesia* telah melahirkan partai *Nasional Indonesia Merdeka* seterusnya para anggotanya mendirikan *Partai Rakyat Nasional* pada tanggal 23 Juli 1950. Visi politik *PRN* adalah memajukan demokrasi, ajaran nasional dan gotongroyong. Di samping itu, *PRN* mengembangkan pemerintahan negara dengan sistim parlemen dan mengedepankan persatuan seluruh rakyat Indonesia.

12. Partai Wanita Rakyat

Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1946 oleh mantan-mantan anggota pendiri kelompok perempuan Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1945. Sesuai dengan nama partai tersebut, visinya adalah meningkatkan martabat perempuan, persamaan hak-hak perempuan dengan laki-laki di dalam negara, berpartisipasi politik, dan menegakkan demokrasi.

13. Partai Nasional Indonesia (PARKI)

Semula partai ini ada di Pasundan Jawa Barat dalam bentuk kelompok yang bernama *Paguyuban*. Maka pada bulan Januari 1949 dikembangkan menjadi partai politik. Visi partai ini yaitu, meningkatkan persatuan rakyat, meningkatkan partisipasi politik, memajukan demokrasi berparlemen, dan membentuk wilayah-wilayah otonom di seluruh negeri di Indonesia.

14. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

Di Sulawesi Selatan, didirikan *PKR* pada 24 Nopember 1946 bervisi ke arah *memajukan* pembangunan kampung dan persatuan yang kokoh orang Sulawesi dan daerah lain di Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Visi tersebut setelah peretemuan nasional partai tahun 1950 disempurnakan visinya untuk mengembangkan demokrasi, sosial ekonomi penduduk dan pembangunan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia.

15. Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI)

Partai *SKI* didirikan di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Januari 1946. Visi politik terpenting adalah melaksanakan dasar negara *Pancasila* dan mengembangkan demokrasi berparlemen. Untuk memperbanyak kegiatan *SKI* telah mendirikan kelompok-kelompok baru di dalam masyarakat dan bekerjasama dengan *Persatuan Wanita Indonesia, Persatuan Pemuda Indonesia, Persatuan Pemudi Indonesia, Kepanduan Rakyat Indonesia, dan Persatuan Kaum Dagang Indonesia*.

16. Partai Ikatan Nasional Indonesia (INI)

Partai *INI* didirikan setelah kemerdekaan Indonesia di Balikpapan Kalimantan Timur. Di antara visi terpenting adalah mengembangkan dasar-dasar kedaulatan oleh rakyat untuk mengembangkan demokrasi Indonesia yang merdeka. Di samping itu, bertujuan memperkuat persatuan bangsa, memajukan tingkat ekonomi rakyat, keadilan dalam dan luar negara.

17. Partai Rakyat Jelata (PRJ)

Didirikan pada 1 Oktober 1945 visi politik yaitu meningkatkan tingkat mutu hidup rakyat jelata dan meningkatkan partisipasi politik di dalam kekuasaan pemerintah. Ide organisasi *PRI* berkaitan erat dengan ajaran *Marhaen* yang pernah dicetuskan Soekarno yaitu mengangkat martabat kaum yang miskin dan rendah ke tingkat yang lebih tinggi.

18. Partai Tani Indonesia (PTI)

Organisasi partai *PTI* di Purwakarta Jawa Barat di dasarkan atas keinginan para petani untuk terlibat di dalam kegiatan politik dan pemerintahan demokrasi. Maka pada 5 Desember 1945 partai ini lahir. Visinya adalah meningkatkan demokrasi berparlemen, menyadarkan rakyat, termasuk untuk para petani yang berpartisipasi dalam politik di negara Republik Indonesia.

19. Kelompok Wanita Demokrat Indonesia

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa organisasi perempuan yang berperan mengenai selukbeluk politik telah mendirikan partai *Kelompok Wanita Demokrasi* tersebut. Visi politik adalah *sosio-demokarasi* yang artinya memajukan persatuan seluruh rakyat dengan ajaran nasional sosial khas Indonesia.

20. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai ini meneruskan cita-cita *PKI* yang sudah ada pada masa kolonial Belanda. Pada kongres di Surakarta (11-13 Januari

1947) mencetuskan visi politik *PKI* yaitu mengamalkan ajaran *Marxis* dan *Lenin* yaitu ajaran komunis yang diamalkan seperti di negara-negara komunis, Sovyet, dan Cina. *PKI* bertujuan seluruh rencana/hasil yang dimiliki negara hanya diperuntukkan kepada seluruh rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut *PKI* membujuk para buruh, petani, nelayan dan orang-orang miskin untuk bersama-sama berjuang secara revolusi. Partai *PKI* berfaham *atheis*. Oleh karena itu, orang-orang yang beragama tidak sepaham dengan partai tersebut. Pada tahun 1948 *PKI* pernah memberontak dikenal sebagai peristiwa Madiun dan *PKI* sampai sekarang tetap dilarang setelah peristiwa G30S tahun 1965.

21. Partai Sosialis Indonesia

Ajaran Marx Engel adalah menjadi dasar bagi organisasi *Partai Sosialis Indonesia* pada bulan Maret 1947. Visi politik partai adalah bertujuan meningkatkan kecakapan dan kecerdasan anggota partai untuk melaksanakan demokrasi melalui pendidikan politik, diskusi, kebebasan pers, dan lain-lain.

22. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA)

Visi terpenting partai *MURBA* adalah mengawal kemerdekaan Indonesia dan menolak berbagai bentuk penindasan, penjajahan dan kekuasaan besar ekonomi oleh sekelompok orang tertentu. Di antara program partai adalah menghimpun dan mengembangkan *Tentara Rakyat* membuat rencana ekonomi untuk pertahanan dan keamanan. Partai didirikan pada 7 Nopember 1947 oleh beberapa orang tokoh mantan anggota *Partai Sosialis*.

23. Partai Buruh

Terdapat dua partai yang berkaitan dengan para buruh yaitu *Partai Buruh* dan *Partai Buruh Indonesia* didirikan di Madiun pada bulan September 1948. Visi partai yang pertama adalah mengembangkan demokrasi dan persatuan di kalangan buruh. Sedangkan

partai *Buruh Indonesia* yaitu sama dengan visi partai buruh tersebut, namun di dalam program yang dijalankan untuk mengembangkan demokrasi melalui aksi cepat (revolusi) dan adil.

24. Partai Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI)

Dasar utama *PERMAI* adalah *Pancasila* saat didirikan pada 27 April 1946 di Surakarta. Visinya yaitu menentang berbagai bentuk kezaliman, kolonial (penjajahan), kekuasaan ekonomi yang besar di tangan kelompok luar ke dalam Indonesia. Partai berupaya untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan yang benar kepada seluruh rakyat. Partai juga mengembangkan demokrasi dan hak asasi setiap pribadi.

25. Partai Demokrasi Tionghoa

Partai ini didirikan oleh masyarakat Cina Indonesia pada tanggal 23 Mei 1948. Program partai adalah memperkokoh persatuan berbagai kaum tanpa membedakan asal kaum, penganut agama, kebudayaan maupun adat setiap warganegara Indonesia. Partai tersebut bervisi untuk mengamalkan pemerintahan demokrasi yang benar.

26. Partai Indo Nasional

Orang-orang yang berasal dari keturunan Eropah atau campuran (*Indo*) yang telah berada cukup lama di Indonesia telah mendirikan partai Indo Nasional tersebut pada 7 Juli 1949. Visi terpenting adalah meningkatkan ke arah persatuan bangsa tanpa membedakan hak sebagai warganegara Indonesia dan bertekad untuk tetap mengawal Indonesia sebagai tanah air mereka.

27. Partai Nahdlatul Ulama (NU)

Pada awal organisasinya partai ini bernama *Jamiyah Nahdlatul Ulama* yang pertama kali ada di Surabaya pada tahun 1926. Tujuan organisasi organisasi para ulama Islam dan kalangan

pelajar dari daerah pedesaan tersebut adalah untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang benar.

Ketika terjadi perpecahan ditubuh partai Islam *Masyumi* yang salah satu kelompok utamanya adalah anggota *NU*, maka lahirlah partai *NU* tahun 1952 di Palembang. Visi terpenting adalah mengamalkan ajaran Islam. Partai *NU* mempunyai anggota yang sangat banyak berasal dari masyarakat desa dan pelajar-pelajar sekolah agama Islam yang dibangun *NU* sejak masa kolonial Belanda. Dengan demikian partai tersebut menjadi sebuah partai yang cukup besar di Indonesia. Pada era reformasi (1999) organisasi *NU* mendirikan partai bernama *Partai Kebangkitan Bangsa* (PKB) dan sekarang termasuk partai besar yang banyak wakilnya di parlemen.

28. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

Partai *IPKI* telah didirikan pada 20 Mei 1954 dengan visi menghapuskan kemiskinan, penderitaan rakyat Indonesia setelah dijajah Belanda menuju ke arah keselamatan, kemakmuran yang adil. Dasar partai adalah *Pancasila* dan tujuan yang lain adalah mendesak untuk secepatnya mengadakan pemilu.

C. Demokrasi dan Sistem Politik

Umumnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang menjadi dasar bagi kebanyakan negara di dunia. Dari demokrasi lazimnya pemerintahan negara berdasarkan kepada undang-undang atau konstitusi dan pemerintah merupakan sebuah kelompok kegiatan yang diselenggarakan mewakili rakyat dan kekuasaan yang dijalankan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mendapat jabatan pemerintah. Demokrasi juga diartikan mengikut praktik bagi negara-negara tertentu (Miriam 1998:51) seperti negara komunis yang juga menyatakan diri sebagai negara demokrasi misalnya Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan sebagainya.

Demokrasi kelembagaan (undang-undang) timbul sebagai sebuah sistem politik yang nyata pada abad ke 19, seperti

kebebasan manusia terhadap segala bentuk penindasan dan perlakuan yang tidak adil untuk menjalankan agama, politik, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada awal abad ke-20 terutama setelah perang dunia II peranan negara tidak lagi sebatas mengurus kepentingan bersama, tetapi juga berkewajiban untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Maka demokrasi mempunyai cakupan yang lebih luas termasuk di bidang ekonomi dan sebagainya.

Maka pada masa moderen timbul pula masyarakat sipil (*Civil Society*) yang memerlukan syarat-syarat tertentu untuk menjadi masyarakat politik (*Political Society*). Masyarakat tersebut, memerlukan peningkatan pendidikan, hak dan kewajiban serta kesadaran rakyat berpolitik yaitu keinginan untuk berpartisipasi dan demokrasi mewujudkan posisi kekuatan antara rakyat dan negara menjadi sama kuat.

Di Indonesia demokrasi yang dijalankan adalah *Demokrasi Pancasila* yang intisarinya terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945, sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kepada Pancasila.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung lama sekurang-kurangnya dalam empat periode yaitu: pertama, demokrasi awal kemerdekaan (1945-1959) yang lebih berdasarkan kepada *Demokrasi liberal* yang menitikberatkan kepada peranan partai politik dan parlemen. Kedua, *Demokrasi Terpimpin*, yaitu demokrasi yang banyak bertumpu dengan dasar demokrasi liberal (1959-1965) di masa Presiden Soekarno, dan ketiga, *Demokrasi Pancasila* yang menjalankan demokrasi konstitusi yang terpusat kepada kekuasaan presiden (1965-1998) yang dijalankan oleh rezim Soeharto dan terakhir yaitu kembali kepada demokrasi liberal pada masa era *reformasi* yang dijalankan sekarang setelah tahun 1998 dimulai dari pemerintahan Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada tahun 1971 hanya diadakan satu kali pemilu tahun 1955. Walaupun

perkembangan partai politik setelah pemilu tersebut cukup pesat, tetapi senantiasa gagal mengadakan pemilu yang berkelanjutan karena banyak faktor-faktor luar dan dalam Indonesia yang menghambatnya. Faktor dalam termasuk suasana perkembangan demokrasi dan politik yang tidak stabil karena terdapat perselisihan di antara partai-partai yang ingin menguasai pemerintahan. Amandemen undang-undang yang gagal dibuat rezim yang berkuasa yaitu Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan kekuasaan negara hanya di tangan seorang presiden. Keadaan tersebut menjadikan suasana demokrasi dan pemerintahan negara tidak stabil dan rezim berkuasa Soekarno menjadi otoriter (*authoritarian*).

Walaupun Soekarno terkenal lantang memperjuangkan negara-negara yang miskin di dunia, namun dalam masa kepemimpinannya sukar mengembangkan pembangunan politik dan peningkatan taraf ekonomi rakyat. Dari segi politik, Soekarno didekati dan dibujuk tokoh-tokoh, pemimpin negara dari Uni Soviet dan Cina yang menganut ajaran komunis. Suasana Indonesia yang tidak stabil digunakan oleh PKI (*Partai Komunis Indonesia*) untuk memplintir dasar negara *Pancasila* ke arah ajaran komunis dan PKI mencoba melemahkan peranan rakyat dan partai-partai yang lain di pemerintahan. Di masa rezim *Orde Lama* tersebut, Soekarno mengikrarkan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia dan memimpin negara sepanjang hidupnya, maka jadilah Soekarno sebagai “Presiden Seumur Hidup”.

Soekarno juga membuat sistem *Demokrasi Terpimpin*, suatu corak demokrasi khusus yang tidak ada di negara manapun. Pada saat itu, militer (tentara) juga mencoba mengambil peranan karena elit-elit politik dianggap gagal menjalankan pemerintahan (Prisma 1978).

Negara yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berat dugaan telah dikotori pihak komunis, arah kepemimpinan negara yang semula didasarkan kepada *Pancasila* diganti dengan dasar *Nasakom* (Nasional Agama Komunis), yaitu persatuan di antara ajaran nasional, agama dan komunis, dikenal sebagai *Front Nasional*.

Praktik *Nasakom* tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena adanya percampuran ajaran orang yang beragama dengan komunis yang sulit untuk bisa digabungkan.

Peristiwa merampas kekuasaan pada tanggal 30 September 1965, singkatnya *Gerakan 30 September* (G30S) diduga didalangi oleh PKI. Namun, isu keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S tersebut dipermasalahkan oleh mantan anggota dan tokoh PKI yang masih hidup setelah diberi ampunan untuk keluar dari penjara oleh Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Faktor luar juga telah menghambat pelaksanaan pemilu, ketika itu terjadi perselisihan antara dua negara karib yaitu Indonesia dan Malaysia. Rezim Soekarno menganggap kerajaan Malaysia tidak bisa diakui begitu saja karena dibentuk oleh kolonial Inggris. Kerajaan Inggris dan negara-negara Barat yang lain dianggap sebagai imperialis yang ingin menguasai negara-negara yang sedang berkembang khususnya di Asia Tenggara. Oleh karena itu Soekarno merasa kuatir bahwa negara Malaysia jirannya akan menjadi daerah jajahan baru negara-negara maju tersebut. Rezim Soekarno mempopulerkan istilah negara-negara Barat terutama Inggris dan Amerika Syarikat sebagai penjajah bentuk baru (*Neo-kolonial*). Maka, seluruh tumpuan perhatian negara masa itu dialihkan ke arah konfrontasi melawan kerajaan Malaysia, waktu itu dengan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Al Haj. Perselisihan kedua negara dapat diakhiri setelah Soekarno dijatuhkan dan berganti dengan rezim Soeharto atau rezim *Orde Baru*.

1. Masa 1945-1959

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintahan dijalankan dengan menggunakan sistem berparlemen atau demokrasi liberal, di mana badan pemerintah terdiri dari presiden dibantu oleh beberapa orang menteri yang berasal dari kelompok partai-partai yang besar, ini dimulai dengan melaksanakan dasar *Undang-Undang Dasar Negara 1950*. Pada masa tersebut dicatat hanya sekali saja diadakan pemilu tahun 1955.

Partai yang menang pemilu berkuasa pada pemerintahan dan partai-partai yang kalah menjadi partai oposisi dan berada di luar kekuasaan pemerintah. Pemimpin tertinggi negara adalah Presiden dan kepemimpinan pemerintahan oleh Perdana Menteri sebagai ketua kabinet. Akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena sering timbul pertentangan di antara partai-partai untuk menjalankan pemerintahan yang stabil. Partai oposisi juga tidak mampu berlaku adil untuk mengawal pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan tentara, sebagai komponen yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan juga ingin masuk ke dalam sistim kekuasaan negara.

Bagaimanapun perebutan tampuk pemerintahan terutama jabatan perdana menteri oleh partai-partai besar menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Setiap partai berusaha merebut jabatan tersebut dan dalam waktu yang singkat seringkali terjadi pergantian jabatan perdana menteri. Faktor-faktor yang tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tidak stabil itu telah melahirkan dekrit (maklumat) Presiden Soekarno 5 Juli 1959 untuk kembali kepada dasar negara Indonesia yaitu, Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian sistem demokrasi berparlemen berakhir (Miriam 1998: 70). Suasana tersebut telah menjadikan negara dalam keadaan kacau, jabatan presiden dihilangkan dan Soekarno menyatakan diri sebagai satu-satunya pemimpin negara.

2. Masa 1959-1965

Di antara ciri-ciri terpenting masa demokrasi di sini adalah kekuasaan yang sangat besar dari seorang Presiden (Soekarno) dan pengurangan peranan dari partai-partai politik, perkembangan ajaran komunis pada masa itu juga banyak mempengaruhi sistim pemerintahan. Di samping itu, peranan yang semakin besar dari tentara memasuki bidang pemerintahan negara.

Presiden mengeluarkan dekrit dengan tujuan untuk mengembalikan kepemimpinan negara yang kokoh secara demokrasi. Akan tetapi, Presiden Soekarno justru membuat

kesalahan dengan melantik dirinya sebagai presiden seumur hidup dan membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 dan membentuk parlemen sementara (*Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong*). Parlemen yang terbentuk hanya berfungsi sebagai pembantu presiden dan bukan sebagai wakil rakyat (Miriam 1998:72). Keadaan tersebut menjadikan Soekarno sebagai pemimpin paling berkuasa secara otoriter.

Saat itu didirikan berbagai organisasi yang terpenting yaitu *Front Nasional* yang kelak digunakan oleh ajaran komunis untuk mendirikan *Demokrasi Rakyat*. Masa tersebut berakhir ketika timbul usaha perebutan kekuasaan yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh *Partai Komunis Indonesia* (PKI). Masa demokrasi tersebut dikenal sebagai masa *Orde Lama*. Setelah itu, era *Demokrasi Pancasila* dilahirkan kembali di Indonesia, yaitu *Orde Baru*.

3. Masa 1965-1998

Presiden Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, seluruh undang-undang yang pernah dibuat dimasa *Demokrasi Terpimpin* dihapuskan dan jabatan presiden dikembalikan kepada dasar negara yaitu *Demokrasi Pancasila* dan jabatan presiden dikembalikan berlaku untuk masa 5 tahun. Parlemen yang didirikan diberi kuasa untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan negara. Partai-partai politik juga diberikan kebebasan untuk menyiapkan diri untuk ikut pemilu yang dirancang tahun 1971.

Jendral Soeharto yang namanya membumbung tahun 1965, dia dianggap sangat berjasa ketika menumpas Gerakan 30 September 1965 (*G30S*) yaitu usaha perebutan kekuasaan yang gagal dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam peristiwa tersebut sebanyak 7 orang jendral tewas terbunuh. Akibat peristiwa tersebut suasana di Indonesia mencekam dan Presiden Soekarno terpaksa harus menyerahkan pengendalian keamanan negara (*Komando Pemulihan Keamanan Negara*)

kepada Jendral Soeharto. Sedangkan Soekarno pindah ke istana negara Bogor Jawa Barat.

Setahun setelah itu, kedudukan Soeharto bertambah kuat ketika Presiden Soekarno menyerahkan pemerintahan negara kepada Soeharto pada 11 Maret 1966 sebagai pemangku presiden. Maka pada awal kepemimpinannya, Soeharto langsung membubarkan PKI dan menangkap tokoh partai tersebut. Setelah berhasil menumpas *Gerakan 30 September* akhirnya dilantik menjadi Presiden pada 11 Maret 1969 oleh parlemen yaitu *Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara* (MPRS).

Akhir dari peristiwa perebutan kekuasaan oleh *Gerakan 30 September 1965* telah menyingkirkan Presiden Soekarno dari kepemimpinan negara dan *Orde Lama* yang berkuasa sejak tahun 1959 berakhir dan seterusnya rezim *Orde Baru* lahir. Strategi politik *Orde Baru* menurut Ali Moertopo dalam Karim (1993:159) mengutamakan, pertama menghancurkan *Partai Komunis Indonesia (PKI)* yang disangka melakukan rampas kuasa (kudeta), keduanya melaksanakan dasar negara *Pancasila* dan Undang-undang negara 1945, dan terakhir adalah mestabilkan keseimbangan sistim politik dan pelancaran pembangunan negara.

Perebutan kekuasaan pemerintahan terjadi pada tanggal 30 September 1965 tersebut dalangnya diduga dari pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) peristiwa ini dikenal sebagai *Gerakan 30 September (G30S/PKI)*. Tetapi usaha perebutan kekuasaan tersebut dapat digagalkan oleh rakyat Indonesia terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa dan tentara. Peristiwa tersebut adalah awal dari sejarah berdirinya *Orde Baru*. PKI telah dibubarkan dan semua pengurus partai dan anggota-anggota mereka yang tertangkap ketika perebutan kekuasaan yang gagal telah di bawa ke mahkamah/pengadilan dan bahkan banyak juga terbunuh oleh musuh-musuhnya. Sedangkan tokoh-tokoh partai yang lain diasingkan ke pulau Buru di sebuah tempat yang jauh di Indonesia timur.

Soeharto setelah peristiwa tersebut sangat populer sebagai seorang pemimpin yang sangat anti terhadap ajaran komunis.

Peristiwa G.30.S adalah puncak perselisihan tiga penjuror besar yaitu: PKI, Presiden Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan ketegangan yang amat kuat di pusat pemerintahan negara (Gunawan 2000:32). Ketika itu, terjadi pula krisis ekonomi dengan tingkat inflasi sebesar 600 persen tiap tahun, maka memicu rakyat tidak puas kepada Soekarno. Unjuk rasa timbul secara luas di Indonesia terutama puncaknya pada 10 Januari 1966 di Jakarta oleh mahasiswa dan pelajar-pelajar sekolah menengah dengan gerakan bernama *Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)* dan *Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)*. Aksi para mahasiswa menumpukan kepada tiga tuntutan yang dikenal dengan "*Tri Tura*" yaitu *Tiga Tuntutan Rakyat* adalah, *pertama* bubarkan PKI, *kedua* buang seluruh bekas anggota PKI yang duduk dalam kabinet dan turunkan harga (*tarif*) barang-barang yang sudah terlalu tinggi.

Selama 60 hari gerakan mahasiswa yang didukung oleh Tentara Indonesia akhirnya mengakhiri kekuasaan Soekarno dan akhirnya berganti dengan pelantikan Soeharto sebagai pemegang kekuasaan yang baru berdasarkan Surat Presiden yang singkatannya dikenal sebagai "*Supersemar*" (Surat Perintah 11 Maret 1966), artinya suatu kekuasaan yang membolehkan Soeharto bertindak untuk mengendalikan keamanan dan keselamatan negara. Dengan kekuasaan itu pula Soeharto kemudian cukup kuat dan akhirnya dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Pemangku Presiden Indonesia menggantikan Soekarno secara resmi pada tanggal 22 Februari 1967 (Purwantana 1994:6). Seterusnya pada persidangan MPRS bulan Maret 1968, Soeharto telah dilantik menjadi presiden sampai diadakan pemilu yang pertama tahun 1971 dalam masa *Orde Baru* tersebut.

Presiden Soeharto mencoba melakukan regulasi partai yaitu dari sistem banyak partai kepada penyederhanaan partai politik di Indonesia. Pada 16 Desember 1967 pertemuan pemimpin partai telah melahirkan *Permufakatan Nasional* (Gunawan 2000:36). Kesepakatan nasional itu antaranya;1) anggota parlemen terdiri

dari orang yang diangkat (tanpa harus ikut pemilu), calon-calon wakil rakyat dipilih melalui pemilu, 2) anggota parlemen dilantik adalah dari kelompok militer dan tokoh masyarakat, 3) jumlah anggota parlemen yang dilantik sebanyak sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota parlemen (MPR) dan 4) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 460 orang terdiri dari sebanyak 360 orang dipilih pada pemilu dan sebanyak 100 orang diangkat tanpa pemilu.

Pada saat *Orde Baru* sebanyak 6 kali pemilu telah diadakan, mayoritas dimenangkan oleh partai *Golkar*. Partai pemerintah tersebut senantiasa mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, para pakar politik di Indonesia dan dunia menilai bahwa kemenangan partai *Golkar* adalah tidak fair dan tidak jujur (Mashad 1999:7).

4. Masa 1998-sekarang

Suasana perkembangan teknologi komunikasi di dunia atau era globalisasi telah membangkitkan isu-isu demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan sekitarnya. Penduduk dunia berada dalam suasana yang saling berdekatan, bertemu melalui media komunikasi yang berkembang pesat seperti jaringan internet, telepon, dan media masa. Perkembangan sebuah negara di bidang ekonomi, politik, dan budaya dengan cepat dapat diketahui.

Di Indonesia, suasana globalisasi tersebut juga berkembang pesat di kalangan masyarakat terutama tentang isu-isu demokrasi, kebebasan berpolitik yang dengan sangat mudah diikuti rakyat melalui televisi dan media masa. Rakyat Indonesia secara keseluruhan menilai kekuasaan Soeharto telah berubah menjadi otoriter. Paradigma yang timbul rakyat berani menyampaikan aspirasi dan berusaha untuk menurunkan Soeharto dari kursi presiden. Tujuannya agar keadaan ekonomi dan demokrasi yang benar dapat dikembangkan. Maka pada hari Kamis pagi tanggal 21 Mei 1998, Soeharto berbicara di Istana Negara yang disebarkan oleh seluruh media masa bahwa, *Saya berhenti sebagai Presiden*

Republik Indonesia. Setelah itu Habibie yang Wakil Presiden langsung mengambil alih kekuasaan presiden untuk meneruskan pemerintahan. Sejak itu, *Orde Baru* berakhir dan, *Orde Reformasi* lahir, yaitu awal kelahiran era *Demokrasi Indonesia Baru*.

Demokrasi Moderen yang sekarang diamalkan di Indonesia tetap berdasarkan kepada *Demokrasi Pancasila* dengan mengamandemen beberapa buah pasal undang-undang dasar Negara 1945. Proses amandemen dilakukan oleh parlemen yaitu MPR (*Majelis Permusyawaratan Rakyat*) pada bulan November 2001. Di antara yang terpenting diamandemen itu adalah, sistim pemilu masa depan menggunakan sistem wilayah dan pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia (Kompas 2001). Pada tahun 2004 pemilihan pertama telah dapat memilih presiden, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati yang dulu dipilih oleh MPR. Selain pemilihan Presiden, sekarang juga diadakan pemilihan Gubernur di setiap provinsi, Walikota dan Bupati di setiap kota dan kabupaten.

D. Pemilu

Setelah Indonesia merdeka sampai awal reformasi telah delapan kali pemilu diadakan. Pertama, sekali pada masa *Demokrasi Liberal* tahun 1955 diikuti oleh partai-partai politik yang pernah didirikan setelah Indonesia merdeka. Kedua, enam kali pada masa rezim *Orde Baru* (1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997). Pemilu pada masa *Reformasi* terlaksana pertamakali pada tahun 1999. Sedangkan pemilu berikutnya diadakan tahun 2004 juga untuk memilih anggota parlemen dan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Sejarah pemilu Indonesia secara ringkas sebagai berikut.

1. Pemilu 1955

Walaupun Pemilu yang pertama di Indonesia rencana diadakan tahun 1946, setahun setelah merdeka tetapi dapat dilangsungkan pada tahun 1955, ini karena faktor keamanan

negara dari ancaman kolonial dan negara asing yang masih ingin tetap menjajah. Mulai bulan Desember 1949 dunia dan bangsa lain telah mengakui adanya Republik Indonesia. Pembentukan kabinet menggunakan gabungan antara dua partai yang besar yaitu partai *Masyumi* dan *PNI*. Kabinet yang pertama dan kedua diketuai oleh Mohamad Natsir dan Sukiman dari partai *Masyumi* dan telah dicanangkan akan mengadakan pemilu. Tetapi kabinet Natsir tidak terlalu lama (7.5 bulan) menguasai pemerintahan dan digantikan kabinet yang ketiga dan keempat dipimpin Wilopo dan Ali Sastroamidjojo dari *PNI*. Kabinet Ali Sastroamidjojo dapat berjalan selama dua tahun (Agustus 1953 s.d. Agustus 1955).

Pemilu diadakan dalam masa kabinet dipimpin Burhanuddin Harahap (*Masyumi*) untuk memilih parlemen dan anggota *konstituante* (Feith 1962:434-435). Pemilihan tahun 1955 diikuti oleh berbagai partai politik yang sudah didirikan dan partai bebas, namun hanya empat buah partai yang memperoleh suara meyakinkan yaitu, *Partai Nasional Indonesia* (57 kursi), *partai Masyumi* (57 kursi), *Nahdlatul Ulama* (45 kursi) dan *Partai Komunis Indonesia* (39 kursi). Keadaan tersebut ditunjukkan Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Komposisi Perolehan Kursi Parlemen Pemilu 1955

Partai Politik	Jumlah suara	Parsen tase	Kur si
PNI (Partai Nasional Indonesia)	8,434.653	22,32	57
Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).	7,903.886	20,92	57
NU (Nahdlatul Ulama).	6,955.141	18,41	45
PKI (Partai Komunis Indonesia).	6,176.914	16,36	39
PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia).	1,091.161	2,89	8
Parkindo (Partai Kristen Indonesia).	1,003.325	2,66	8
Partai Katolik.	770,740	2,04	6
PSI (Partai Sosialis Indonesia).	753,191	1,99	5
PKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Ind).	541,306	1,43	4
Parti (Pergerakan Tarbiyah Indonesia).	483,014	1,28	4
PRN (Partai Rakyat Nasional).	242,125	0,64	2
Partai Buruh.	224,167	0,59	2
GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila).	219,985	0,58	2
PRI (Partai Rakyat Indonesia).	206,261	0,55	2
PPPRI (Partai Pendukung Pro Rep. Ind)	200,419	0,53	2
Partai Murba	199,588	0,53	2

Partai Politik	Jumlah suara	Parsentase	Kur si
Baperki	178,887	0,47	1
PIR-Wangsanegara	178,481	0,47	1
Gerinda	154,792	0,40	1
Permai(Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia)	149,287	0,40	1
Partai Persatuan Dayak	146,054	0,39	1
PIR-Hazairin	114,644	0,30	1
PPTI (Partai Persatuan Tarikat Indonesia)	85,131	0,22	1
AKUI	81,454	0,21	1
PRD (Partai Rakyat Demokrasi)	77,919	0,21	1
PRIM (Partai Republik Indonesia Merdeka)	72,523	0,19	1
ACOMA (Angkatan Komunis Muda).	64,514	0,17	1
R. Soejono Prawirasudarsa.	53,305	0,14	1
Partai lain-lain	1,022.433	2,71	-
Jumlah	37,785.299	100.00	257

Sumber: Feith 1962: 434-435

Kabinet pertama setelah pemilu adalah terdiri dari dua buah partai komponen yang besar yaitu *PNI* dan *Masyumi* dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Umur kabinet hanya berlangsung setahun karena faktor dalam dan gangguan yang ada di daerah-daerah dan akhirnya kabinet dibubarkan.

Kabinet seterusnya dipimpin oleh Djuanda yang menjalankan pemerintahan sampai tahun 1959. Sedangkan partai *PKI* tidak disertakan di dalam kabinet. Namun, musyawarah parlemen yang diadakan saat itu gagal membuat suatu keputusan mengenai dasar atau rukun negara untuk sistem pemerintahan masa depan Indonesia. Suasana di parlemen tidak harmonis karena perselisihan pendapat yang saling berbeda di kalangan anggota parlemen. Maka, Presiden Soekarno langsung mengeluarkan sebuah dekrit 5 Juli 1949 yaitu pernyataan Soekarno agar "Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945". Artinya seluruh sistem pemerintah dan negara diganti dan seterusnya melaksanakan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sistem berparlemen dinyatakan tidak ada lagi. Sebagai gantinya Soekarno mendirikan *Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara* (MPRS) dan *Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong*

(DPR-GR) yang berfungsi sebagai parlemen. Seluruh anggota MPRS dan DPR-GR tersebut dipilih oleh Soekarno.

Setelah berakhirnya kekuasaan partai di parlemen, maka kekuasaan sepenuhnya negara telah dialihkan kepada Presiden (Soekarno). Presiden Soekarno mencanangkan konsep *Demokrasi Terpimpin* yaitu suatu sistem pemerintahan yang semata-mata berada di tangan Presiden. Maka, Soekarno membentuk institusi negara seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai parlemen dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sebagai institusi tertinggi untuk memberikan pertimbangan kepada presiden. Perhimpunan MPR pada tahun 1960, 1963 dan 1965 telah menetapkan *Demokrasi Terpimpin*. Selain itu, didirikan Dewan Nasional yang mempunyai 40 orang anggota yang terdiri dari wakil-wakil kelompok buruh, petani, pengusaha, wanita, pemuda, agama, wakil daerah, dan wakil tentara (ABRI). Dengan itu pula, maka seluruh institusi kenegaraan takluk kepada kekuasaan Soekarno.

Oleh karena itu, maka dengan dasar undang-undang yang dibuat oleh Presiden tersebut seluruh partai politik telah dibubarkan. Bagi pemimpin partai-partai lama boleh mendirikan kembali apabila telah mencukupi syarat-syarat tertentu mengikut isi Undang-undang tersebut. Sekurangnya pada masa itu (1960) dilaporkan hanya terdapat 10 buah partai saja yaitu, PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partaindo, Parkindo, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Islam Parti. Sedangkan partai Islam terbesar yaitu Masyumi dan PSI dianggap tidak memenuhi syaratnya dan dinyatakan sebagai partai yang terlarang atau dilarang (Karim 1983:150).

Presiden juga, mendirikan sebuah *Barisan Nasional* yaitu organisasi untuk menampung seluruh kekuatan politik tetapi berada di bawah kawalan kuasa pemerintah. Organisasi organisasi tersebut adalah usulan PKI (Hartono Mardjono 1998:24). Maka seluruh organisasi bangsa, seperti kelompok agama, partai politik yang sudah didirikan dan golongan bekas partai-partai kecil dimasukkan ke dalam organisasi *Barisan Nasional* tersebut. *Partai Komunis Indonesia*, telah berperan besar di dalamnya. Dasar

utama *Barisan Nasional* adalah menjalankan persatuan cita-cita bersama anggota organisasi yaitu kelompok nasional, agama dan komunis, dikenal sebagai *Nasakom* (Nasional Agama Komunis). Maka seluruh kegiatan yang dibuat negara seperti pelancaran pembangunan dan lain-lain harus dirujuk kepada *Nasakom* tersebut.

Namun ironisnya Soekarno diberhentikan oleh parlemen (MPRS) dan digantikan oleh Soeharto pada 11 Maret 1967. Selama masa rezim Soekarno atau rezim Orde Lama praktis tidak satupun pemilihan umum dapat dilangsungkan.

2. Pemilu Masa Orde Baru (1971-1997)

Kebijakan Presiden Soeharto yang terpenting dalam sejarah pemilu adalah mengadakan pemilu pada tahun 1971 untuk membentuk parlemen baru. Soeharto menetapkan agar pemilu diikuti oleh partai-partai politik yang sudah ada. Soeharto menetapkan Undang-undang bahwa jumlah keanggotaan parlemen DPR-RI (*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*) keseluruhan sebanyak 460 kursi. Namun yang akan diperebutkan hanya sebanyak 360 kursi, 100 kursi akan diperuntukkan untuk militer tanpa pemilihan karena militer tidak dibenarkan memilih untuk menghindari perpecahan di dalam tubuh militer. Sedangkan MPR (*Majelis Permusyawaratan Rakyat*) sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai kekuasaan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengamandemen Undang-undang dengan jumlah keanggotaan sebanyak 920 kursi. Rezim Soeharto menetapkan bahwa sebanyak 560 orang di antara anggota MPR tersebut adalah mereka yang dilantik tanpa pemilihan yaitu tokoh-tokoh dan orang-orang yang mewakili wilayah seluruh Indonesia. Umumnya mereka yang dilantik tanpa pemilihan terdiri dari orang-orang dekat Soeharto. Keadaan tersebut memberikan kepastian mayoritas suara parlemen akan dikuasai oleh rezim Soeharto. Partai manapun yang akan menang pada pemilu 1971, tidak akan berdaya melawan mayoritas rezim tersebut.

Rezim Soeharto juga memerintahkan seluruh anggota dan keluarga militer dan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah (kecamatan/desa) di seluruh Indonesia berkampanye dan mendukung partai *Golkar*. Seandainya ada di antara mereka yang tidak memilih partai pemerintah, akan diberhentikan dari pekerjaan. Isu-isu kampanye partai *Golkar* adalah melaksanakan demokrasi, pembangunan dan menghancurkan *Partai Komunis Indonesia* (PKI) yang mendalangi perebutan kekuasaan yang gagal tahun 1965.

Dari seluruh pemilu (1971-1997) rezim Soeharto berusaha agar tetap melanggengkan kekuasaan. Buktinya partai *Golkar* selalu menang dan dapat mempertahankan jabatan presiden selama 32 tahun (Maret 1966-Mei 1998). Rezim ini termasuk lama berkuasa di dunia selain presiden Kuba Fidel Castro (Rauf 2000:13). Strategi politik rezim *Orde Baru* adalah menguasai mayoritas parlemen dan DPRD di setiap provinsi dan kota/kabupaten. Oleh karena itu parlemen

yang seharusnya memainkan peranan sebagai lembaga tertinggi negara yang akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.

Dari segi pemilu rakyat memilih karena takut dan dipaksa memilih *Golkar* dan penetapan kursi tidak jujur yang dilakukan oleh panitia pemilu yang dibentuk oleh pemerintah. Rezim Soeharto juga melantik ratusan anggota parlemen dari militer (ABRI) tanpa pemilihan dalam pemilu. Seluruh media masa (surat kabar, majalah, radio, dan televisi) dikawal oleh rezim sehingga tidak dapat mengkritik dengan bebas. Apabila ada media masa mengkritik pemerintah maka izin penerbitan media masa tersebut akan dicabut. Di antara media masa yang dilarang oleh rezim Soeharto waktu itu majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*. Rakyat atau pelajar dilarang melakukan unjuk rasa. Mahasiswa tidak berdaya karena dikungkung Undang-undang *Normalisasi Kehidupan Kampus* (NKK) yaitu membatasi aspirasi politik pelajar di luar kampus masing-masing. Mereka hanya boleh memasuki gerakan

organisasi kampus dan dilarang melakukan aktivitas politik (Studi Politik 2000:12).

Keadaan dan suasana perkembangan politik selama rezim *Orde Baru* berlangsung telah memberikan peluang yang amat besar kepada rezim Soeharto berkuasa secara otoriter dan menguasai seluruh institusi pemerintah. Oleh karena itu, berbagai kasus seperti hilangnya kepercayaan, mengenyampingkan Undang-undang dan membatasi partisipasi politik rakyat Indonesia (Tabel 4)

Tabel 4
Perolehan Kursi Parlemen Pemilu 1971-1997

Pemilihan Umum	Suara/Kursi Parlemen		
	<i>PPP</i>	<i>Golkar</i>	<i>PDI</i>
1971	*14,833 (96)	34,348 (236)	**5,516 (30)
1977	18,722 (99)	39,313 (232)	5,459 (29)
1982	20,871 (94)	48,334 (242)	5,919 (24)
1987	13,701 (61)	62,783 (299)	9,324 (40)
1992	16,624 (62)	66,599 (282)	14,565 (56)
1997	25,340 (89)	84,187 (325)	3,463 (11)

Sumber: Mashad 1999:7

* *PPP* adalah fusi partai Islam NU, Parmusi, PSII dan partai lain.

** *PDI* adalah fusi partai Katolik, Partai Kristen, PNI, Murba dan IPKI.

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan partai rezim Soeharto yaitu *Golkar* senantiasa menang setiap pemilu yang diadakan antara tahun 1971-1997. Ini memberikan gambaran bahwa rezim Soeharto sangat kuat yang didukung oleh militer dan pejabat pemerintah. Partai oposisi seperti *PPP* dan *PDI* tidak berdaya mengalahkan partai pemerintah tersebut.

a. Pemilu 1971

Pemilu pertama pada masa Orde Baru berlangsung pada tanggal 2 Mei 1971 yang diikuti oleh 10 buah partai politik antara lain Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin

Indonesia (Parmusi), Partai Katolik Indonesia (PKRI), Partai Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Parti), partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Golongan Karya (Golkar).

Berdasarkan tabel berikut mayoritas dimenangi oleh partai *Golkar* (62.80%). Sedangkan partai *Nahdlatul Ulama* (NU) dan *Partai Nasional Indonesia* (PNI) masing-masing memperoleh 18.67% dan 5.36% dan partai yang lain-lain mendapat di bawah 5%. Maka, sejak tahun 1971 pemerintah (*Orde Baru*) mulai menguasai parlemen dan DPRD (*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*) pada setiap peringkat Wilayah (negeri) dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Pemilu 1971 memperebutkan sebanyak 360 kursi parlemen (DPR) dan hasilnya mayoritas dikuasai partai *Golkar* (Tabel 4). Pembagian kursi partai *Golkar* sebanyak 236 kursi, *NU* (58), *Parmusi* (24), *PNI* (20), *PSII* (10), *Parkindo* (7), *PKRI* (3), dan *Parti* (2). Menurut undang-undang jumlah seluruh kursi DPR adalah 460 buah di mana sebanyak 100 kursi diperuntukkan kepada Tentara atau *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (ABRI) dan bukan Tentara (Non ABRI) tanpa pemilihan. Antara isu partai ketika itu, partai *Golkar* mengutamakan keamanan negara dan partai *Golkar* bertujuan untuk menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara yang hampir terpecah oleh perebutan kuasa yang gagal oleh *Gerakan 30 September 1965* yang diduga dilakukan oleh *PKI*. Tokoh *Golkar* yang diutamakan dalam isu kampanye pemilu tetap Soeharto sebagai Jenderal yang berjasa menumpas gerakan tersebut.

Tabel 5
Perolehan Suara dan Kursi Parlemen Pemilu 1971(Juta orang)

Partai	Pemilih	Kemenangan (%)	Jumlah Kursi
<i>Golkar.</i>	34,348	62.80	236
<i>NU.</i>	10,213	18.67	58
<i>PNI</i>	3,793	6.93	24
<i>Parmusi</i>	2,930	5.36	20

Partai	Pemilih	Kemenangan (%)	Jumlah Kursi
<i>PSII</i>	1,308	2.39	10
<i>Parkindo</i>	733	1.34	7
<i>Kiatolik</i>	603	1.10	3
<i>Parti</i>	381	0.70	2
<i>IPKI</i>	338	0.62	-
<i>Murba</i>	48	0.09	-
Jumlah	54,695	100.00	360

Sumber: Media masa

Partai yang lain (oposisi) melancarkan isu mestabilkan persatuan bangsa dan tekad melenyapkan partai *PKI* sebagai musuh utama negara. Bagi partai yang berdasar Islam isu ditambah dengan menegakkan syariat agama untuk penduduk Indonesia yang mayoritas (90%) beragama Islam. Sidang Umum parlemen *Majelis Permusyawaratan Rakyat* (MPR) pada tahun 1973 kembali memilih Soeharto menjadi Presiden masa jabatan 5 tahun berikutnya. Selain itu MPR memilih Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubowono IX, Sultan dari Yogyakarta. Artinya sampai saat tersebut Soeharto sudah menjabat Presiden selama tujuh tahun.

Setelah pelantikan presiden, pemerintah mencoba memperlemah partai-partai politik yaitu menyatukan seluruh partai yang menyertai pemilu tahun 1971 ke dalam komponen partai baru terkecuali bagi *Golkar* (UU: No. 3 Tahun 1975). Maka jumlah partai di Indonesia hanya tiga. Pada tahun 1973, partai-partai Islam disatukan menjadi *Partai Persatuan Pembangunan* (PPP) yaitu terdiri dari fusi partai *NU*, *Parmusi*, *PSII* dan *Parti*. Sedangkan partai yang bukan Islam disatukan menjadi *Partai Demokrasi Indonesia* (PDI) yaitu partai *PNI*, *Parkindo*, *Katolik*, *IPKI* dan *Murba*.

b. Pemilu 1977

Pemilu 1977 diikuti oleh tiga partai politik (*Golkar* PPP dan PDI) karena jumlah partai sudah dikurangi dari keadaan

pemilihan 1971. Hal tersebut berlanjut sampai pemilu tahun berikutnya (1982, 1987, 1992, dan 1997). Pemilu yang ketiga kali dimasa *Orde Baru* tersebut dilakukan 2 Mei 1977 dengan pemilihan 70,378.750, suara kursi yang sah 63,998.344 atau 90,93%. Partai *Golkar* mendapat 39.750.096 suara atau 62,11%. Tetapi dibanding pemilu 1971 kursi *Golkar* menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi. Sedangkan *PPP* (penggabungan partai Islam *MI*, *Parmusi Parti*, *PSII*) mendapat kenaikan suara di beberapa daerah, bahkan di Jakarta dan Aceh *PPP* menang mayoritas dan mengalahkan partai *Golkar*.

Pada tingkat pusat *PPP* dapat 99 kursi atau naik 2,17% atau bertambah 5 kursi. Kenaikan suara *PPP* karena banyak didukung tokoh bekas partai Islam *Masyumi* yang telah bergabung dengan *PPP* tetapi menurun di daerah bekas partai *NU* di Jawa Timur. Ini karena pemimpin dan pendukung *NU* kecewa dengan kerja pemimpin *PPP*. Perpecahan di antara komponen partai telah menyebabkan berkurangnya kursi pada pemilu 1977. Namun partai *PPP* dapat menambah 17 kursi parlemen dari kawasan Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi sebaliknya kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi partai tersebut hanyalah 5 kursi.

Partai *PDI*, dari segi komponen (1971) memperoleh kursi yang merosot (29 kursi) yaitu kehilangan satu kursi. Banyak anggota partai komponen tersebut yang memilih partai lain. Pembagian kursi partai pemilu 1977 dapat ditunjukkan Tabel 6. Pemilu 1977 berlangsung dalam suasana persaingan sengit antara *Golkar* dan *PPP* di beberapa kawasan provinsi.

Partai *Golkar* dalam kampanye pemilu tersebut melancarkan program pembangunan ekonomi dan keamanan negara dan melaksanakan dasar negara *Pancasila*. Selain itu, partai pemerintah tersebut mengisukan bahwa pemimpin partai *Golkar* adalah paling berjasa menumpas Gerakan 30 September/PKI di Indonesia, yaitu usaha perebutan kekuasaan yang gagal di negara tersebut yang didalangi partai komunis.

Partai *PPP* gabungan dari bekas partai Islam (1971) berkampanye dengan isu persatuan dan praktik agama (Islam) yang betul serta slogan anti ajaran komunis dan partai terlarang dan (PKI) adalah musuh utama penganut Islam. Partai berlogo Kakkah tersebut melancarkan program pembinaan sikap dan kepribadian (akhlak) yang mulia bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan *PDI* melancarkan isu kampanye partai akan berjuang mengembangkan sistem demokrasi yang benar di Indonesia tanpa membedakan berbagai kaum, penganut agama dan daerah asal warganegara Indonesia dengan praktik dasar negara *Pancasila*.

Tabel 6. Perolehan Kursi Pemilu 1977

Partai	Suara	%	Kursi	1971	Ket
1. Golkar	39,750,096	62.11	232	62.80	0.69
2. PPP	18,743,491	29.29	99	27.12	+ 2.17
3. PDI	5,504,757	8.60	29	10.08	1.48
Jumlah	63,998,344	100.00	360	100.00	

Sumber: Media Maasa

c. Pemilu 1982

Pemilu 1982 diadakan pada 4 Mei 1982 dengan 75 juta pemilih. Partai *Golkar* pada tingkat pusat mayoritas menang lagi (242 kursi). Di kawasan Aceh, Jakarta, dan Kalimantan Selatan yang pernah dikuasai *PPP* berhasil diambil *Golkar* dan dapat menambah 10 kursi parlemen. Sebaliknya partai *PPP* dan *PDI* telah kehilangan masing-masing 5 kursi. Keadaan pembagian kursi yang dimaksud ditunjukkan Tabel 7. Artinya, kursi parlemen mayoritas dikuasai oleh partai pemerintah.

Tabel 7. Perolehan Kursi Pemilu 1982

Partai	Suara	%	Kursi	1977	Ketr
1. <i>Golkar</i>	48,334,724	64.34	242	62.11	+ 2.23
2. <i>PPP</i>	20,871,880	27.78	94	29.29	- 1.51
3. <i>PDI</i>	5,919,702	7.88	24	8.60	- 0.72
Jumlah	75,126,306	100.00	360	100.00	

Sumber: Media Maasa

Isu utama partai *Golkar* ketika itu pembangunan negara yang berkelanjutan, memepertahankan dasar negara *Pancasila*, dan meneruskan kepemimpinan negara yang dipimpin *Orde Baru* (*Golkar*). Pada saat itu pula Presiden Soeharto dilantik oleh parlemen sebagai *Bapak Pembangunan Indonesia*. Partai yang menguasai pemerintah sejak tahun 1971 tersebut di masa kampanye pemilu mengisukan agar rakyat tidak memilih partai tertentu karena partai politik tidak sesuai di Indonesia. Dituduhkan bahwa partai politik sejak dahulu sebagai dalang perpecahan bangsa yang pernah berlaku pada tahun 1948 dan 1965 oleh perebutan kekuasaan yang gagal oleh partai komunis (*PKI*) dan perebutan jabatan kabinet yang mengganggu keamanan negara pada masa awal kemerdekaan dan setelah pemilihan tahun 1955. *Golkar* mengisukan seandainya partai politik (maksudnya *PPP* dan *PDI*) menang keadaan negara akan mundur seperti dahulu. Maka, rakyat seharusnya tidak memilih partai politik kecuali partai *Golkar*. Sejak pemilihan pada tahun 1971 *Golkar* tidak pernah menggunakan nama partai politik di logonya untuk memberikan kesan tidak mau berpolitik, ringkasnya *Golongan Karya* (*Golkar*) saja.

PPP dan *PDI* berkampanye dengan isu seperti pemilu terdahulu. Isu *PPP* konsisten memperjuangkan kehidupan masyarakat berdasarkan Islam. Sedangkan *PDI* berjuang menegakkan demokrasi yang benar yang berdasarkan dasar negara *Pancasila*. Namun, isu kampanye kedua partai tersebut kalah bersaing dengan kampanye *Golkar* yang meluas di pelosok Indonesia. Partai *Golkar* akhirnya mayoritas memenangi pemilu tersebut.

d. Pemilu 1987

Pemilihan diadakan pada tanggal 23 April 1987 diikuti oleh 85.869.816 pemilih. Partai *PPP* mendapat kekalahan besar di seluruh pelosok yang kehilangan 33 kursi. Penyebab merosotnya jumlah kursi partai Islam tersebut karena *PPP* mendapat tekanan kuat dari pemerintah dan tidak dibenarkan memakai dasar partai

kepada Islam dan harus menukarnya dengan *Pancasila*. Selain itu, logo partai yang asalnya Ka'bah diganti dengan salah satu logo yang ada di dalam gambar logo negara burung Garuda. Maka, logo Kakbah berganti gambar Bintang. Sedangkan faktor perpecahan internal yaitu tokoh-tokoh bekas partai *NU* yang semula memilih *PPP* di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak lagi mendukung partai tersebut karena dikecewakan oleh elit partai *PPP* yang lain. Sebaliknya partai *Golkar* dapat keuntungan dengan bertambah kursi (53) dan keseluruhan menjadi 299 kursi untuk parlemen. Sedangkan partai *PDI* juga dapat tambahan 30 kursi. Partai *PDI* beruntung karena pemerintah berkuasa memberikan peluang kepada ketua partai tersebut (Suryadi) berkampanye untuk membujuk pemilih mendukung *PDI*. Pada saat itu partai mendapat kebebasan dari rezim berkuasa untuk berkampanye. Tabel 8 berikut dapat dilihat perolehan suara ketiga partai.

Tabel 8
Perolehan Kursi Pemilu 1987

Partai	Suara	%	Kursi	Thn 1982	Keterangan
1. <i>Golkar</i>	62,783,680	73.37	299	66.34	+ 7.02
2. <i>PPP</i>	13,701,428	16.01	61	25.78	9.77
3. <i>PDI</i>	9,804,708	10.61	40	7.88	- 2.73
Jumlah	85,869,816	100.00	400	100.00	

Sumber: Media Massa

Sebagaimana isu kampanye pemilihan 1982, partai *Golkar* semakin kuat melancarkan isu bahwa pembangunan negara adalah berkat penguasaan pemerintah *Orde Baru* atau *Golkar*. Ekonomi negara pada ketika itu meningkat dan pembangunan sektor-sektor publik seperti jalan, jembatan, sekolah, gedung dan sebagainya berlangsung pesat di Indonesia. Selain itu suasana harmonis antara kaum dan suku terjalin baik. Isu seperti tersebut menjadi tema kampanye *Golkar*.

Sedangkan *PPP* pada pemilihan 1987 terpaksa mengganti logo partai dari Kakbah menjadi bintang karena parlemen mengeluarkan Undang-undang sistim partai politik baru yang

tidak membenarkan partai politik berdasarkan partai menurut agama atau ajaran tertentu kecuali dasar tunggal adalah *Pancasila*. Dampak perubahan dasar partai kepada *Pancasila* telah menimbulkan kesulitan bagi partai (*PPP* dan *PDI*) mencari isu kampanye yang terbaik. Kedua partai itu akhirnya melancarkan isu pemerintah yang bersih dan adil di Indonesia. Antara isu lain ketika itu setiap pemimpin berakhlak baik, maka penguasaan negara juga akan baik dan korupsi uang negara dapat dicegah.

e. Pemilu 1992

Pada pemilihan 9 Juni 1992 dukungan partai pemerintah (*Golkar*) merosot 5.06% atau kehilangan 17 kursi parlemen. *PDI* bertambah 16 kursi dan *PPP* satu kursi parlemen seperti yang dipaparkan pada Tabel 9 berikut. Krisis dukungan partai *Golkar* mulai mengapung karena masyarakat ingin menukar pemerintah yang sudah lama dikuasai *Golkar* dan membenci Soeharto dan elit partai *Golkar* yang berkuasa secara otoriter.

Tabel 9
Perolehan Kursi Pemilu 1992.

Partai	Suara	%	Kursi	Thn 1987	Keterangan
1. <i>Golkar</i>	66,599,331	68.10	282	73.16	- 5.06
2. <i>PPP</i>	16,624,647	17.01	62	15.97	+ 1.04
3. <i>PDI</i>	14,565,556	14.89	56	10.87	+ 4.02
Jumlah	97,789,534	100.00	400	100.00	

Sumber: Media Maasa

Mengusung tema kampanye pemilu ketika itu partai *Golkar* akan memperjuangkan ekonomi negara yang stabil dan keamanan yang terjamin dengan tetap mempertahankan kepemimpinan negara oleh *Orde Baru* (Soeharto). Partai *PPP* melancarkan penyelenggaraan negara yang harus adil dan jujur. Sedangkan *PDI* memperjuangkan *wong cilik* (rakyat jelata) keluar dari penderitaan hidup yang sengsara.

Partai alternatif yang populer di kalangan rakyat ketika itu partai *PDI* dan banyak mencalonkan wakil rakyat dari tokoh-

tokoh populer seperti korporat, bekas pensiunan pejabat dan lain-lain. Partai *PDI* mendapat dukungan pemilihan di kota-kota besar di pulau Jawa, kota Medan, Palembang dan kawasan Indonesia timur. Sedangkan Partai *PPP* juga mencalonkan tokoh berwibawa khusus dari tokoh Islam, pendukung partai banyak dari kota Jakarta dan penduduk beragama Islam dari kota dan luar kota terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

f. Pemilu 1997

Pemilu diadakan pada 29 Mei 1997. Partai *Golkar* yang merosot pada tahun 1992 bangkit kembali di seluruh kawasan negeri, begitu juga dengan *PPP*. Partai pemerintah dapat menguasai kembali 43 kursi parlemen dan memperoleh mayoritas kursi 74.51 % atau meningkat dibanding pemilihan 1992. Partai *PPP* juga menambah kursi (27) atau mayoritas kursi bertambah 5.43%. Pendukung *PPP* di Jawa Timur yang pernah meninggalkan partai tersebut kembali memilih *PPP*. Pada beberapa kawasan lain di Indonesia memilih *PPP* juga turut bertambah. Sebaliknya partai *PDI* mengalami kekalahan drastis dan 45 kursi parlemen terlepas karena kursi yang diperoleh merosot sebanyak 11.84% ini terjadi rata-rata di seluruh Indonesia.

Antara isu kampanye yang dilancarkan partai *Golkar* mengisukan pembangunan Indonesia menuju negara maju dengan teknologi canggih. Sedangkan *PPP* dan *PDI* melancarkan isu pemerintah yang bersih berwibawa. Terutama *PDI* menawarkan isu pembinaan martabat generasi muda dan rakyat ke arah generasi maju dan hidup sejahtera.

Tabel 10
Perolehan Kursi Pemilu 1997

Partai	Suara	%	Kursi	Thn 1992	Ket.
1. <i>Golkar</i>	84,187,907	74.51	325	68.10	+ 6.41
2. <i>PPP</i>	25,340,028	22.43	89	17.00	+ 5.43
3. <i>PDI</i>	3,463,225	3.07	11	14.90	- 11.83
Jumlah	12,991,160	100.00	425	100.00	

Sumber: Media Massa

PDI mengalami kekalahan karena partai terpecah dua sebelum pemilu 1997 dilangsungkan yang dipimpin oleh dualisme Suryadi dan Megawati Soekarnoputeri. Pada masa berkampanye kedua tokoh berusaha untuk saling menjatuhkan dan banyak pendukung *PDI* kebingungan sehingga banyak pula berubah memilih partai lain seperti *Golkar* atau *PPP*.

Namun, pemilu yang terakhir diselenggarakan pada masa *Orde Baru* tersebut adalah termasuk paling banyak mendapat protes dari berbagai daerah di Indonesia karena dianggap tidak adil dan tidak jujur seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura. Puluhan kotak suara pemilih dibakar oleh mereka yang tidak puas atas kecurangan yang memihak kepada partai pemerintah. Ada di beberapa kawasan pemilihan terpaksa pemilu dilakukan kembali tetapi pendukung partai seperti *PPP* tidak mau memilih dan *Golkar* akhirnya dinyatakan memenangi dengan mayoritas di kawasan bermasalah itu.

Kecurangan penyelenggaraan pemilu 1997 dan kesediaan Soeharto dilantik kembali menjadi Presiden untuk yang keenam kalinya telah menimbulkan suasana politik di Indonesia menjadi panas. Demonstrasi terjadi di berbagai tempat, media masa berani memberikan kritik terhadap kekuasaan rezim *Orde Baru*. Sejak itu rezim yang berkuasa mendapat tekanan dari seluruh rakyat dan akhirnya dijatuhkan oleh puncak demonstrasi yang hebat di Indonesia dan rezim Soeharto tumbang 23 Mei 1998.

g. Pemilu 1999 (Era Reformasi)

Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 telah mengakhiri kekuasaan rezim *Orde baru* di Indonesia. Menurut Rauf (2000:16-17) ada beberapa faktor Soeharto tumbang dari kekuasaannya. *Pertama*, adanya unjuk rasa yang meluas di seluruh Indonesia ingin menjatuhkan kekuasaan Soeharto. Mereka terdiri dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada 18 Mei 1998, mereka telah menguasai bangunan parlemen (MPR) di Jakarta dan mendesak agar parlemen memecat Soeharto dari jabatan Presiden. Unjuk rasa yang meluas ketika itu menimbulkan pula huru-hara,

pembakaran dan merusakkan bangunan-bangunan milik pemerintah di beberapa kota Indonesia.

Kedua, sebanyak 14 orang menteri kabinet Soeharto tidak mau dilantik sebagai menteri yang diminta Soeharto duduk dalam kabinet *reformasi*. Soeharto merasa diri sudah ditinggalkan sendiri oleh para pendukungnya. Sedangkan *terakhir*, militer yang selama 32 tahun mengawal pemerintah rezim Soeharto ketika itu telah meninggalkan Soeharto dalam keadaan panik. Dengan demikian, maka Soeharto merasa sudah dilupakan pendukung dan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Burchanuddin Jusuf Habibie.

Setelah *Orde Baru* tumbang, *Orde Reformasi* lahir pada 22 Mei 1998. Presiden Habibie yang memimpin negara telah merubah undang-undang era Soeharto khususnya di bidang politik, pemilu, kedudukan lembaga parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat/Daerah, dikenal sebagai Undang-undang nomor 2, 3, dan 4 tahun 1999. Oleh karena itu, peluang seluruh rakyat untuk mendirikan partai politik terbuka untuk mengikuti pemilu yang dipercepat. Pemilu yang dicanangkan tersebut dimaksudkan untuk mengganti seluruh institusi pemerintah yang masih mempunyai sisa-sisa rezim *Orde Baru*. Maka, ratusan partai telah mendaftar, akan tetapi yang memenuhi syarat dilaporkan sebanyak 48 partai yang akan bertanding. Di antara partai-partai tersebut didapati bekas partai yang pernah didirikan dimasa kolonial dan di masa kemerdekaan (era *Orde Lama* dan *Orde Baru*) seperti partai *Masyumi*, *PSII*, *Partai Katolik*, *PNI*, *IP-KI*, *Murba*, dan lain-lain .

Untuk menyelenggarakan pemilu yang dimaksud, suatu Jabatan Kuasa Pemilu didirikan terdiri dari orang-orang partai dan pegawai pemerintah. Pemilu dikawal dengan melibatkan seluruh rakyat dan lembaga-lembaga pengawas antara bangsa. Pejabat pemerintah dan tentara yang mendukung partai *Golkar* (*Orde Baru*) harus bersikap netral. Untuk Pegawai pemerintah yang ingin dipilih, ia harus meletakkan jabatan dan keluar dari pemerintahan atau tentara. sedangkan tentara yang dilantik tanpa

pemilihan seperti saat *Orde Baru*, dikurangi jumlahnya dan hanya dibenarkan 10% pada tingkat perwakilan di daerah dan 38 kursi diperuntukan untuk parlemen.

Maka pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu telah diadakan diikuti oleh sebanyak 48 buah partai politik, termasuk partai bekas rezim *Orde Baru* yaitu *Golkar*, *PPP* dan *PDI*. Gambar partai-partai dimaksudkan ditunjukkan di dalam lampiran. Ringkasnya partai-partai politik yang bertarung sebagai berikut:

1) Partai Indonesia Baru (PIB)

Partai Indonesia Baru adalah menggunakan dasar Pancasila, didirikan pada 18 Agustus 1999 di Jakarta, Ketua Umum PIB adalah Drs. H Mohamad Syaiful Anwar dan Sekretaris yaitu Drs. H Zakiruddin Djamin SH, MM. Partai mempunyai manifesto untuk mengembangkan persatuan nasional yang harmonis dan praktik agama untuk menjalankan kekuasaan pemerintah. Partai didirikan di atas kesepakatan mantan-mantan anggota dari 9 buah partai politik yang belum diresmikan yaitu *Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia*, *Partai Kesatuan Umat Indonesia*, *Partai Perjuangan Amanat Rakyat Indonesia*, *Partai Amanat Rakyat Madani*, *Partai Indonesia Raya*, *Partai Penyantun Perkembangan Islam*, *Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiah*, *Partai Aliansi Rakyat Miskin* dan *Partai Kepentingan Rakyat*.

2) Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna)

Partai *Krisna* didirikan oleh Clara Sitompul dan Raden Didiek Soegito SH pada 20 Mei 1998 di Jakarta. Walaupun dasar partai adalah Pancasila yaitu terbuka peluang bagi setiap rakyat Indonesia menjadi anggota atau anggota partai yang berbeda-beda kaum dan agama yang dianut. Namun visi partai kebanyakan diwarnai oleh ajaran agama Kristen. Partai *Krisna* berpendirian bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) masih diperlukan bagi keseimbangan pembangunan negara dan ABRI tidak dibenarkan berpolitik.

3) Partai Nasional Indonesia Supeni (PNI-Supeni)

Visi *PNI-Supeni* adalah bertekad untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan menolak pencanangan negara bersistem federal (persekutuan). Partai berdasar Pancasila dan berjuang pula untuk membela rakyat yang tertindas oleh siapapun dan bersama-sama menghormati undang-undang. Ketua partai adalah Supeni dan Sekretaris partai yaitu IM Sunarka. *PNI-Supeni* didirikan pada 20 Mei 1998.

4) Partai Aliansi Demokrat Indonesia (Padi)

Partai ini didirikan oleh orang-orang yang terdiri dari pengajar, para cendekiawan, dan tokoh-tokoh organisasi di dalam masyarakat yang umumnya belum pernah aktif dalam partai politik. Visi partai adalah pendidikan bagi rakyat miskin dan orang yang tidak bekerja akibat diberhentikan sebagai buruh serta memajukan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena kemiskinan. Partai Padi didirikan pada 23 Mei 1998. Ketua dan Sekretaris Padi adalah H Mohammad Bambang Sulistomo SIP dan Drs. Harry Ganda Asi.

5) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)

Dasar partai *KAMI* adalah Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, didirikan di Tangerang Jawa Barat pada 29 Agustus 1998. Manifesto partai adalah meningkatkan peranan orang Islam Indonesia untuk membangun negara Republik Indonesia berdasarkan agama Islam, juga menjalankan dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketua Umum dan Sekretaris Umum partai adalah, Drs. H Syamsahril S.H, M.M dan Djamhari Maskat.

6) Partai Umat Islam (PUI)

Partai Umat Islam didirikan berdasarkan keinginan mengembangkan ajaran Islam yaitu memadukan antara hidup berajaran Islam dan kehidupan sosial ekonomi bermasyarakat. Walaupun visi *PUI* tidak ingin membangun sebuah negara Islam

di Indonesia, tetapi praktik Islam seperti yang pernah dijalankan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin negara seperti di kota Madinah akan dijalankan di sini. *PUI* diketuai oleh Prof. Dr. Deliar Noer dan Sekretaris adalah Fahmi Rahman. Didirikan di Jakarta pada 26 Juni 1998.

7) Partai Kebangkitan Ummat (PKU)

Partai *PKU* didasarkan kepada *Pancasila dan Akidah Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah* yang didirikan oleh sekelompok anggota dan tokoh *Nahdlatul Ulama* untuk mengembangkan ajaran politik negara. Walaupun tidak menginginkan mendirikan negara Islam di Indonesia, para pendiri partai *PKU* mencetuskan visi praktik Islam untuk perubahan Undang-undang negara dengan pengamalan Islam yang benar untuk rakyat Indonesia. Partai juga tidak melarang dasar negara Pancasila sebagai rukun negara. Partai *PKU* didirikan di Jombang Jawa Timur pada 25 Oktober 1998. Ketua Umum dan Sekretaris Umum *PKU* masing-masing adalah KH Yusuf Hasyim dan Drs. Asnawi Latief.

8) Partai Masyumi Baru

Partai ini adalah bekas organisasi *Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia* tahun 1950-an. Salah satu visi partai adalah berdasar Islam Modern, memajukan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melaksanakan *Trias Politica* untuk pemerintahan negara. Partai Masyumi Baru juga sebagai pengembang persatuan berbagai kaum dan penganut agama yang berlainan di Indonesia. Partai didirikan pada 28 Oktober 1995 di Jakarta. Ketua Umum adalah Drs. Ridwan Saidi dan Sekretaris Umum yaitu H. Fairuz Basyar.

9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai *PPP* adalah didirikan pada 5 Januari 1973 di Jakarta, diketuai oleh Dr. Hamzah Haz dan Sekretaris yaitu H Alimarwan Hanan, S.H. Ketika didirikan *PPP* berdasar Pancasila dan di era Reformasi telah menukar kembali kepada dasar Islam. Partai *PPP* kembali didirikan yang terdiri dari persatuan beberapa buah

partai-partai Islam antara lain adalah *Partai Nahdlatul Ulama*, *Partai Muslimin Indonesia*, *Partai Syarikat Islam Indonesia*, *Partai Islam Parti*. Visi *PPP* yang paling utama adalah dasar Islam untuk membangun demokrasi Indonesia yaitu praktik *akhlakul karimah*.

10) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

Menurut sejarah, *Partai Syarikat Islam Indonesia* adalah berasal dari mantan anggota *Syarikat Dagang Islam* (SDI) yang didirikan di Solo tahun 1905. Mantan anggota SDI tersebut mendirikan Partai PSII di Jakarta pada 29 Mei 1998. Terpilihlah H Taufik R Tjokroaminoto dan Ir. H Amaruddin Djadjasubita sebagai ketua dan sekretaris partai tersebut.

Visi *PSII* antara lain adalah menjaga hubungan yang harmonis antara orang Islam dengan penganut agama dan kaum yang lain. Partai berusaha untuk bekerjasama dengan semua pihak di negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

11) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Partai *PDI-P* didirikan 10 Januari 1973 , pertikaian di antara anggota dan elit partai *PDI* pada tahun 1996 telah menjadikan partai terbelah dua. Budi Hardjono pada kongres *PDI* di Medan 20-21 Juni 1996 tidak mengakui Megawati sebagai Ketua Umum partai tersebut. Pendukung Megawati juga bersama-sama mengadakan kongres di Bali pada Oktober 1998 dan menambahkan kata "Perjuangan" di belakang nama *PDI* yang ketuanya tetap tidak berubah yaitu Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Alexander Litaay.

Partai *PDI* memiliki visi yaitu mengembangkan sosial demokrasi negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dicetuskan pada awal kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

12) Partai Abul Yatama (PAY)

Partai Abul Yatama adalah di antara partai yang visi utamanya adalah memperjuangkan kebaikan anak-anak yatim

agar dapat hidup selayaknya dan memperoleh pendidikan yang wajar. Pada awalnya partai tersebut adalah berbentuk sebuah Yayasan yang didirikan di Aceh pada tahun 1979. Setelah rezim Soeharto, *yayasan Abul Yatama* (Bapa anak Yatim) didirikan menjadi sebuah partai di Jakarta 7 Januari 1999. Ketua Umum partai adalah Dr. H Rusli Bintang dan sekretaris Drs. Agustus Suarman Sudharsa.

13) Partai Nasional Merdeka (PKM)

Didirikan oleh KH. Zaini Ahmad Noeh (Ketua dan Cornelius Ronowidjojo (sekretaris) berdasarkan 9 buah kelompok yang berasal dari kelompok orang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Penganut Kepercayaan, orang Cina, Arab dan India, wiraswasta serta kaum perempuan. Visi partai PKM adalah persamaan hak dan kewajiban bagi segenap rakyat Indonesia untuk hidup secara wajar tanpa membedakan kaum, agama, etnis, dan sebagainya.

14) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)

Partai PDKB didirikan oleh mantan anggota partai Golkar yang merasa tidak sesuai dengan partai tersebut. Visi PDKB adalah memperkokoh demokrasi, hak dasari manusia dan kesejahteraan hidup. Walaupun dasar partai adalah Pancasila, tetapi para anggota kebanyakan adalah orang-orang beragama Kristen dan kaum Cina. Ketua partai adalah Prof. Dr. Manase Malo dan sekretaris yaitu Seto Harianto. Partai didirikan pada 3 Agustus 1998 di Jakarta.

15) Partai Amanat Nasional (PAN)

Organisasi *Partai Amanat Nasional* (PAN) berawal dari organisasi *Majelis Amanat Rakyat* (MARA) yaitu termasuk dalam salah satu kelompok barisan reformasi Indonesia yang diketuai Prof. Dr. Amien Rais. Sebanyak 50 orang tokoh pusat bersepakat mendirikan PAN di Bogor pada 5 Agustus 1998, awalnya diberi nama *Partai Amanat Bangsa* (PAB), kemudian ditukar menjadi *Partai Amanat Nasional* (PAN). Di antara visi terpenting partai PAN

adalah mengembangkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan, dan keagamaan.

16) Partai Rakyat Demokrasi (PRD)

Visi partai *PRD* yang didirikan di Jakarta pada 22 Juli 1996 adalah mengembangkan demokrasi dan meninggikan mutu kedaulatan rakyat. Organisasi partai ketika rezim Soeharto tersebut penuh dengan hambatan. Ketua *PRD* Budiman Sudjatmiko oleh rezim Soeharto dianggap musuh yang sangat berbahaya dan ditahan di penjara.

17) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905)

Organisasi Partai PSII 1905 didasarkan kepada SDI (Syarikat Dagang Islam) yang ada tahun 1905. Di masa Orde Lama PSII menjadi komponen *Partai Persatuan Pembangunan* (PPP). Pada 21 Mei 1998, PSII didirikan kembali dengan Visi partai adalah persatuan orang-orang Islam dan menjalankan ajaran agama Islam secara luas. Ketua dan sekretari *PSII 1905* adalah Drs. H. Ohan Sudjana dan Ir. Paka Chairi.

18) Partai Katolik Demokrasi (PKD)

Visi partai *Kristen Katolik* ini adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita yang tertinggi. Di samping itu, orang Katolik harus memiliki hak yang sama dengan penganut-penganut agama yang lain di Indonesia. *PKD* berjuang berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, adil, bebas, bersaudara, dan damai. Ketua dan sekretaris partai yaitu Drs. Marcus Mali dan Nirwan Sembiring.

19) Partai Pilihan Rakyat (PILAR)

Visi politik *partai PILAR* yang didirikan pada 16 Juni 1998 adalah menyelamatkan negara demokrasi dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Visi sedemikian dibuat karena selama masa Orde Baru kedaulatan rakyat tidak ada dan *PILAR* berusaha untuk tujuan itu. RO Tambuna dan Fachrudin Hasan adalah sebagai ketua dan sekretaris partai tersebut.

20) Partai Rakyat Indonesia (PARI)

Didirikan pada 22 Mei 1998 dengan visi yaitu mengutamakan demokrasi negara, meningkatkan mutu ekonomi rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat. Partai juga mendesak diadakan perubahan undang-undang yang pernah dibuat di masa rezim-rezim yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Ketua partai adalah Agustus Miftah dan sekretaris Michele Purwanto.

21) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) didirikan di Jakarta 28 Agustus 1998 yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Partai ini pernah dilarang oleh rezim Soekarno. Visi politik *Masyumi* adalah menjalankan ajaran (syariat) Islam dan undang-undang Islam bagi kehidupan masyarakat dan menjalankan pemerintahan negara. Ketua dan sekretaris partai adalah Abdullah Hehamahua, M.Sc dan Sayuti Rahawarin.

22) Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai *PBB* didirikan oleh mantan anggota-anggota partai Masyumi adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Visinya adalah modernisasi ajaran Islam bagi praktik hidup di dunia dan akhirat. *PBB* berusaha agar Undang-undang dasar 1945 diubah dan mengembangkan wilayah (propinsi) di Indonesia menjadi 40 buah dan membentuk daerah Istimewa di Aceh, Yogyakarta, dan Bali. Ketua dan sekretaris partai *PBB* adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc dan MS. Ka'ban, S.H, M.Sc.

23) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)

Partai didirikan pada 13 Juni 1998 oleh Dr. H Rasyidi dan Drs. H Rahmat Ismail, M.M. Visi politik *PSPSI* adalah berjuang untuk mengangkat martabat para buruh dan pekerja yang tidak mendapat keadilan, hak berpolitik dan menaikkan gaji buruh yang sangat rendah. Partai tersebut juga mengutamakan agar para buruh dilatih secara militer bagi menjaga keselamatan negara.

24) Partai Keadilan

Partai Keadilan memiliki akar rumput dari kalangan orang-orang Islam didirikan oleh para cendekiawan Islam dengan dasar utama ajaran Islam. Visi politik adalah memperkuat kedudukan negara persatuan Indonesia (Republik). Untuk mencerdaskan rakyat partai mencanangkan untuk mewujudkan *masyarakat madani (civil society)*

25) Partai Nahdlatul Ummat (Partai NU)

Partai NU berdasar kepada *Pancasila* dan ajaran Islam didirikan oleh anggota-anggota organisasi *Nahdlatul Ulama* pada tanggal 16 Agustus 1998 di Jakarta. Visi politik *Partai NU* adalah mengutamakan ajaran Islam di dalam pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. Ketua dan Sekretaris partai adalah KH Syukron Makmun dan KH Achmad Syatari.

26) Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (FRONT MARHAENIS)

Dipimpin oleh H Probosutedjo dan Bambang Suroso dengan visi partai perjuangan untuk meningkatkan tingkat pendapatan rakyat dengan cara memperbanyak tempat bekerja. Di antara yang akan dibela adalah para petani, buruh, pedagang kecil dan pekerja. Partai didirikan pada 10 Pebruari 1998 oleh mantan anggota *Partai Nasional Indonesia* pada saat awal kemerdekaan Indonesia.

27) Partai Penyokong Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

IPKI berdasarkan partai kepada *Pancasila* dan didirikan pada 12 September 1998 di Jakarta oleh mantan pejuang dan militer yang ikut menegakkan kemerdekaan Indonesia. Di masa Orde Baru anggota *IPKI* banyak yang mendukung partai *Golkar* dan *Partai Demokrasi Indonesia*.

28) Partai Republik

Partai Republik melancarkan visi untuk menstabilkan kembali ekonomi negara yang terpuruk, memperbaiki kesalahan dalam menjalankan Undang-undang, dan mempertinggi kembali arti pemerintah yang rusak di masa rezim *Orde Baru*. *Partai Republik* didirikan di Jakarta pada 17 Agustus 1998. Ketua dan sekretaris adalah Drs. H. Syafruddin Harahap dan Drs. H.A Yani Wahid.

29) Partai Islam Demokrat (PID)

Partai PID didirikan oleh kelompok remaja *Kiara* yang berdasar pada ajaran Islam fundamentalis. Visi adalah mengangkat martabat bangsa Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, *PID* juga mengutamakan musyawarah untuk pengembangan demokrasi, menggalakkan para pengusaha, koperasi, dan mengawal pemilu yang adil.

30) Partai Nasional Indonesia Masa Marhaen (PNI-Masa Marhaen)

Partai ini berdasar Pancasila didirikan oleh mantan anggota *partai PNI* dengan visi utama adalah meningkatkan mutu sosial ekonomi rakyat jelata yang rendah, seluruh undang-undang yang diterbitkan dan dikeluarkan pemerintah semestinya harus menguntungkan semua pihak termasuk orang miskin. Didirikan di Jakarta pada 21 Mei 1998. Ketua dan Sekretaris adalah Bachtar Oscha Chalik dan FX Sumitro, S.H.

31) Partai Musyawarah Orang Banyak (MURBA)

Partai *MURBA* sudah cukup lama tidak bergiat terutama di masa rezim *Orde Baru*. Partai ini sudah didirikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun para anggota partai di masa *Orde Baru* telah bergabung dengan partai *PDI*. Didirikan kembali pada 20 Mei 1998 di Jakarta dengan visi yaitu, menggalakkan ekonomi negara, koperasi, dan undang-undang yang benar. Pendukung partai adalah para petani, buruh dan militer. Ketua

dan sekretaris partai adalah Hadidjo Nitimihardjo dan Zulfikar Kamaruddin, M.S.

32) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Menurut sejarah *Partai PDI* terdiri dari beberapa kelompok partai yang didirikan dimasa *Orde Baru* yaitu partai-partai *PNI*, *Partai Kristen Katolik*, *Partai Kristen Indonesia*, *partai MURBA*, dan *partai IPKI*. Seluruh kelompok partai pada awal era reformasi telah berdiri kembali secara sendiri-sendiri, bahkan pendukung partai *PDI* di masa *Orde Baru* telah mendirikan *PDI-Perjuangan* yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Visi *PDI* adalah bertekad menyelamatkan negara persatuan Indonesia dan tidak membenarkan negara persekutuan dan dasar partai adalah Pancasila. Partai diketua oleh Budi Hardjono, S.H dan sekretari yaitu Buttu Hutapea.

33) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Partai *GOLKAR* adalah didirikan pada 20 Oktober 1964 dan mayoritas menguasai parlemen dan pemerintah rezim *Orde Baru* atau rezim Soeharto selama 32 tahun. Pada bulan Juli 1997 suatu musyawarah besar *GOLKAR* mencetuskan *GOLKAR* dengan paradigma baru yaitu melepaskan ikatan dengan militer, pejabat pemerintah dan unsur-unsur yang selama era *Orde Baru* menjadi pendukung yang utamanya. Partai berdasarkan Pancasila dengan visi meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa membedakan kaum, agama dan daerah asal dan sebagainya. Partai *GOLKAR* pada awal reformasi secara terbuka mengeluarkan pengumuman permintaan maaf kepada bangsa Indonesia *e Baru*. Partai *GOLKAR* berdasar Pancasila dan waktu itu diketuai oleh Ir. H Akbar Tanjung dan sekretaris adalah Tuswandi.

34) Partai Persatuan (PP)

Partai *Persatuan* (PP) didirikan oleh Dr. Jaelani Naro dan beberapa orang tokoh mantan anggota *Partai Persatuan Pembangunan* (PPP). Dasar partai adalah Islam dengan visi politik menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan

mengamalkan ajaran agama. Dari segi pembangunan, *PP* mengembangkan rencana hasil bumi untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Didirikan 5 Januari 1998 di Jakarta.

35) Partai Kebangkitan Umat (PKU)

Partai PKU berdasar kepada Pancasila dan ajaran Islam, didirikan di Jakarta pada 21 September 1998. Organisasi partai oleh anggota-anggota *NU* ini bervisi mengamalkan ajaran Islam yang benar, tetapi tidak untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Ajaran Islam akan dijadikan rujukan untuk menguasai negara yang demokrasi. Ketua partai adalah KH Yusuf Hasyim dan sekretari yaitu H Asnawi Latief.

36) Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)

Partai PUDI didirikan sebelum era Reformasi yaitu pada 29 Mei 1996 di Jakarta oleh Prof. Dr. H Seri Bintang Pamungkas. Visinya adalah mencakup lima hal yaitu, pertama memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh orang banyak. Kedua, mewujudkan wilayah otonomi di seluruh kawasan Indonesia. Ketiga, merubah undang-undang parlemen. Keempat adalah menghilangkan peranan militer pada parlemen dan pemerintahan negara dan kelima adalah merubah Undang-undang Dasar 1945.

37) Partai Buruh Nasional (PBN)

Partai *PBN* didirikan oleh organisasi *Syarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)* dengan visi adalah membela para buruh yang senantiasa tertindas oleh majikan mereka dan meningkatkan gaji. Orang-orang yang tidak bekerja diupayakan mendapat pekerjaan. Partai berdasar Pancasila bercita-cita membangun negara demokrasi dan memberi keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua dan sekretaris partai adalah Tahap Simanungkalit dan Robikin Embas.

38) Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Partai MKGR)

Pada masa awal rezim *Orde Baru* MKGR adalah sebuah organisasi masyarakat dan bersama komponen organisasi yang lain mendirikan *GOLKAR* tahun 1964. Oleh karena itu, partai MKGR termasuk komponen yang besar untuk partai rezim Soeharto pada saat itu. Partai ini didirikan pada 27 Mei 1998 oleh H Mien Sugandhi dan keluar dari partai *GOLKAR*. Visi partai adalah meningkatkan mutu perekonomian rakyat dan mewujudkan pengusaha baru dari kalangan rakyat Indonesia. Dasar partai yaitu *Pancasila*.

39) Partai Daulat Rakyat (PDR)

Visi partai politik *PDR* adalah mengembangkan sistim politik yang demokrasi, sistem ekonomi yang maju dan modern bagi para pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, dan rakyat yang tartindas. Partai berdasar *Pancasila* dan didirikan di Jakarta pada 1 Januari 1999. Ketua dan sekretaris adalah Baharudin dan Dodi Guntoro.

40) Partai Cinta Damai

Partai berdasarkan *Pancasila* yang mengutamakan visi ke arah pengembangan praktik ajaran agama Islam dan mewujudkan kedamaian hidup di negara demokrasi. Partai ini didirikan di Jakarta pada 17 Oktober 1998 oleh para pengurus mesjid dari beberapa daerah di Indonesia. Ketua dan sekretaris adalah Drs. H. Iskandar Zulkarnaen, S.H dan Drs. H. Syahril Malik.

41) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

Setelah perselisihan pemikiran di dalam partai *GOLKAR*, maka beberapa orang mantan anggota partai rezim Soeharto tersebut mendirikan *PKP* di Jakarta pada 15 Januari 1998. Visi adalah berjuang untuk keadilan, kemakmuran dan mengawal persatuan bangsa Indonesia. Ketua partai adalah Jendral.(B) Edi Sudrajat dan Haryono Isman sebagai sekretaris.

42) Partai Solidariti Pekerja (PSP)

Partai yang berdasar *Pancasila* ini didirikan pada 7 Pebruari 1998 di Jakarta oleh Dr. Dedi Hamid, S.H dan Pardjaman B.Sc dan rekan-rekan dengan visi yaitu mengembangkan partisipasi politik secara keseluruhan dari rakyat Indonesia bagi mendapatkan kesejahteraan hidup, keadilan, dan kemakmuran. Pendukung partai adalah kebanyakan para pekerja dan buruh.

43) Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)

Partai telah didirikan oleh H Ir. Endrio dan Erstein Sri Rahayuningsih di Yogyakarta 30 Mei 1998 dengan dasar Pancasila. Visi politik *PNBI* adalah keadilan politik, ekonomi, undang-undang bagi seluruh rakyat dan menciptakan calon-calon pemimpin bangsa pada masa depan.

44) Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI)

Di antara visi *PBI* yaitu menciptakan masyarakat adil dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia membantu para pekerja, buruh yang dipecah majikan dan memberikan kemakmuran secara merata bagi rakyat. Ketua dan sekretaris partai adalah Nurdin Purnomo dan Harider Sing dan Eddy Djaja.

45) Partai Solidariti Nasional Indonesia (SUNI)

Partai SUNI bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kegiatan pertanian, perikanan, koperasi sebagai dasar mata pencarian. Partai ini didirikan di Jakarta pada 27 Juli 1998 oleh mantan anggota *NU* yang di ketuai oleh H Abu Hasan, MA dan Ali Fahmi. Dasar partai *SUNI* adalah Pancasila.

46) Partai Nasional Demokrat (PND)

Organisasi partai dilakukan oleh mantan anggota *PNI* dan partai *PDI* masa *Orde Baru*. Visi terpenting adalah praktik ajaran agama bagi siapapun, ajaran nasional, dan demokrasi. *PND*

berusaha membangun hak-hak politik bagi rakyat di dalam negara yang demokrasi. Partai diketuai oleh Edwin Henawan Sukowati dan sekretari adalah Eddy Syafuan.

47) Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI)

Visi *PUMI* adalah praktik ajaran Islam dan keharmonisan hidup dengan orang bukan Islam. Sebagaimana partai-partai yang lain *PUMI* juga meningkatkan mutu kehidupan rakyat jelata dan kekuasaan negara tetap berada di tangan rakyat dengan cara demokrasi. Dasar partai adalah Pancasila. Ketua dan sekretaris adalah H. Anwar Junius, S.H dan KH. Abdillah Muhammad.

48) Partai Pekerja Indonesia (PPI)

Partai PPI mempunyai visi untuk keharmonisan para pekerja dengan majikan termasuk perempuan dan meningkatkan pendapatan mereka. Partai didirikan oleh para penggiat pekerja di Indonesia. Didirikan pada 20 Mei 1998 dengan dasar Pancasila. Ketua dan sekretaris adalah H. Saleh Said Harahap dan H Salam Sumangat.

Dampak perubahan era Orde Baru kepada *reformasi* di Indonesia telah memberikan peluang rakyat bebas memilih partai yang paling disukai. Rezim Soeharto dan partai pemerintah (Golkar) dipandang oleh sebagian besar rakyat pada saat telah berakhir sebagai pemerintah autoritarian. Rakyat menginginkan perubahan kekuasaan kepada pemerintah yang baru atau partai yang lain. Megawati Soekarnoputeri yang mempelopori partai PDI (kemudian diubah menjadi PDI-P) selama waktu Orde Baru senantiasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah rezim Soeharto.

Contohnya ketika ada suatu kasus penyerbuan sekelompok orang yang merusak kantor/markas partai PDI di Jakarta tahun 1990-an diduga didalangi oleh unsur oknum rezim Orde Baru. Hal ini pula yang menambah deretan rasa prihatin masyarakat kepada PDI-P.

Megawati dianggap tokoh yang dianggap pantas menjadi pemimpin negara. Faktor tersebut diperkirakan turut menyumbangkan perolehan suara untuk kursi PDI-P. Namun, dibalik itu masih banyak pula pendukung partai Golkar masih setia dan berusaha untuk memenangkan partai mereka dan pada pemilu 1999 sehingga partai tersebut mendapat peringkat kedua setelah PDI-P.

Berdasarkan Tabel 11 mayoritas kemenangan diperoleh partai *PDI-P* (33.74%) sedangkan partai Golkar 22.44% dan PPP 10.71%. Partai baru PKB (12.61%), PAN (7.12%). Partai yang lain seperti PBB, Partai Keadilan dan lain-lain mendapat kursi kurang dari 5%. Pemilu tahun 1999 diikuti sebanyak 48 buah partai politik diantara lain termasuk partai yang mempunyai dasar islam dan dasar nasional. Pada posisi di bawah partai PDI-P dan Golkar.

Tabel 11
Perolehan Kursi Partai Pemilu 1999

Partai Politik	Jumlah Kursi (ribu)	Kursi Parlemen
1. <i>PDI-P</i>	35,689	154
2. <i>Golkar</i>	23,741	120
3. <i>PKB</i>	13,336	51
4. <i>PPP</i>	11,329	59
5. <i>PAN</i>	7,528	35
6. <i>PBB</i>	2,049	13
7. <i>PK</i>	1,436	6
8. <i>PKP</i>	1,065	6
9. <i>PNU</i>	679	3
10. <i>PDKB</i>	550	3
11. <i>PBI</i>	364	3
12. <i>PDI</i>	345	2
13. <i>PP</i>	355	1
14. <i>PDR</i>	327	1
15. <i>PSII</i>	375	1
16. <i>P1NIFront Marhaenis</i>	365	1
17. <i>PNIMasa arhaenis</i>	345	1
18. <i>IPKI</i>	328	1
19. <i>PKU</i>	300	1

Sumber: KPU 2002

E. Pemilu di Kota Bukittinggi

Pemilu sejak tahun 1971 sampai 1997 di kota Bukittinggi berlangsung sengit antara partai *Golkar* dan partai *PPP* pada tahun 1971, 1977 dan 1982. Berdasarkan rujukan Tabel 11. Pada tahun 1971 partai Islam yang kemudian bersatu menjadi partai *PPP* mayoritas menang (9 kursi) untuk memperebutkan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat atau *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Sedangkan partai *Golkar* mendapat 7 kursi. Seluruh kursi DPRD adalah 20 kursi, berdasarkan Undang-undang pemilu ketika itu empat kursi parlemen daerah kota Bukittinggi tidak diikuti dalam pemilu yaitu mewakili tentara (ABRI) 3 kursi dan satu dari golongan bukan tentara (Non ABRI). Oleh karena itu pemilu hanya memperebutkan 16 kursi dengan menggunakan sistim *proporsional*.

Sistim pemilu merebut kursi tersebut berdasarkan persentase kemenangan kursi keseluruhan kota yang dimenangkan suatu partai. Calon wakil rakyat juga akan ditentukan oleh partai pemilu menurut urutan penomoran daftar calon. Calon wakil rakyat yang menempati urutan nomor kecil seperti 1, 2, 3 dan seterusnya adalah yang paling berpeluang menjadi wakil rakyat apabila partai mereka menang pemilu. Berdasarkan Tabel 12 ditunjukkan perolehan kursi DPRD Bukittinggi pemilu 1971-1999.

Tabel 12
Perolehan kursi DPRD Bukittinggi dalam
Pemilu Orba dan Reformasi

Partai	Pemilu						
	1971	1977	1982	1987	1992	1997	1999
<i>PPP</i>	9	9	8	4	4	3	3
<i>GOLKAR</i>	7	7	8	11	11	12	4
<i>PDI</i>	-	-	-	1	1	1	2
<i>PAN</i>	-	-	-	-	-	-	5
<i>PBB</i>	-	-	-	-	-	-	2
<i>PK</i>	-	-	-	-	-	-	1
<i>PKP</i>	-	-	-	-	-	-	1

Partai	Pemilu						
	1971	1977	1982	1987	1992	1997	1999
ABRI	3	3	3	4	4	4	2
NON ABRI	1	1	1	-	-	-	-
Jumlah	20	20	20	20	20	20	20

Sumber: Kantor panitia Pemilu kota Bukittinggi 2001

Pemilu tahun 1977, terjadi persaingan ketat antara partai *Golkar* dan *PPP*. Bekas partai Islam seperti *Parmusi*, *PSII* dan *NU* konsisten memilih *PPP*. Mereka adalah para tokoh agama Islam, pengusaha, guru atau pelajar dari sekolah agama dan penduduk pendatang. Sedangkan pegawai pemerintah, anggota keluarga tentara, polisi “dipaksa” memilih *Golkar*. Partai *PPP* mayoritas menang (9 kursi), *Golkar* (7 kursi) dan *PDI* tidak mendapat kursi DPRD Bukittinggi.

Isu kampanye partai *PPP* adalah pembangunan pendidikan agama untuk semua rakyat, membangun pemerintah yang adil berdasarkan Islam dan sebagainya. Partai tersebut berlogo gambar Kakbah kiblat umat islam. Partai *Golkar* menggunakan logo pohon beringin melancarkan isu kampanye meningkatkan perkembangan pembangunan ekonomi negara, mengutamakan stabilitas keamanan negara dari ancaman partai *PKI* dan ajaran komunis. Sedangkan partai *PDI* pada pemilu yang kedua masa *Orde Baru* tersebut di Bukittinggi tidak banyak melancarkan isu kampanye dan partai *PDI* tidak berhasil mendapat kursi DPRD Bukittinggi.

Pemilu tahun 1982, kembali terjadi persaingan dua arah antara partai *PPP* dan *Golkar*. Partai *Golkar* berhasil menambah sebuah kursi dan *PPP* pun kehilangan satu kursi sehingga kedua partai masing-masingnya mempunyai delapan kursi. Hal ini karena kampanye partai pemerintah didukung tentara/polisi dan pegawai pemerintah yang bertekad mengalahkan *PPP*. Maka segala taktik dan cara dilakukan agar *Golkar* menang (Gunawan 2000: 37). Sedangkan pemilu tahun 1987 partai *PPP* sekali lagi mengalami kekalahan dan *Golkar* mayoritas menang. *PDI* untuk kali pertama mendapat sebuah kursi. Banyak pemilih di kota

Bukittinggi dipaksa dan disuruh rezim berkuasa memilih *Golkar*. Kampanye partai *Golkar* bertemakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Sedangkan *PPP* melancarkan isu kampanye partai anti korupsi pemimpin berwibawa dan dasar Islam dalam pemerintahan. *PPP* sulit berkampanye, pendukung partai takut datang berkampanye karena anggota partai *PPP* mendapat tekanan aparat dan pengurus *Golkar* setempat. Oleh karena itu mereka tidak bebas berkampanye dan bahkan ada yang terpaksa memilih partai pemerintah.

Dari observasi/survey dan wawancara dengan Datuk Rajo Mangkuto tokoh partai *PPP* menyatakan bahwa pemerintah dan pegawai Pemilu di Bukittinggi tidak memberikan kerjasama untuk berhasilnya kampanye partai. Kampanye *PPP* senantiasa dibatasi dan polisi tidak memberikan izin kampanye di tempat tertentu yang dianggap dapat menambah jumlah pemilih *PPP*. Pada saat ini banyak pemilih yang tidak jelas yang memilih di seluruh kota. Pegawai/pejabat pemilu pun menghitung pemilih tidak jujur, di tempat perhitungan banyak kasus kesaksian pihak partai tidak terwakili sewajarnya sehingga merugikan *PPP* dan *PDI*. Pemilu 1987 mayoritas kursi dimenangkan *Golkar* (11), *PPP* (4) dan *PDI* (1). Maka sejak masa tersebut partai *Golkar* semakin menguasai sepenuhnya *DPRD* Bukittinggi.

Pada tahun 1992 pemilu diadakan kembali, partai *Golkar* semakin berjaya menang mayoritas dengan menggunakan taktik dan cara yang tidak adil. Sekali lagi partai pemerintah tersebut dapat menambah sebuah kursi dan keseluruhan menjadi 12 kursi *DPRD*. Partai *PPP* justru mengalami kehilangan satu kursi. Sedangkan *PDI* dapat mempertahankan kursi mereka adalah sebuah kursi yang dapat sejak pemilihan 1987.

Suasana pemilu di kota Bukittinggi tahun 1992 menurut pandangan Sutan Mudo pengusaha Bukittinggi tidak berbeda dengan pemilu yang lampau, karena rezim pemerintah yang berkuasa semakin kuat kedudukannya. Cara-cara yang tidak adil

terhadap partai pembangkang masih tetap terjadi untuk memenangkan partai *Golkar*.

Pemilihan tahun 1997 yaitu akhir rezim *Orde Baru* berkuasa dilaporkan dikursi sebanyak 53.103 orang. Secara keseluruhan partai *Golkar* menang mayoritas sebanyak 80.54%, *PPP* sebanyak 18.65 % dan *PDI* memperoleh kursi hanya sebanyak 0.81%. Pendukung paling banyak partai *Golkar* berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (84.13%) di Kecamatan Guguk Panjang yaitu pusat pasar Bukittinggi (77.31%). Hal ini karena partai *Golkar* mendapat persaingan dari *PPP* Guguk Panjang mendapat kursi melebihi 21%. Umumnya penduduk yang berada di kecamatan tersebut adalah pengusaha dan pedagang yang banyak menjadi pendukung *PPP*. Pengusaha dan pedagang tidak puas terhadap pelayanan pemerintah untuk membangun perdagangan di pasar Bukittinggi. Mereka ingin pemerintah kota diganti. Tetapi usaha mereka gagal karena partai pemerintah lebih kuat. *PDI* dari seluruh Kecamatan mengalami kekalahan rata-rata mendapat kursi kurang dari 1%. Dengan demikian jelas basis utama partai *Golkar* berada di Aur Birugo Tigo Baleh. Sedangkan *PPP* di Guguk Panjang pada pemilu 1997.

Manakala pemilu tahun 1999 saat *Reformasi* diikuti oleh 48 buah partai politik. Suasana pada saat ini berbeda dengan masa pemilu era *Orde Baru*. Partai politik diberikan kebebasan berkampanye dan rakyat mendapat jaminan memilih bebas. Kampanye partai ada dimana-mana seperti di lapangan terbuka, di gedung dan tempat strategis di kota dan penduduk banyak datang berkampanye. Sedangkan media masa cetak dan elektronik digunakan setiap partai untuk menyampaikan program politik.

Khusus partai lama seperti *Golkar*, *PPP* dan *PDI* kembali mendaftar untuk pemilu. Dua partai tersebut telah merubah tanda gambar (logo) partai adalah *PPP* merubah gambar bintang kepada Kakbah dan *PDI* dari gambar banteng kepada banteng berlingkar garis bulat dan ditambah dengan kata "*Perjuangan*". Sedangkan *Golkar* tetap menggunakan gambar pokok beringin.

Partai baru yaitu *Partai Amanat Nasional (PAN)* mayoritas menang 28.26%. Partai *Golkar* (21.19%), *PPP* (17.81%) dan *PDI-P* (8.79%). Walaupun partai lama tersebut tidak menang mayoritas tetapi dianggap masih kuat karena partai lain yang baru didirikan mendapat kursi yang kurang, kecuali partai *PBB* mengumpulkan kursi sedikit lebih dibanding *PDI-P*.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Partai *Golkar* yang mayoritas menang 80.13 % (1997) telah banyak kehilangan pemilih pada pemilu 1999. Walaupun secara keseluruhan kursi dimenangkan oleh *PAN* di kota, tetapi di kecamatan Aur Birugo Tigobaleh *PAN* (26.86%) kalah tipis dari *Golkar* (27.07%). Sedangkan *PPP* kalah (13.23%) tapi menang tipis dari *PBB* (12.17 %). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendukung partai lama (*Golkar*) masih banyak dan konsisten memilihnya.

Di Kecamatan Guguk Panjang, *PPP* yang banyak didukung pemilih kawasan tersebut (1997), pada pemilu 1999 justru mayoritas dikuasai *PAN* (31.54%). Oleh karena itu kecamatan tersebut dapat disimpulkan sebagai kawasan paling banyak pendukung partai yang diketuai oleh Prof. Dr. Amien Rais (mantan Ketua MPR).

Kecamatan Mandiangin, partai *Golkar* (20.39%) kalah dibanding kursi *PPP* (22.25%) dan mayoritas menang lagi adalah *PAN* (25.73%). Artinya kecamatan Mandiangin Koto Selayan termasuk kawasan kota terpenting untuk menyumbangkan kursi kepada *PPP* dan adalah partai yang menjadi pesaing utama *PAN*.

Bagi partai *PDI-P* yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputeri di kota Bukittinggi justru tidak mampu mengalahkan ketiga partai tersebut, namun bisa bersaing pada bagian bawah dengan partai baru *PBB* diketuai Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Ini menunjukkan pemilih di kota banyak memilih partai baru yang berdasar Islam atau yang dipimpin oleh tokoh Islam (*PAN*, *PPP*, *PBB* dan *PK*). Oleh karena itu keseluruhan pembagian memilih dalam pemilu tahun 1999 telah berubah dibanding pemilihan sebelumnya (1997).

F. Rangkuman

Pada Bab ini telah diperbincangkan sejarah partai politik mulai sebelum kemerdekaan Indonesia sampai memasuki era kemerdekaan Republik Indonesia, dimasa *Orde Baru* dan *Orde Reformasi*. Perkembangan partai politik sejak zaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan terjadi dengan pesat. Pertumbuhan partai politik masa itu hanyalah semata-mata bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari kolonial Belanda.

Namun, setelah pemilu (1955) banyak faktor internal seperti pihak partai *PKI* bertikai/berselisih dengan partai lain terutama yang berdasarkan Islam. Suasana ini menjadikan pemerintahan tidak stabil, perbedaan pandangan di antara menteri kabinet atau di Parlemen adalah puncaknya negara tidak stabil. Akhirnya, Presiden Soekarno secara mengejutkan memaklumkan suatu pengumuman penting (*dekrit*) pada 5 Juli 1959. Antara lain butir-butir pernyataan itu adalah kekuasaan negara dikembalikan kepada dasar *Undang-undang Dasar 1945*, *Pancasila* dijadikan pedoman bernegara. Oleh karena itu, sistim pemerintahan langsung dihapuskan dan kabinet dibubarkan. namun Soekarno tidak pernah menggunakan sistim yang didasarkan kepada *Pancasila* dan *Undang-undang* yang dimaksud. Bahkan sejak tahun 1959 tersebut Presiden (Soekarno) menguasai negara tanpa didampingi parlemen yang dipilih menurut pemilu. Rezim Soekarno tersebut oleh rezim Soeharto disebut sebagai Rezim *Orde Lama*. Kekuasaan rezim ditumbangkan setelah perebutan kekuasaan yang gagal pada 30 September 1965.

Setelah perebutan kekuasaan *G.30.S* yang diduga telah didalangi oleh *PKI*, Presiden Soekarno ditumbangkan dan *Orde Baru* lahir pada tahun 1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang serta merta langsung membubarkan *PKI* karena dianggap sebagai partai yang terlibat di dalam usaha perebutan kekuasaan tersebut. Setelah berkuasa selama lima tahun Soeharto mengumumkan agar diadakan pemilu. Maka pada awal tahun

1970-an diselenggarakan pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan partai *Golkar* menang mayoritas. Selama 32 tahun *Orde baru* dan setiap pemilu partai pemerintah (partai *Golkar*) selalu menang, sedangkan partai-partai lain seperti *PPP* dan *PDI* sangat sulit mengalahkannya.

Tahun 1998 Soeharto dipaksa meletakkan jabatannya oleh desakan dan unjuk rasa yang meluas di Indonesia dan berakhirilah era rezim *Orde baru* dan *Orde reformasi* pun lahir. Pada awal rezim baru *reformasi* dipimpin Presiden Habibie dilaksanakanlah pemilu yang dipercepat yaitu pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 buah partai politik termasuk tiga partai bekas partai *Orde Baru* (*PPP*, *Golkar* dan *PDI*). Pada saat pemilu era reformasi ini partai *Golkar* telah merata kalah secara nasional oleh partai *PDI-P*. Sedangkan di peringkat kota Bukittinggi, partai *Golkar* justru dikalahkan oleh partai *PAN*. Walaupun pada tingkat nasional *PDI-P* menang, tapi tidak berhasil menang di kota Bukittinggi. Untuk menyelidiki pola pemilu 1997 (*Orde Baru*) dan 1999 (*Orde Reformasi*).

BAB IV

STUDI KASUS: POLA PEMILIH PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI DI KOTA BUKITTINGGI

 Mayoritas penduduk kota Bukittinggi orang Minangkabau yang beragama Islam. Lazimnya, orang Minang banyak yang meninggalkan kampung pergi merantau ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke luar negeri. Mereka berniat menyibukkan diri dalam perdagangan atau sebagai pengusaha (Naim, 1984). Keadaan tersebut juga didapati di kota kawasan Sumatera Barat termasuk di Bukittinggi. Untuk melihat keadaan, ciri-ciri penduduk, dan sosial ekonomi responden tersebut, di bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian tersebut.

A. Jenis Kelamin dan Umur

Responden terdiri dari mereka yang telah mengikuti pemilu sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dan yang berumur 21 tahun ke atas atau yang belum mencukupi 21 tahun tetapi sudah mengalami sebanyak dua kali pemilu, misalnya responden yang ketika itu berumur 17 tahun dan ia sudah menikah dan dibenarkan untuk memilih. Menurut undang-undang pemilu di Indonesia dalam usia berapapun orang yang telah menikah diberikan hak untuk memilih. Dari Tabel 12 dari seluruh sampel yang diberi *questioner* sebanyak 504 orang (44.6%) adalah laki-laki dan 55.4% adalah perempuan. Mayoritas kumpulan responden (40.9%) terdiri dari mereka yang berusia muda (21-35 tahun) dan 23.4% terdiri dari mereka yang berumur 36-45 tahun. Pada usia ini mereka sangat produktif dan dinamik dan sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sosial ekonomi, organisasi, dan

aktivitas politik, sedangkan berumur di atas 46 tahun sampai di atas 66 tahun jumlahnya semakin kecil. Artinya responden mayoritas terdiri dari mereka yang berusia muda dan dewasa, orang yang dianggap cukup dinamis dan peka terhadap perkembangan politik di kota Bukittinggi.

Tabel 13

Parsentase Kelompok Jenis kelamin dan Usia Responden (N= 504)

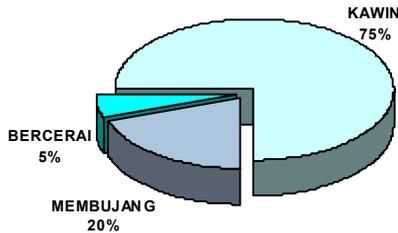
Jenis Kelamin		Jml	Kelompok Umur (Tahun)					Jml
Laki-laki	Wanita		21-35	36-45	46-55	56-65	>66	
44.6	55.4	100.0	40.9	23.4	17.4	11.7	6.5	100.0

B. Status Perkawinan dan Agama

Dari keseluruhan responden yang ditemui, 75.0% terdiri dari mereka yang telah menikah. Mereka yang berstatus lajang 20% yang terdiri dari kelompok yang masih mudabelia dan belum bekerja secara tetap dan sebagiannya adalah pelajar, sedangkan kelompok terkecil sebanyak 5% terdiri dari mereka yang sudah bercerai, yaitu mereka yang berstatus janda atau duda (Diagram 1).

Mayoritas responden yang sudah menikah diperkirakan mempunyai pengalaman hidup berumah tangga dan bermasyarakat, dan telah mengalami proses memilih dalam pemilu. Dalam konteks kependudukan mereka juga terdiri dari para kepala keluarga atau anggota keluarga yang mempunyai anak atau tanggungan. Para kepala kelurga memainkan peranan penting untuk membina pendidikan anggota keluarga. Mereka juga berperanan terhadap pengembangan sikap, persepsi memilih partai atau ikutan untuk perilaku yang positif bagi anggota keluarganya.

Diagram 1 Status Perkawinan



Dari aspek agama, *questioner* penelitian yang dijalankan memperoleh mayoritas dari responden (98,6%) beragama Islam yang terdiri dari orang-orang Minang. Responden yang lain sebanyak 1,4% adalah beragama Kristen yang dianut oleh kaum Cina, sedangkan agama Kristen dianut oleh kaum Batak dan sebagian yang lainnya kaum Cina. Oleh karena itu, secara keseluruhan penduduk kota Bukittinggi mayoritas menganut agama Islam dan suasana kehidupan harian bernuansa budaya dan paham Islam. Suasana keagamaan demikian lazimnya terjadi sistem komunikasi kemasyarakatan Islam dan senantiasa dirujuk kepada keutamaan menjalankan paham Islam seperti peraturan, norma dan undang-undang (Ridhah 1996:35). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penduduk kota Bukittinggi terdiri dari mayoritas orang yang beragama Islam dan suasana kehidupan sehari-hari adalah bernuansa budaya atau paham Islam. Suasana kota Bukittinggi sampai hari ini masih kekal mencorakkan budaya Islam seperti perempuan dan pelajar puteri umumnya pergi ke pasar atau bersekolah menggunakan pakaian muslim.

C. Jenis pekerjaan

Pekerjaan utama penduduk adalah dalam bidang usaha atau perdagangan (33,13%), sedangkan sektor pekerjaan lain di bawah 10%. Sektor pekerjaan usaha dan perdagangan berpusat di tiga buah kegiatan pasar utama (pekan) yaitu di *pasar Atas*, *pasar Bawah* dan *pasar Aurkuning* Bukittinggi. Sejak dahulu masyarakat sangat

menyukai pekerjaan yang bergerak dalam perdagangan atau bidang swasta. Minat berdagang bagi pemuda untuk merantau meninggalkan tempat kelahirannya (desa/ kampung) ke kota terdekat atau ke tempat lain-lain (Naim 1984:67). Ini membuktikan bahwa orang minang paling suka berdagang dan pergi merantau ke berbagai pelosok dunia, termasuk yang sekarang banyak berdagang di Malaysia.

Dari observasi dan wawancara di pusat-pusat di pasar kota Bukittinggi mereka yang berdagang atau bekerja di sektor swasta kebanyakan adalah orang Minang. Hanya sebagian kecil kaum Cina di kawasan *Kampung Cina*. Orang-orang Cina tersebut tidak terlalu aktif menjalankan perdagangan sebagaimana lazimnya orang Cina di tempat lain. Di kota Bukittinggi orang Cina hidup sederhana dengan jenis perdagangan yang menengah seperti kios atau toko-toko kecil.

Pusat pasar terbesar yaitu di Pasar Atas tidak terdapat seorangpun orang Cina yang menjalankan perdagangan. Orang Cina di kota Bukittinggi dan kawasan Sumatera Barat umumnya berkomunikasi menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia, sedangkan orang Jawa, menjalankan perdagangan makanan ringan di kaki lima. Orang Batak kebanyakan berdagang pakaian dan barang-barang keperluan rumahtangga.

Walaupun antara responden yang ditanya sebanyak 26.4% adalah ibu rumah tangga, ini tidak bermakna mereka hanya mengurus masalah keluarga saja di rumah. Namun, dari *questioner* yang diberikan diketahui banyak yang bekerja membantu pekerjaan suaminya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa perempuan Minang dikenal sebagai orang yang sangat kreatif dan suka membantu pekerjaan suami mereka. Di samping itu, mereka juga membuat pekerjaan di rumah untuk membantu mendapatkan tambahan penghasilan suami seperti bekerja membuat produksi barang untuk perdagangan sendiri. Jenis barang yang dijual adalah sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, dan lain-lain.

Tabel 14
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Parsentase
1.	Pengusaha	33.13
2.	Ibu rumah tangga	26.39
3.	Pelajar (mahasiswa)	7.74
4.	Guru	6.15
5.	Pegawai rendah	5.16
6.	PNS	4.76
7.	Pensiunan	3.77
8.	Pertanian	3.17
9.	Sopir	2.38
10.	Buruh	2.18
11.	Dokter	0.79
12.	Tentara/Polisi	0.40
13.	Lain-lain	3.98
	Jumlah	100.00

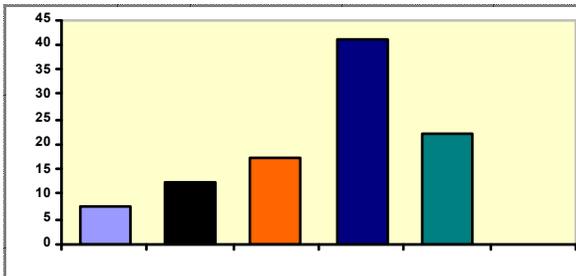
Dari segi pekerjaan terbukti bahwa orang Minang di kota Bukittinggi masih kekal sebagai pengusaha atau pedagang yang cerdas baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan penduduk yang lain bekerja sebagai guru, buruh, pegawai pemerintah, buruh, sopir kendaraan (*driver*), dan lain-lain jumlahnya hanyalah sekitar 2%. Keadaan ini membuktikan bahwa orang Minang kurang bekerja sebagai buruh atau *sopir* tersebut.

Dari observasi di pusat-pusat perdagangan kota Bukittinggi diperoleh berbagai jenis barang yang dijual seperti baju, kain sulaman, kain perempuan, berbagai jenis makanan, kue-kue, kerajinan tangan yang terbuat dari bambu, kayu, batu, semen, dan lain-lain. Barang tersebut adalah hasil industri kecil dan kerajinan tangan dari penduduk kota dan sekitar kota Bukittinggi. Barang tersebut disukai para wisatawan sebagai cendramata untuk di bawa pulang setelah berekreasi di kota yang berhawa sejuk tersebut.

D. Pendidikan

Kota Bukittinggi selalu dikaitkan sebagai sebuah kota pendidikan yang terkenal sejak zaman kolonial dan keadaan tersebut sampai sekarang masih berlanjut. Kota Bukittinggi banyak tersedia kemudahan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun tingkat universitas untuk memberikan sumbangan pendidikan kepada masyarakat setempat. Kajian lapangan mengetahui mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) adalah terbanyak yaitu 40.9% dan disusul oleh tamatan Sekolah Menengah Pertama atau (SLTP) sebanyak 17.3%. Tamatan Perguruan Tinggi 29.3% yang berpendidikan Sekolah Dasar jumlahnya paling kecil yaitu sebanyak 12.5% (lihat Grafik 1). Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk kota Bukittinggi umumnya terdiri dari mereka yang telah mengalami proses pendidikan dan mayoritas tamat Sekolah Menengah Atas. Dilihat dari minat melanjutkan ke PT, ternyata cukup besar dimana lulusannya hampir sama banyak dengan yang tamat SMA.

Diagram 2. Tingkat Pendidikan Responden di kota Bukittinggi



■ Tidak tamat SD ■ Tamat SD
■ Tamat SLTP ■ Tamat SLTA ■ Tamat PT

Menurut Walikota Bukittinggi Drs. Jufri (2008) bahwa pembangunan kota telah diutamakan kepada sektor pendidikan dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan sekolah-sekolah,

penyediaan alat-alat belajar, dan penambahan guru telah menjadi keutamaan perkembangan pembangunan kota pada masa depan karena jumlah calon yang masuk sekolah menengah dan universitas senantiasa bertambah setiap tahun. Kota Bukittinggi berniat menetapkan diri sebagai kota pendidikan yang utama di Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pendidikan responden di kota Bukittinggi, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

E. Pendapatan

Walaupun dari segi pendidikan penduduk kota kebanyakan sudah terpelajar, namun segi pendapatan umumnya masih pada peringkat menengah. Sebanyak 62.5% dari responden yang ditanya berpendapatan sederhana setiap bulan. Mereka yang berpendapatan rendah sebanyak 27.8% yang dalam pendapatan tersebut tergolong miskin. Sedangkan yang berpendapatan tinggi sebanyak 9.7% (Grafik 3). Ini bermakna bahwa rata-rata penduduk masih hidup dalam taraf kehidupan yang sederhana dan hanya sedikit yang sudah hidup mewah. Keadaan tersebut karena pengaruh ekonomi negara yang merosot sejak tahun 1997.

Namun dari pengamatan di lapangan terdapat banyak bangunan rumah besar yang modern, memiliki kendaraan dan peralatan rumah yang mewah seperti yang lazimnya dimiliki oleh orang kaya. Responden menyatakan mereka mampu memiliki barang tersebut karena adanya bantuan selain pendapatan setiap bulan. Kebanyakan di antara pengiriman uang dari anak atau saudara yang merantau dan bekerja di Jakarta, Bandung, Medan, dan di kawasan lain.

Keadaan ini bersesuaian dengan falsafah kehidupan orang Minang untuk berusaha membangun rumah untuk ibu bapak atau anak-anaknya apabila telah berhasil di tanah rantau. Rumah, kendaraan dan barang yang berharga adalah menjadi simbol status seseorang. Oleh karena itu orang Minang dikenal sangat kreatif bekerja terutama berdagang atau menjadi pengusaha dan keberhasilan tersebut senantiasa disimbolkan dalam bentuk

penyediaan rumah serta benda-benda yang bernilai seperti kendaraan, perabot dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang pendapatan responden dapat dilihat melalui Grafik 2, di bawah ini.

Diagram 3 Pendapatan Responden



F. Daerah Asal Responden

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa kabupaten dan kota (daerah). Yang termasuk kota adalah kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Solok dan kota Sawahlunto, sedangkan kabupaten, yaitu kabupaten Agam, 50 Kota, Pasaman, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Dari Tabel 15 berikut, diketahui sebanyak 39.3% adalah penduduk asal kota Bukittinggi dan yang lain terdiri dari migran yang berasal dari pendatang kawasan luar kota atau dari kawasan lain seperti dari Sumatera dan Jawa. Kebanyakan (30.4%) migran berasal dari Daerah Agam yaitu kawasan luar kota yang berdekatan dengan kota Bukittinggi, sedangkan penduduk yang berasal dari kawasan lain dari pedalaman Sumatera Barat jumlahnya 25%.

Pendatang yang berasal dari luar propinsi Sumatera Barat dilaporkan hanyalah 9.1%. Berarti kota Bukittinggi diminati oleh para pendatang dari kawasan luar kota yang terdekat saja dan

perpindahan penduduk masih terbatas dalam kawasan propinsi Sumatera Barat di kalangan orang Minang saja.

Tabel 15. Daerah Asal Responden Mendiami Kota

Daerah Asal	Parsentase
Warga asli Kota	39.3
Kabupaten Agam (luar kota)	30.4
Luaran Sumatera Barat	9.1
Kabupaten Padang Pariaman	4.4
Kabupaten Pasaman	3.6
Kab.Tanah Datar/Kota Padang Panjang	3.8
Kota Padang	2.6
Kabupaten 50 Kota/Kota Payakumbuh	2.4
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	2.2
Kabupaten Pesisir Selatan	1.2
Kabupaten/Kota Solok	1.0
Jumlah	100.0

Namun penduduk pada siang hari dilaporkan sebanyak 400 ribu orang, mereka adalah para pengunjung pasar, pelajar dan pegawai pemerintah yang bekerja di Bukittinggi tapi bertempat tinggal di luar kota.

Pendatang yang berasal dari kawasan luar terdiri dari orang Jawa dan orang Batak yang datang ke kota Bukittinggi karena bertugas sebagai pegawai pemerintah atau sebagai tentara dan polisi. Orang-orang Cina, adalah di antara penduduk Bukittinggi yang sudah berada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka dapat dianggap sebagai penduduk asal kota dan tidak ada pendatang yang baru. Dari Tabel 16 dapat dipaparkan daerah asal responden dan tempo/waktu menetap di kota Bukittinggi. Mayoritas penduduk kota telah lama membangun sebuah komunitas bersama, menjalankan adat istiadat, berkomunikasi sosial dan budaya, menjalankan aktivitas sosial, dan mengamalkan adat serta agama Islam yang kuat.

Responden pendatang baru yang datang ke kota Bukittinggi sejak 5 tahun lalu banyak berasal dari Sawahlunto Sijunjung

(63.64%), Tanah Datar (42.11%) dan Solok (20%). Dari *questioner* penelitian di lapangan diketahui mereka adalah para pelajar yang meneruskan pendidikan di kota tersebut dan sebagian yang lain mereka yang ingin mencari pekerjaan di kota Bukittinggi.

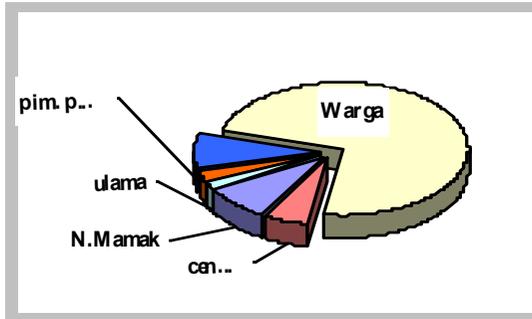
Tabel 16
Daerah Asal Responden dan
Tempo/Waktu Menetap di Kota Bukittinggi

Daerah Asal	Sejak lahir	>23 tahun	17-22 tahun	11-16 tahun	6-10 tahun	<5 tahun
Warga Asli Kota	84.32	5.55	3.53	-	3.03	3.53
Kab. Agam	28.76	16.34	13.72	10.46	15.03	15.69
Kab.Pasaman	-	36.85	5.26	21.05	21.05	15.79
Kabupaten 50 Kota	8.33	33.33	25.00	16.67	-	16.67
Kab. Tanah Datar	21.05	15.79	15.79	5.26	-	42.11
Kab. Padang Prm	30.82	9.09	9.09	20.72	21.19	9.09
Kabupaten Solok	20.00	-	20.00	20.00	20.00	20.00
Kab.S.Lunto Sjj	-	27.27	-	-	9.09	63.64
Kab. Pesisir Selatan	-	-	16.66	-	66.68	16.66
Kota Padang	15.38	-	7.70	38.46	23.08	15.38
Luar daerah	12.24	4.35	19.56	13.85	23.91	26.09

G. Status Sosial Responden

Dari *questioner* yang diberikan diketahui di lapangan sebagian besar responden adalah warga masyarakat kota Bukittinggi. Di samping itu juga ada pemimpin agama dan adat, cendekiawan, partai politik dan organisasi. Lazimnya di kawasan Minang (Sumatera Barat) ada tiga tokoh utama pemimpin masyarakat dikenal sebagai *Tungku Tigo Sajarangan* adalah suatu kumpulan pemimpin yang terdiri dari tiga tokoh pemimpin masyarakat yang terdiri dari perpaduan dari pemimpin agama Islam, pemimpin adat (*Ninik Mamak*), ulama dan Cendekiawan. Data responden (Diagram 4) menunjukkan bahwa responden yang dipilih meliputi seluruh peringkat lapisan masyarakat yang dapat mewakili penduduk kota Bukittinggi.

Diagram 4 Status Responden di dalam Masyarakat



H. Partisipasi Politik pada Pemilu

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang yang terlibat secara aktif di dalam kegiatan politik. Keterlibatan yang dimaksud antara lain termasuk mendaftarkan diri memilih untuk pemilu, menentukan pilihan pada pemilu, berkampanye, menjadi anggota partai dan mengadakan komunikasi dengan elit-elit partai, serta mengumpulkan informasi politik dari media masa. Penelitian ini mendapati, secara keseluruhan partisipasi politik yaitu partisipasi memilih dalam pemilu tahun 1997 dan 1999 cukup tinggi, di mana kebanyakan responden ditanya mengatakan bahwa telah memilih pada kedua masa pemilu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan laporan partisipasi politik dalam masa pemilu *Orde Baru* dan *Orde Reformasi* yang cukup tinggi di Bukittinggi yang melebihi jumlah 90 %.

Dari segi keperluan sikap memilih; 83.5% responden menyatakan ia 'perlu' dan sedikit (10.3%) yang menjawab 'tidak perlu'. sedangkan sebagian kecil (6.2%) menyatakan "tidak tahu". Ini berarti, masyarakat kota Bukittinggi berkeinginan mewujudkan demokrasi melalui pemilu. Maka sikap peduli terhadap pemilihan cukup meningkat di kalangan penduduk kota tersebut. Hal-hal tersebut sangat penting untuk membina sikap yang membangun ke arah perkembangan demokrasi yang

sebenarnya. Hal-hal tersebut terbangun karena dampak yang positif dari era reformasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998. Ini dapat pula memastikan bahwa telah terjadi perubahan sikap dan persepsi pemilih di kota Bukittinggi yang selama masa *Orde Baru* semangat kepedulian mereka kurang.

1. Pendaftaran pemilih

Kesadaran rakyat untuk mendaftar sebagai pemilih mengembangkan kepedulian mereka untuk mengikuti atau memilih dalam pemilu. Bagi seseorang yang mendaftar atas kesadaran sendiri dianggap telah sadar akan tanggung jawab politiknya. Mereka berpartisipasi digolongkan dalam kategori berpartisipasi politik yang aktif, sedangkan pemilih yang didaftarkan orang lain atau oleh petugas pemilu digolongkan sebagai pemilih yang pasif dan mempunyai kesadaran politik yang lemah.

Dari pendaftaran pemilih tersebut didapati peningkatan jumlah mereka yang mendaftar sebagai pemilih antara pemilu tahun 1997 dan 1999, sedangkan responden yang didaftarkan (pasif) semakin berkurang antara kedua tempo/masa tersebut. Ini bermakna trend partisipasi politik responden yang aktif telah meningkat. Secara keseluruhan walaupun pendaftaran pemilih meningkat antara tahun 1997 maupun 1999 tetapi mayoritas kegiatan pendaftaran dilakukan oleh pihak petugas pemilu. Hal ini tergambar dalam Tabel 17 berikut.

Tabel 17
Pola Pendaftaran Pemilih Pemilu 1997 dan 1999.

Jns kelamin	Pola Pendaftaran					
	1	2	1	2	1	2
Laki-laki	6.94	10.71	36.70	31.94	1.00	1.99
Perempuan	5.95	10.71	48.22	42.66	1.19	1.99
Jumlah	12.89	21.42	84.92	74.60	2.19	3.98

Keterangan:

1 = Pemilu 1997.

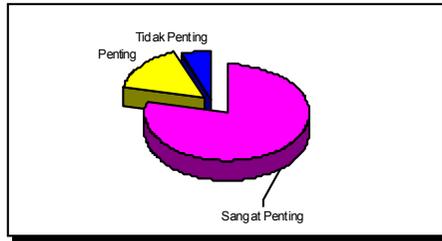
2 = Pemilu 1999.

Hal ini karena para pemilih masih banyak terpengaruh dengan suasana pendaftaran saat pemilu rezim Suharto yang sengaja melakukan mobilisasi pendaftaran pemilih dan keadaan ini tidak akan berlangsung lama karena masa itu masih dalam suasana peralihan era reformasi. Hal tersebut sesuai dengan jawaban pertanyaan dengan seorang tokoh masyarakat di kota tersebut Sutan Mudo (46) mengatakan bahwa, ia sadar untuk melakukan pendaftaran pemilih, tetapi enggan melaksanakan karena beranggapan pendaftaran pemilih adalah tugas pihak petugas pemilu, maka pendaftaran pemilih kurang bisa diambil sebagai pengukuran kadar partisipasi politik. Ini karena pengetahuan mengenai demokrasi dan tatacara pemilu di kalangan penduduk adalah rendah dan pihak petugas pemilu juga tidak melakukan sosialisasi secara meluas.

Mayoritas dari responden juga menyatakan bahwa mendaftarkan diri sebagai pemilih dianggap sangat penting (78.2%) dan hanya 6.3% menyatakan tidak penting (lihat Diagram 5). Oleh karena itu, mereka sengaja pergi ke petugas pemilu untuk memastikan bahwa nama mereka telah didaftarkan atau belum dalam daftar calon pemilih. Ini bermakna sesungguhnya kesadaran demokrasi dari kalangan penduduk turut meningkat. Responden ikut terlibat dalam pemilihan dan ingin bersama-sama membangun pemerintahan yang sah dan didukung oleh rakyat. Fenomena tersebut terjadi karena rakyat Indonesia telah diberikan kebebasan berpolitik dalam era reformasi setelah *Orde Baru* ditumbangkan.

Hal-hal tersebut disumbangkan oleh penyebaran informasi politik secara meluas dari media masa dan internet yang digunakan masyarakat kota secara meluas. Ini amat berbeda dibanding masa *Orde Baru*, ketika itu mereka diliputi perasaan ragu dan takut kepada rezim berkuasa, sehingga kebebasan demokrasi di kalangan masyarakat tidak berkembang. Kegiatan masyarakat dibatasi rezim Suharto.

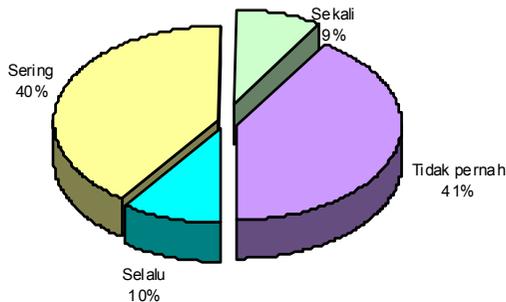
Diagram 5 Mayoritas Pemilih yang Menganggap Penting Pemilu



2. Keterlibatan Berkampanye

Keterlibatan rakyat berdasarkan kesadaran sendiri untuk menghadiri kampanye politik adalah satu lagi bentuk partisipasi politik. Didapat lebih separuh responden yang ditanya mengaku pernah menghadiri kampanye partai politik sekali atau beberapa kali, sedangkan yang lain mengatakan tidak pernah menghadiri kampanye pemilu seperti ditunjukkan Diagram 6. Ini bermakna keterlibatan responden untuk menghadiri kampanye partai politik sangat meningkat untuk tahun 1999 dibanding dengan pemilu tahun 1997.

Diagram 6 Kehadiran dalam Kampanye Partai Politik



Apabila ditanya apakah yang menyebabkan mereka menghadiri kampanye partai politik, 50% menyatakan mereka tertarik dengan program dan visi partai. Di samping itu, responden yang lain menjawab kehadiran mereka ke tempat

kampanye adalah sekadar mencari hiburan karena sudah lazim setiap kampanye senantiasa diiringi dengan hiburan dari artis populer.

Keadaan ini menunjukkan bahwa keterlibatan responden menghadiri kampanye-kampanye partai politik dalam pemilu adalah cukup tinggi dan tujuan utama mereka datang adalah untuk mendengarkan program partai dan visi. Responden sudah peka untuk memberikan penilaian yang wajar terhadap suatu partai sebelum membuat pilihan. Walaupun sebagian responden terutama di kalangan remaja motivasinya semata-mata untuk terhibur dari artis-artis yang ditampilkan dan sebagian lagi pergi karena diajak teman-teman mereka. Responden yang merasa takut kepada pemerintah jika tidak menghadiri kampanye partai pemerintah jumlahnya semakin berkurang. Alasan menghadiri kampanye ditunjukkan dalam Tabel 18.

Tabel 18
Alasan Menghadiri Kampanye Politik

Jenis kelamin	Ketertarikan					
	Prog. Partai	Takut anti Pemerintah	Dorongan Teman2	Ada demonstrasi	Ingin tahu saja	Tidak tahu
Laki-laki	53.33	4.00	4.00	12.89	13.33	12.45
Wanita	51.25	4.66	2.87	15.78	12.54	12.90

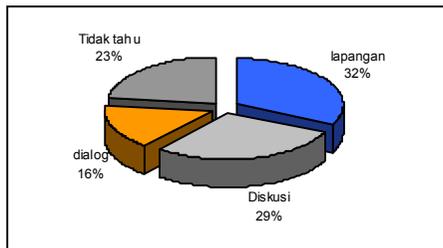
Dalam hal tata cara kampanye partai-partai politik, yang paling digemari oleh masyarakat kota Bukittinggi berbentuk kampanye satu hal (31.9%), yaitu jenis orasi atau pidato anggota partai yang berkampanye, sedangkan sebanyak 28.8% menyukai bentuk kampanye dua hal di tempat terbuka, yaitu boleh mencetuskan suasana yang dinamik di antara anggota partai berkampanye dan yang mendengarkan kampanye. Ada perbincangan atau tanya-jawab mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan manifesto partai.

Data tersebut menyimpulkan rakyat tertarik kepada jenis kampanye model diskusi langsung karena mereka ingin

mengetahui secara lebih dekat para elit politik dan calon yang bertanding. Artinya, rakyat dapat memberikan penilaian terhadap suatu visi politik dan calon anggota parlemen yang bertanding.

Di samping itu, mereka juga mengikuti kampanye melalui televisi dan radio. Kampanye yang berlangsung di dewan-dewan khusus dan melalui penerbitan surat kabar kurang mendapat perhatian. Ini bermakna bahwa media masa elektronik mempunyai peranan penting untuk menyiarkan informasi politik dan seluruh responden yang ditemui telah mempunyai televisi, radio di rumah mereka (Tabel 19).

Diagram 7 Penyelenggaraan Kampanye Partai Yang Didukung



**Tabel 19
Kegiatan Kampanye Partai Yang Disukai**

Melalui/Tempat	Parsentase
Media Elektronik (Televisi/Radio)	44.6
Lapangan terbuka bersama Artis	30.6
Pertemuan2 Partai	11.6
Ruangan	4.8
Media Masa cetak (Surat Kabar)	4.6
Tidak Tahu	3.8
Jumlah	100.0

Lazimnya setiap pemilu, bagi setiap partai yang bertarung berusaha menarik perhatian orang banyak untuk memilih partai mereka. Responden menyatakan pengalaman saat pemilu tahun 1997 mereka didatangi atau diberikan informasi secukupnya agar memilih partai tertentu. Sebanyak 49.0% pemilih telah dibujuk

dan dipengaruhi oleh pihak partai dan sebanyak 24.8% mengaku telah diberikan hadiah atau sogokan seperti baju berlogo partai atau barang yang ada tanda gambar partai, sedangkan 12.9 % diajak menghadiri kampanye pemilihan partai dengan diberi uang oleh partai tertentu. Ada juga di antara responden yang dipaksa agar memilih partai tertentu. Mereka juga mengatakan bahwa partai *Golkar* (partai pemerintah) melaksanakan politik uang dan pemberian hadiah untuk memastikan rakyat memilih partai tersebut. Walaupun pelaksanaan politik uang tidak terlalu nampak berlaku, namun data menunjukkan usaha partai tersebut berbuat curang agar pemilih memilih partai tersebut telah terbukti. Selain itu, rakyat agak takut seandainya mereka tidak memilih partai pemerintah, maka partai *Golkar* senantiasa menang mayoritas pada setiap pemilu berlangsung.

3. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan Politik

Secara keseluruhan, keterlibatan responden dalam kegiatan partai politik diketahui sebanyak 55.9% terdiri dari pendukung partai politik tertentu dan sebanyak 36.9% orang yang menjadi aktivis sebuah partai (lihat Bagan 2). Sedangkan sebanyak 7.2% adalah orang-orang yang duduk sebagai tokoh, pengurus, kader militan partai. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai semangat tinggi untuk memenangkan partai dan juga menjadi pemimpin di dalam partai di kota Bukittinggi.

Keadaan susunan peringkat keterlibatan tersebut di kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai sebuah piramid partisipasi politik seperti ditunjukkan Gambar 4.10. Ini bermakna bahwa susunan masyarakat berpolitik cukup mantap. Artinya era reformasi telah menciptakan pembangunan yang seimbang dalam perkembangan politik di kalangan masyarakat khususnya yang terlibat di bidang politik dan penyuksesan demokrasi di kota tersebut.

Bagan 3
Kedudukan Responden Dalam Partai Politik di Kota Bukittinggi.



4. Tanggapan Responden Terhadap Pemilu 1997 dan 1999

Responden ditanya pandangan mereka terhadap pemilu 1997, mayoritas (54.96%) dari mereka menganggap pemilu diselenggarakan secara 'tidak adil'. Hanya 24.40% mengakui telah "adil" Ini bermakna pemilu *Orde Baru* dinilai tidak demokratis dan rakyat tidak memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Haris (1998: 19) bahwa pemilu *Orde Baru* adalah tidak objektif, sebagaimana ditunjukkan Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20
Penilaian Responden Terhadap Pemilu 1997

Penilaian	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Adil	22.22 (9.92)	26.16 (14.48)	(24.40)
Tidak Adil	60.89 (27.18)	50.18 (27.78)	(54.96)
Tidak Tahu	16.89 (7.54)	23.66 (13.08)	(20.64)
Jumlah	(44.64)	(55.36)	(100.00)

Penyelenggaraan pemilu 1999 dinilai baik dan adil. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 buah partai politik bertanding untuk peringkat nasional. Di kota Bukittinggi partai yang bertanding sebanyak 38 buah termasuk tiga partai era *Orde Baru* yaitu *PPP*, *Golkar*, dan *PDI*. Walaupun partai era Suharto khususnya partai *Golkar* diperkirakan akan tumbang dengan jumlah pemilih menurun, tetapi ia masih kuat, termasuk lima lagi partai yang besar (*PPP*, *PAN*, *Golkar*, *PBB* dan *PDI-P*).

Diketahui sebanyak responden (53%) yang telah merubah pilihan partai pada pemilu 1999, sedangkan yang lain (47%) menyatakan tidak mau merubah pilihan partai dan mereka dinilai konsisten memilih partai yang lama. Mayoritas responden yang ditanya telah memilih *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, *Partai Amanat Nasional (PAN)*, dan *Golkar*. Namun *PDI-P* menang mayoritas di tingkat pusat, sebaliknya kalah di kota Bukittinggi. Mereka memilih partai tersebut adalah karena visi yang baik dan program partai yang sesuai dengan pilihan mereka. Responden telah membuat pertimbangan secara matang sebelum turun memilih partai. Maka rakyat sudah cukup peka menilai sesuatu partai yang dianggap bermutu.

Walau bagaimanapun terdapat juga sebagian pemilih lain yang tidak merubah dan masih memilih partai yang sama seperti pemilu tahun 1997. Alasan mereka adalah tidak terpengaruh dengan munculnya pendirian partai yang baru, program sudah cukup baik, perjuangan partai sesuai dengan asas keagamaan dan yang lain memberikan alasan bahwa partai tersebut selalu ditindas (zaman Suharto). Jawaban tersebut boleh memberikan makna bahwa masih ramai pendukung partai era Suharto yang konsisten tidak terpengaruh dengan perubahan era reformasi. Keadaan itu ditunjukkan oleh Tabel 21.

Hal ini membuktikan bahwa partai *Golkar* dan *PPP* masih ada sebagai partai mayoritas di kota Bukittinggi. Walaupun kampanye partai yang lain semasa berkampanye menyerang partai *Golkar* khususnya, tetapi partai yang pernah berkuasa di masa *Orde Baru* tersebut masih mempunyai banyak pendukung.

Tabel 21
Alasan Memilih Partai Lama (*Golkar*, *PPP*, *PDI*) Pada Pemilu 1999

No	Alasan	Parsentase
1	Tidak Terpengaruh oleh Pendirian Partai Baru	35.3
2	Program Partai Sudah Cukup Baik	34.9
3	Perjuangan Partai Berasaskan Islam	27.2
4	Partai tersebut senantiasa ditindas	2.6
Jumlah		100.0

Dari wawancara dengan Alimin Arif (54 tahun) seorang pengusaha di kota Bukittinggi mendapati bahwa kumpulan masyarakat yang bekerja di dalam organisasi pemerintah (pegawai negeri) misalnya pejabat pemerintah, guru, keluarga tentara dan polisi serta beberapa orang pengusaha yang pernah dibina oleh partai *Golkar* banyak yang masih memilih partai *Golkar* saat pemilu 1999, sedangkan orang yang berfikiran bahwa partai adalah sebuah jalan untuk perjuangan keagamaan, umumnya tidak mau merubah pilihan selain dari partai *PPP*. Partai *PPP* sebelum pemilu 1999 telah memperbaharui visi partai yang berasaskan Islam. *PPP* juga telah mengubah tanda gambar partai dari gambar bintang menjadi gambar Kakkah. *PDI-P* yang semasa *Orde Baru* senantiasa tartindas pada pemilu 1999 mendapat tambahan pendukung yang cukup banyak terutama dari orang yang peduli kepada partai tersebut.

Faktor yang menyebabkan pemilih berubah mendukung partai lain adalah program partai yang baik (36.3%), sesuai pilihan hati nurani (22.8 %) dan pengaruh pemimpin (tokoh) partai yang hebat dan populer (18.2 %). Alasan yang lain, pengalaman partai cukup meyakinkan.

Dari *questioner* penelitian yang dijalankan didapati pemilih yang tidak mau merubah pilihan partai beralasan bahwa program (partai *Golkar* dan *PPP*) dianggap sudah baik dan bahkan sudah banyak berpengalaman menjalankan negara terutama partai *Golkar*. Sebagian pemilih lain juga tidak mau mengubah memilih

PPP sebagai partai yang berasas Islam dan telah berusaha membangun perkembangan kemajuan agama Islam di Indonesia.

Walaupun aspek program partai dan pilihan hati nurani dianggap sebagai aspek yang sangat berpengaruh kepada pemilihan sebuah partai, ternyata pengaruh orang yang menjadi pemimpin sebuah partai cukup signifikan bagi pemilih untuk memilih partai tersebut. Dalam hal ini misalnya ketua umum *Partai Amanat Nasional (PAN)* Prof. Dr. Amien Rais sangat berpengaruh di kalangan pendukungnya. Beliau amat populer sebagai salah seorang tokoh yang menjadi salah seorang motor reformasi ketika menumbangkan rezim Suharto.

Tabel 22
Alasan Merubah Pilihan Partai Pemilu 1999

Alasan	Parsentase
Program Partai Bagus	36.3
Sesuai Pilihan Hati Nurani	22.8
Pemimpin Partai Hebat/Populer	18.2
Pengalaman Partai Cukup Meyakinkan	10.9
Lain-lain	11.8
Jumlah	100.0

Nama Amien Rais sudah sangat dikenal masyarakat secara meluas termasuk di kota Bukittinggi. Hal ini terbukti jumlah pemilih partai PAN yang cukup signifikan dengan kepopuleran Amien Rais. Selain itu, pengaruh yang signifikan antara tokoh populer Dr. Hamzah Haz dengan partai PPP, Akbar Tanjung dengan Golkar, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bersama *Partai Bulan Bintang*. Semua partai tersebut adalah partai yang termasuk lima besar di kota Bukittinggi.

I. Pola Pemilihan Parpol Pemilu 1997 dan 1999

Pada pemilu 1997 mayoritas pemilih telah memilih partai Golkar dan Partai PPP. PDI memperoleh jumlah suara yang merosot. Berbanding dengan pemilu 1999, Partai Golkar dan PPP

tidak mendapat dukungan dan banyak yang tidak memilih partai tersebut. Sebaliknya partai *PDI* bertukar nama menjadi *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)*. Walaupun partai *PDI-P* tidak berjaya menang mayoritas, tetapi dari segi prestasi pemilihan telah meningkat sebanyak dua kali lipat dibanding pada pemilihan sebelumnya di kota Bukittinggi. Hal ini juga berlaku pada partai *PPP*.

Merujuk Tabel 23 pemilu 1999, mayoritas pemilih telah memilih *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, *Partai Amanat Nasional (PAN)*, dan partai *Golkar*. Ini menggambarkan pemilu 1999 di kota Bukittinggi berlangsung begitu sengit, antara partai lama dan baru (*PAN*, *PBB*, *PK*, dan lain-lain), tetapi partai lama *PPP* dan *Golkar* masih kuat. Namun, *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)* memperoleh kemenangan mayoritas ditingkat pusat tetapi di kota Bukittinggi kalah dengan tiga buah partai yang lain.

Tabel 23
Pola Memilih Menurut Umur Responden (%)
Pemilu 1997 dan 1999. N = 504.

Partai dipilih	Kelompok Umur dan Pemilihan Parpol Pemilu									
	21-35		36-45		46-55		56-65		< 66	
	1997	1999	1997	1999	1997	1999	1997	1999	1997	1999
<i>PPP</i>	33.00	21.36	43.42	31.35	44.07	33.72	39.66	25.85	57.58	36.36
<i>Golkar</i>	48.07	19.42	47.26	22.03	53.68	23.59	55.17	25.87	33.33	15.15
<i>PDI</i>	9.22	16.50	6.78	13.56	-	5.62	5.17	3.45	3.03	3.03
<i>PAN</i>	-	22.82	-	20.35	-	24.72	-	20.69	-	27.28
<i>PBB</i>	-	7.77	-	6.78	-	6.74	-	12.07	-	18.18
<i>PK</i>	-	2.91	-	0.85	-	1.12	-	1.72	-	0.00
<i>PKP</i>	-	0.97	-	0.00	-	0.00	-	1.72	-	0.00
<i>PKB</i>	-	1.46	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<i>PLUI</i>	-	0.48	-	0.00	-	0.00	- 0.00	3.45	-	0.00
Tdk ada	9.71	6.31	2.54	5.08	2.25	4.49	-	5.18	6.06	0.00
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Oleh karena itu, diketahui bahwa pola pembagian pemilih partai berbeda-beda. Menurut kelompok umur, mereka yang berumur muda (21-35 tahun) banyak memilih partai *PAN* (22.82%), umur 46-55 memilih *PPP* (33.72%) dan *Golkar* banyak dipilih (25.87%) oleh mereka yang sudah tua. Artinya mereka yang berumur dewasa dan tua banyak yang memilih partai lama

(*Orde Baru*). Secara keseluruhan pemilih partai *Golkar* (1997) paling banyak menukar pilihan kepada partai yang lain dibanding *PPP* pada pemilu 1999. Partai *PDI* justru mendapat kenaikan jumlah pemilih terutama dari kaum muda (16.50%). Artinya mayoritas (48.07%) pemilih *Golkar* pada pemilu 1997 terdiri dari kalangan muda, tetapi pada tahun 1999 telah menurun ke 19.42%. Mereka telah mendukung atau memilih *PAN* dan *PDI* pada 1999. Ini merupakan fenomena baru yang terjadi setelah rezim lama tumbang.

Kelompok kaum muda menilai *PAN* dan *PPP* sebagai partai yang mempunyai visi berasas agama Islam, program partai yang baik dan bahkan pemimpin partai (*PAN*) adalah Prof. Dr Amien Rais seorang tokoh yang sangat terkenal sebagai penggerak utama reformasi di Indonesia dan ia hadir pada masa yang tepat dan muncul sebagai tokoh populer ketika itu. Beliau mantan Pensyarah Universitas Gadjah Mada dan Ketua Pertumbuhan Islam Muhammadiyah. Para mahasiswa dan generasi muda di Indonesia sangat tertarik dengan perjuangan Amien Rais ketika bersama mahasiswa seluruh Indonesia mencetuskan penolakan dan unjuk rasa yang meluas di Indonesia untuk menumbangkan Presiden Suharto.

Walaupun pemilu dikhususkan hanya memilih partai, tetapi faktor tokoh atau pengurus partai turut mempengaruhi pemilih misalnya pemimpin *PDI* Megawati Sukarnoputri dikenal secara meluas di Indonesia sebagai salah seorang anak mantan Presiden Sukarno, tetapi beliau senantiasa dibatasi berbicara di depan orang banyak bahkan ditindas oleh rezim Suharto. Banyak di antara masyarakat peduli kepada Megawati. Ini bermakna bahwa penduduk terpengaruh dengan faktor pemimpin yang populer di Indonesia dan memilih partai terbukti golongan muda telah memberikan pilihan terbanyak kepada kedua partai tersebut (*PAN* dan *PDI-P*).

Tabel 29 telah menunjukkan pola memilih partai menurut kaum (etnik). Orang Minang yang banyak memilih partai *Golkar* dan *PPP* (1997) berpindah memilih *PAN* yaitu 24.05%, orang-

orang Jawa (24.14%) dan Batak (41.67%) memberi pilihan kepada *PDI-P*, sedangkan orang-orang Cina tetap konsisten memilih *Golkar* di kota Bukittinggi. Hal ini terjadi karena orang Cina selama tempo/masa *Orde Baru* umumnya anggota partai *Golkar* dan partai tersebut banyak memberikan kemudahan bagi mereka berdagang dan lain-lain. Orang Cina umumnya lebih mengutamakan ketenteraman hidup dan kenyamanan berdagang, selama masa *Orde Baru* mereka mendapat tempat yang layak sebagai anggota partai *Golkar*. Oleh karena itu, orang Cina sangat berhati-hati sebelum pindah memilih partai yang baru.

Fenomena lain bisa membuktikan bahwa pola memilih partai di kalangan orang Minangkabau khususnya lebih condong kepada partai-partai Islam (*PPP, PAN, PBB*) dan yang lain partai *Golkar*, sedangkan orang Jawa masih ramai memilih *Golkar* dan yang lain *PDI-P*. Banyak orang Jawa yang berada di Bukittinggi terdiri dari pejabat pemerintah dan mereka condong memilih partai pemerintah (*Golkar*). Ini karena mereka umumnya keluarga tentara dan pejabat pemerintah yang merupakan anggota partai pemerintah tersebut. Keadaan itu dapat di lihat pada Tabel 24.

Tabel 24
Persentase Pilihan Parpol Berdasarkan Etnis Pemilu 1997 dan 1999.

Parpol	Suku / Etnis									
	Minang 1997 1999		Jawa 1997 1999		Batak 1997 1999		Cina 1997 1999		Lain-lain 1997 1999	
<i>PPP</i>	44.87	28.73	19.24	10.34	16.67	21.00	0.00	50.00	35.66	25.00
<i>Golkar</i>	49.57	20.27	80.54	37.93	50.00	21.97	50.00	50.00	45.67	25.00
<i>PDI</i>	5.56	9.80	0.22	24.14	33.33	47.67	50.00	0.00	18.67	8.33
<i>PAN</i>	-	24.05	-	13.79	-	9.69	-	0.00	-	8.33
<i>PBB</i>	-	8.46	-	10.34	-	0.00	-	0.00	-	16.67
<i>PK</i>	-	1.78	-	3.46	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<i>PKP</i>	-	0.44	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<i>PKB</i>	-	0.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<i>PUI</i>	-	0.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Tidak ada	-	5.13	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	16.67
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0

Di samping itu, orang yang memilih *PDI-P* karena partai tersebut dipimpin oleh Megawati yang berasal dari pulau Jawa dan sedikit banyak juga berpengaruh kepada orang Jawa tersebut. Orang Batak kebanyakan beragama Kristen memilih *PDI-P* yang merupakan perpaduan dari beberapa buah partai bekas partai Kristen (Katolik/Protestan), yang lain sebagian memilih partai *Golkar*. Artinya, pola memilih di kota Bukittinggi dipengaruhi oleh dasar partai dan juga tokoh yang menjadi pemimpin partai.

Untuk melihat pola partisipasi politik di Bukittinggi yang terdiri dari penduduk asal dan luar kota dapat dilihat pada Tabel 25. Pola memilih antara daerah asal responden dengan pilihan partai menunjukkan penduduk asal kota banyak memilih *PPP* (31.31%) dan *Golkar* (21.72%). Penduduk berasal dari luar kota banyak memilih partai *PAN* (29.41%) dan *PPP* (24.84%). Hal ini menunjukkan warga yang berasal dari luar kota umumnya anggota perkumpulan *Muhammadiyah* dan aspirasinya disalurkan kepada partai *PAN* yang didirikan oleh anggota-anggota *Muhammadiyah* seperti Amien Rais dan kawan-kawan.

Tabel 25
Pola Memilih Partai Pemilu 1999 Menurut Asal Daerah Responden

Daerah Asal	Parpol									
	<i>PPP</i>	<i>Golkar</i>	<i>PDI</i>	<i>PAN</i>	<i>PBB</i>	<i>PK</i>	<i>PKP</i>	<i>PKB</i>	<i>PUI</i>	Lain2
Warga asal	31.31	21.72	11.11	19.70	6.57	1.01	1.01	0.00	0.50	5.05
Luar Kota	24.84	18.30	7.19	29.41	11.11	2.61	0.00	1.96	0.50	0.65
Pasaman	36.84	26.32	0.00	21.05	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
Pyk 50 Kota	25.00	8.37	8.33	33.33	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanah Datar	15.79	31.58	31.58	5.26	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
Pdg Prm	27.27	13.64	13.64	31.82	4.54	4.54	0.00	0.00	4.54	0.00
Solok	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Swl Sjj	36.36	9.00	9.09	36.36	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kab.Pesel	0.00	16.67	0.00	50.00	16.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
Kota Padang	38.46	30.77	7.69	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Luar Prop	17.39	30.43	26.09	8.70	8.70	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Manakala *PDI-P* mayoritas dipilih oleh responden yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar (31.58%), luar Sumatera Barat (28.09%) dan Solok (20%). *Partai Bulan Bintang* (*PBB*) banyak dipilih oleh responden yang berasal dari kabupaten 50 kota (25%) dan Pesisir Selatan (16%). Ini bermakna bahwa terjadi persaingan

yang amat genting antara 5 partai besar (*PPP, Golkar, PAN, PDI-P dan PBB*) di kota Bukittinggi.

Responden di kalangan pengusaha mayoritasnya memilih partai *PPP* (34.73%), dibanding pada pemilu 1997 yang konsisten. Ibu rumahtangga (30.83%), tentara/polisi (50%) dan mereka yang bekerja di sektor pertanian (43.75%) adalah mereka yang banyak memilih *PPP*. Tabel 26 dapat memperlihatkan kondisi itu.

Tabel 26
Penyebaran Memilih Partai Pemilu 1999 Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Partai Yang Dipilih									
	<i>PPP</i>	<i>GOLKAR</i>	<i>PAN</i>	<i>PDI-P</i>	<i>PBB</i>	<i>PK</i>	<i>PKP</i>	<i>PKB</i>	<i>PUI</i>	<i>LAIN2</i>
Pengusaha	34.73	16.77	17.96	15.56	7.78	0.60	0.60	0.60	0.60	4.80
Ibu RT.	30.83	26.31	21.80	9.78	7.52	0.75	0.75	-	0.75	0.75
Pelajar	17.95	12.82	20.51	15.38	10.26	5.13	-	2.56	2.56	12.82
Guru	25.80	29.03	32.26	-	9.68	-	-	-	-	3.22
Pegawai	15.38	23.08	30.77	15.38	3.85	3.85	-	-	-	7.69
PNS	4.17	54.17	16.67	4.17	8.32	12.50	-	-	-	-
Pensiunan	21.05	15.79	31.58	5.26	15.79	-	-	-	-	10.53
Pertanian	43.75	6.25	12.50	6.25	25.00	-	-	6.25	-	-
Sopir	8.33	-	33.33	8.33	16.67	8.33	8.33	-	-	16.67
Buruh	9.09	-	63.64	-	9.09	-	-	-	-	18.18
Dokter	-	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-
TNI/Polisi	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	25.00	25.00	15.00	25.00	-	-	-	-	-	10.00

Responden pelajar, guru, pensiunan, sopir, buruh, dokter dan tentara/polisi mayoritas memilih partai *PAN*. Di waktu pemilihan tahun 1997 umumnya mereka memilih partai *Golkar*. Namun pegawai pemerintah, dokter dan guru mayoritas tetap memilih partai *Golkar*. Ketiga komponen sektor jenis profesi dan pekerjaan tersebut adalah tulang punggung partai *Golkar* sejak masa *Orde Baru*. Oleh karena itu, mereka masih konsisten memilih partai pemerintah tersebut. Keadaannya amat berbeda dengan responden yang bekerja sebagai buruh, sopir dan tentara/polisi pada pemilihan tahun 1999 tidak lagi memilih partai *Golkar* dan *PDI-P* tetapi memilih *PAN*. Satu-satunya partai yang dipilih oleh seluruh kategori jenis pekerjaan responden pada pemilihan 1999 adalah partai *PAN* dan ini bermakna partai yang diketuai Prof. Dr Amien Rais menjadi partai paling populer di kota Bukittinggi. Manakala partai *PPP* dan *PBB* pada peringkat kedua dan ketiga yang dipilih oleh responden. Maka partai baru yang mendapat

dukungan banyak responden pada pemilihan 1999 adalah *PAN*, *PBB* dan *PK*. Ketiga partai tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam dan visi politik partai adalah memperjuangkan Islam. Walaupun partai lama *PPP* yang senantiasa dikalahkan *Golkar* semasa *Orde Baru*, pada pemilihan 1999 mendapat kenaikan jumlah pemilih. Hal ini karena partai *PPP* telah menukar kembali asas partai menjadi Islam dan sesuai dengan mayoritas responden di kota Bukittinggi yang beragama Islam. Pola memilih menurut pekerjaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden di kota Bukittinggi lebih condong memilih partai-partai yang mempunyai asas dan perjuangan kepada Islam. Partai yang berasaskan kepada nilai-nilai nasional seperti *Golkar* dan *PDI-P* kurang mendapat dukungan.

Dari kedua tempo/masa pemilu 1997 dan 1999 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pola memilih partai di kota Bukittinggi. Responden kota berubah memilih dari *Golkar* kepada *PPP*, asal dari luar kota mulanya *Golkar* pindah kepada partai *PAN*. Kelompok kaum muda (21-35 tahun), dewasa (36-45 tahun), berubah dari partai *Golkar* kepada *PAN* dan *PPP*. Manakala orang-orang tua dan pengusaha, tetap konsisten memilih *PPP* sedangkan kumpulan pegawai pemerintah, dokter konsisten memilih *Golkar*. Dengan demikian Partai baru terpopuler adalah *PAN*, *PBB* dan *PK* sebagaimana ditunjukkan Tabel 27.

Tabel 27
Pola Memilih Berdasarkan Sosial ekonomi

Responden	Pemilu	
	1997	1999
Penduduk asal	<i>Golkar</i>	<i>PPP</i>
Asal Luar Kota	<i>Golkar</i>	<i>PAN</i>
Kelompok Muda (21-35)	<i>Golkar</i>	<i>PAN</i>
Kelompok Dewasa (36-45)	<i>Golkar</i>	<i>PPP</i>
Kelompok Tua (<66)	<i>PPP</i>	<i>PPP</i>
Pegawai Pemerintah	<i>Golkar</i>	<i>Golkar</i>
Pengusaha	<i>PPP</i>	<i>PPP</i>

Dampak perubahan memilih tersebut telah merubah kedudukan 18 buah kursi yang diperebutkan di *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* di kota Bukittinggi (3 buah kursi – pemilu 1997 dan 2 kursi – pemilu 1999 diperuntukan bagi tentara/polisi tanpa bertanding). Partai *Golkar* adalah termasuk partai paling banyak kehilangan kursi yaitu delapan buah (1999), sedangkan *PPP* telah kehilangan satu kursi. Partai *PDI* bertambah satu kursi. Partai-partai lain yang baru berdiri sebelum masa pemilu tahun 1999 yaitu *PAN* justru menjadi mayoritas baru dan yang lain mendapat dua dan satu kursi seperti *PBB*, *PK*, dan *PKP*. Oleh karena itu, tidak ada lagi partai mayoritas yang menjalankan kursi di *DPRD* kota Bukittinggi pada pemilu 1999. Keadaan tersebut ditunjukkan Tabel 28 dibawah ini

Tabel 28
Pola Pembagian Kursi Dewan (DPRD) 1997
dan 1999 di Kota Bukittinggi.

No	Partai	Pemilu	
		1997	1999
1	Partai Golongan Karya (<i>Golkar</i>)	12	4
2	Partai Persatuan Pembangunan (<i>PPP</i>)	4	3
3	Partai Demokrasi Indonesia (<i>PDI-P</i>)	1	2
4	Tentara/Polisi *)	3	2
5	Partai Amanat Nasional (<i>PAN</i>)	-	5
6	Partai Bulan Bintang (<i>PBB</i>)	-	2
7	Partai Keadilan (<i>PK</i>)	-	1
8	Partai Kesatuan Pembangunan (<i>PKP</i>)	-	1
	Jumlah	20	20

*) Kursi yang telah disediakan tanpa pemilu

J. Faktor yang Mempengaruhi Pilihan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab terdahulu banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang ikut memilih. Dari penelitian yang dilakukan mendapati faktor politik yang mendorong pemilih memilih suatu partai adalah disebabkan visi partai tersebut, yang sesuai dengan pilihan hati mereka. Ini bermakna bahwa responden dapat membandingkan mutu

program dan perjuangan partai. Mereka tidak mau memberikan suara kepada partai-partai yang dianggap tidak mempunyai visi politik yang baik. Alasan-alasan yang mendorong mereka untuk memilih disimpulkan dalam Tabel 29. Manifesto politik yang positif adalah termasuk alasan yang mendorong responden untuk memilih sebuah partai (37.10%) dan berdasarkan kehendak hati nurani mereka (22.82%), sedangkan pengaruh tokoh partai yang hebat dilaporkan 18.25% dan partai yang berpengalaman di pemerintah (10.91%). Ini bermakna, mereka sudah berhati-hati dalam memilih partai secara logis dan objektif.

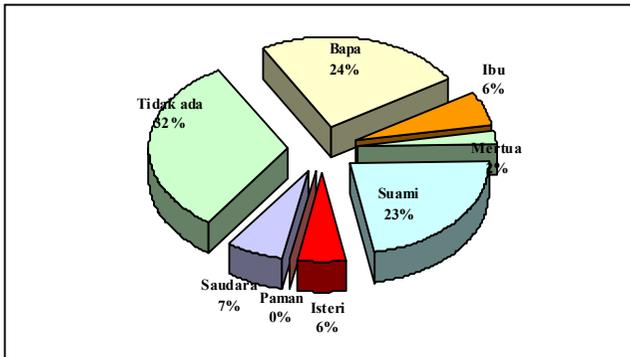
Tabel 29
Faktor Pendorong Responden Memilih Partai Tertentu

Pendorong Memilih Partai	Laki-laki	Perem-puan	Parsentase
Manifesto Politik	15.28	21.82	37.10
Sesuai dengan hati nurani	10.12	12.70	22.82
Tokohnya hebat dan populer	10.12	8.13	18.25
Partai berpengalaman	5.75	5.16	10.91
Prospek partai yang wajar	1.59	1.98	3.57
Logo partai bagus	0.59	1.39	1.98
Janji partai logis	0.40	1.79	2.19
Pendukung partai banyak	0.59	2.18	2.78
Kampanye partai positif	0.20	0.20	0.40
Jumlah	44.64	55.35	100.0

1. Pengaruh Keluarga

Pola pemilihan partai juga dipengaruhi oleh pilihan partai keluarga. Apabila ada ibu bapak atau saudara seseorang memilih sesebuah partai, biasanya diikuti pula oleh anggota keluarga mereka. Kajian ini membuktikan 47% responden memilih partai yang dipilih oleh keluarga mereka (bapak dan suami). Berkaitan dengan anggota keluarga yang lain seperti saudara, isteri, mertua dan lain-lain didapati turut berpengaruh, sedangkan yang lain tidak berpengaruh dengan keluarga (32%) keadaan ini seperti ditunjukkan dalam Diagram 8 di bawah ini.

Diagram 8 Pengaruh Keluarga dalam Memilih Partai



Data tersebut menunjukkan, kelompok responden yang paling banyak terpengaruh oleh keluarga berasal dari kalangan kelompok muda. Ini adalah dianggap sangat wajar karena kelompok usia muda senantiasa berada di bawah kendali orang tua mereka biasanya meniru sikap dan perilaku orang tuanya termasuk memilih partai. Perempuan-perempuan yang telah menikah, banyak dipengaruhi oleh suami yang menjadi kepala rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh dalam keluarga responden masih dominan terhadap pola memilih partai penduduk di kota Bukittinggi.

Menurut pendekatan-pendekatan yang telah dibahas pada bagian yang terdahulu penelitian menguji beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pola memilih sebuah partai politik pada pemilu. Di antara faktor dimaksud adalah pengaruh dalam keluarga responden, pihak luar seperti tokoh atau pemimpin masyarakat setempat yaitu ulama, pemimpin partai, pimpinan pemerintah, dan lain-lain.

Responden ditanya bahwa pihak famili (keluarga) berpengaruh dalam memilih suatu partai, sebanyak 25.0% menjawab bahwa pihak Bapak dan yang lain adalah suami bagi perempuan yang menikah sebanyak 23.0%, sedangkan sebagian yang lain yaitu sebanyak 23.5% justru tidak merasa terpengaruh

oleh siapapun dari lingkungan keluarganya. Ini berarti bahwa pola pemilu penduduk kota Bukittinggi banyak dipengaruhi oleh keluarganya memilih. Oleh karena itu peranan seorang ayah (bapak) bagi seorang anak dan suami bagi perempuan menikah cukup dominan. Artinya, apabila pihak keluarga memilih sebuah partai, maka sebagian anggota keluarga akan ikut memilih partai tertentu tersebut.

Namun tidak semua responden berbuat seperti itu, untuk yang lain didapat sikap otonomi, artinya mereka tidak mau mengikuti pilihan partai yang dipilih keluarganya tetapi membuat pilihan sendiri yang otonom tanpa terpengaruh oleh pihak keluarga. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa lebih dari separuh responden memilih partai tertentu karena terpengaruh oleh pilihan partai yang menjadi pilihan keluarga mereka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pomper (1975) bahwa perilaku memilih atau keanggotaan partai keluarga berpengaruh terhadap pilihan partai bagi keluarga yang lain. Oleh karena itu hasil penelitian ini sesuai dengan kajian lepas yang dibuat para sarjana tersebut.

Uji statistik menggunakan Kai Kuasa Dua yang dilakukan memperoleh pengaruh signifikan antara pendidikan responden dengan perilaku memilih pada taraf kepercayaan 0.05 dan derajat kebebasan 1 dimana nilai khi kuasa dua yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritikal 11.863. Ini bermakna taraf pendidikan seseorang berkaitan dengan pola memilih yang otonom. Mereka yang berpendidikan tinggi mempunyai pengetahuan politik yang luas dan bersikap otonom tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk dari pihak keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Lipset bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula partisipasi politik dan sikap seseorang yang otonom dalam politik.

2. Pengaruh pemimpin

Selain pengaruh keluarga, berdasarkan pendekatan psikologis, perilaku memilih juga dipengaruhi oleh faktor

luar/eksternal keluarga seperti pemimpin masyarakat. Sikap dan persepsi dibangun oleh pengalaman hidup dalam masyarakat dan organisasi. Pergaulan hidup di tempat pekerjaan, pertumbuhan politik, di tempat ibadah. Tokoh atau pemimpin partai turut mempengaruhi seseorang memilih partai. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah ulama Islam, pemimpin politik, organisasi, pemerintah, dan lain-lain.

Hasil penelitian mendapati pengaruh pemimpin terutama pemimpin agama Islam (ulama) dan pemimpin politik adalah termasuk yang paling berpengaruh masing-masing 39.5% dan 28.4%. Hal ini berarti bahwa ulama dan pemimpin partai adalah tokoh yang banyak menjadi panutan para pemilih. Artinya wibawa para pemimpin sangat penting dalam mempengaruhi perlakuan politik mereka. Di dalam masyarakat Minang umumnya peranan ulama atau pemimpin agama Islam sangat dominan dan dihormati sebagaimana dilaksanakan di dalam falsafah hidup orang Minang yaitu, *ulama suluh bendang dalam negeri*, yang maksudnya ulama adalah tokoh yang menjadi ikutan/panutan di dalam amalan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Perilaku, sikap dan ucapan ulama lazimnya dijadikan teladan seluruh aspek-aspek kehidupan.

Oleh karena itu, jika seorang ulama menjadi anggota sebuah partai politik maka para pengikutnya akan menurutinya, termasuklah dalam konteks memilih partai tertentu. Dari pengamatan di lapangan, menunjukkan banyak di antara pemimpin agama Islam di Bukittinggi yang juga menjadi pemimpin partai Islam seperti PPP, PAN, PBB dan PKB, sedangkan pemimpin pemerintah di kota seperti Walikota, Camat, atau Lurah diketahui kurang berpengaruh dibanding pemimpin tersebut di atas. Ini berarti bahwa dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin pemerintah yang berkuasa adalah rendah. Keadaan tersebut ditunjukkan Tabel 30 berikut.

Tabel 30
Pemimpin Tokoh Menjadi Ikutan Pemilih

Pemimpin/Tokoh	Parsentase
Ulama/Islam	33.5
Partai Politik	28.4
Pemerintah	13.7
Teman/Tetangga	5.1
Organisasi Masyarakat	5.0
Adat	2.4
Sekolah	1.6
Tidak Menjawab	10.3
Jumlah	100.0

Bagi pemimpin adat yang dikenal sebagai *ninik mamak* yaitu bergelar *Datuk* dalam sebuah kumpulan keluarga orang Minang kurang. Responden yang ditanya berpengaruh atau mendapat perhatian, hanya 2.4% yang menyatakan *Datuk* mempengaruhi mereka. Orang Minang menganggap bahwa *Ninik Mamak* dianggap sebagai *Nan Gadang Basa Batuah, pai tampek batanyo, pulang tampek babarito*. Artinya seorang *Datuk* di lingkungan sukunya berperan sebagai pemimpin utama yang senantiasa diikuti oleh anggota keluarga sebagai sopir polisi adat.

Dalam konteks memilih pemimpin adat kurang memberi pengaruh menjadi ikutan/panutan dalam proses pemilihan dibanding pemimpin ulama dan pemimpin politik. Namun diketahui teman, tetangga dan pergaulan responden bersama di dalam organisasi dan di sekolah rendah (5%) mempengaruhi pola pemilihan mereka (Tabel 31). Sedangkan setengah yang lain tidak memberikan jawaban pasti siapa yang boleh mempengaruhi mereka memilih partai tertentu. Jadi, pemilu 1999 para pemilih partai masih banyak yang meragukan pilihannya karena partai yang mengikuti pemilu ketika itu sangat banyak yaitu 48 buah partai. Tidak semua partai tersebut diketahui secara pasti oleh

para pemilih seperti program maupun visi politik yang dilancarkan partai berkenaan.

Tabel 31
Kaitan Pendidikan dan Partai Pihak Keluarga
dengan Perilaku Memilih Pemilu 1997.

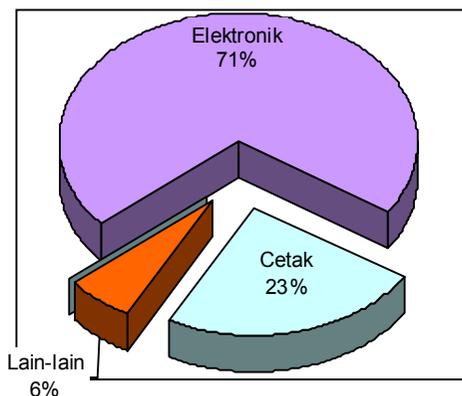
Keanggotaan Partai dari	Pendidikan				
	Tidak tamam SD	SD	SLTP	SLTA	Universitas/ PT
Ayah	13.51	12.70	20.69	27.67	34.23
Ibu	8.11	4.76	4.60	7.77	4.50
Mertua	-	1.59	-	0.48	0.90
Suami	13.51	23.81	28.74	22.83	21.63
Isteri	8.11	6.35	8.05	5.83	3.60
Paman	-	-	-	0.48	0.90
Saudara	16.22	4.76	9.19	4.85	4.51
Tidak ada	40.54	46.03	28.73	30.09	29.73
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

χ^2 11.863 df 1 $p < 0.05$

3. Pengaruh Media Masa Penyebar Informasi Politik

Penelitian juga melihat peranan media masa dalam mempengaruhi persepsi memilih, diantara media masa yang dimaksud adalah media elektronik dan cetak yang lazim menyiarkan isu-isu perkembangan politik saat itu. Banyak responden menyatakan bahwa pilihan mereka terhadap media masa menyiarkan informasi politik amat meningkat. Di antara media yang dimaksud yang paling disukai (71%) yaitu media elektronik (radio, televisi, dan internet) dan 23% media tercetak (surat kabar, majalah, dan lain-lain) seperti ditunjukkan Diagram 9 di bawah ini. Ini berarti bahwa mereka sadar dan telah lebih maju menggunakan media masa terkini untuk meningkatkan pengetahuan politik. Ini dapat memastikan bahwa informasi politik telah menjadi salah satu keperluan responden dan perkembangan informasiterkini senantiasa telah disimak dan diikuti setiap masa.

Diagram 9
Media Masa Penyebar Informasi politik



Responden yang menerima informasi politik dari media masa adalah mereka yang memilih partai tertentu. Lazimnya setiap pemilu berlangsung partai-partai yang akan bertanding telah menyiarkan program atau visi politik partai melalui media masa. Terbukti, pengaruh penyebaran informasi dari media masa turut membangun persepsi dan sikap mereka. Secara keseluruhan mayoritas responden menyatakan media masa elektronik telah menyumbang pada perubahan sikap untuk memilih sebuah partai (Tabel 32), sedangkan media masa cetak diketahui banyak yang membacanya.

Tabel 32
Partai yang Dipilih Berdasarkan Informasi politik Dari Media Masa

Partai yang dipilih	Jenis Media Masa			Jumlah
	Cetak	Elektronik	Lain-lain	
<i>PPP</i>	23.91	70.29	5.80	100.00
<i>PDI-P</i>	22.06	72.06	5.88	100.00
<i>Golkar</i>	22.45	72.88	4.67	100.00
<i>PAN</i>	24.56	68.43	7.01	100.00
<i>PBB</i>	25.58	65.12	9.30	100.00
<i>PK</i>	22.23	77.77	0.00	100.00
<i>PKP</i>	0.00	100.00	0.00	100.00
<i>PKB</i>	0.00	100.00	0.00	100.00

Partai yang dipilih	Jenis Media Masa			Jumlah
	Cetak	Elektronik	Lain-lain	
<i>PUI</i>	0.00	100.00	0.00	100.00
Lain-lain	31.25	56.25	12.50	100.00

K. Rangkuman

Pemilih penduduk kota Bukittinggi adalah masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Pekerjaan mereka adalah berdagang, rata-rata pendapatan mereka adalah sederhana. Namun banyak terdapat bangunan rumah yang mewah di kota karena banyak keluarga mereka membantu membangun rumah terutama mereka yang berpendapatan tinggi. Lebih dari separuh penduduk kota terdiri dari pendatang kawasan luar kota terutama dari Kabupaten Agam yang sudah tinggal di kota dalam tempo/waktu lama. Oleh karena itu, penduduk membaaur dari segi sosial, adat, dan bahasa Minang.

Secara keseluruhan partisipasi politik pada saat pemilu 1997 dan 1999 adalah tinggi berdasarkan jumlah pemilih yang ikut memilih, menghadiri kampanye, mendaftar sebagai pemilih atas kesadaran sendiri, dan takut kepada rezim berkuasa (*Orde Baru*).

Pola memilih partai pemilu tahun 1997 dan 1999 secara umum diketahui berubah. Hal-hal ini karena adanya persepsi dan sikap politik otonomi di kalangan rakyat yang menyadari hak-haknya sebagai seorang warga negara dan pelaksanaan demokrasi sejalan dengan pelancaran reformasi serta taraf sosial ekonomi, pendidikan, dan penyampaian informasi politik dari media masa. Umumnya responden yang berpendidikan sekolah menengah dan universitas telah merubah partai mereka. Hanya responden yang tamat sekolah dasar dan yang tidak bersekolah diketahui tidak mau merubah pilihan partai. Hal ini berarti semakin tinggi tahap pendidikan rakyat, maka persepsi dan sikap peduli terhadap politik semakin otonom.

Dari segi pemilih partai, di antara responden ada yang terpengaruh oleh keluarganya dalam memilih partai tertentu antara lain, bapak dan suami bagi perempuan yang telah menikah.

Selain itu, ulama Islam dan pemimpin partai juga mempengaruhi pola pemilihan dan sebaliknya pemimpin dari kalangan pemerintah dan pemimpin adat kurang berpengaruh. Di antara yang menyebabkan pemilih memilih partai lain pada tahun 1997 adalah disebabkan partai yang baik dan pemimpin yang berwibawa. Era reformasi telah turut menyumbang kepada perubahan pola pemilihan antara tahun 1997 dan 1999 terutama kepada partai baru *PAN*, *PBB*, *PK*, dan *PKP*. Namun partai *Golkar* dan *PPP* yang bertanding sejak zaman *Orde Baru* (rezim Suharto) masih berjaya menjadi lima partai di kota Bukittinggi.

Pola pemilih pada pemilu 1999 di kota Bukittinggi menunjukkan penduduk kota kembali merubah dukungan dari partai *Golkar* kepada *PPP*, luar kota pula dari *Golkar* kepada *PAN*, sedangkan partai *Golkar* yang sama-sama dipilih oleh kumpulan muda (21-35) dan kumpulan dewasa (36-45) pada pemilu 1997 bertukar masing-masing kepada *PAN* dan *PPP*. Kelompok orang tua (< 66), para pengusaha dan pegawai pemerintah adalah secara konsisten tidak merubah pilihannya partai yaitu terhadap *PPP* dan *Golkar*. Ini menunjukkan telah terjadi perubahan pola memilih seiring dengan perubahan besar pergantian rezim *orde baru* dan *reformasi*.

Penduduk kota amat tertarik mengikuti perkembangan politik negara yang disiarkan oleh media masa terutama televisi dan radio. Mereka mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mengetahui perkembangan politik dan isu-isu saat itu secara luas di era reformasi yang mengembangkan demokrasi.

Untuk melihat seberapa besar keterkaitan pengaruh ciri-ciri sosial ekonomi dengan pola partisipasi politik dan memilih kedua pemilihan berkenaan diperbincangkan di dalam Bab berikut ini.

RUJUKAN

- Achwan, Rochman. 2000. Manifesto Politik Abad ke 21. *Kompas*: 28 Juni 2000. 4.
- Alfian. 1977. Demokrasi di Indonesia. *Prisma*. 4. 1977. Jakarta: LP3S.
- Alfitra Salamm. 1993. Pemilu dan Peta Kekuatan Politik Malaysia. *Jurnal Ilmu Politik UI Jakarta*. 13: 20-40.
- Alfitra Salamm. 1997. Dimensi Kepemimpinan Dalam Masyarakat Kewargaan Dalam Politik Malaysia. *Jurnal Ilmu Politik UI Jakarta*, 17: 45-57.
- Almond, Gabriel A., Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture*. Boston, Mass: Little Brown and Company.
- Ambardi, Dodi, "Kata Pengantar" dalam Roth, Dieter (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI, Jakarta.
- Ambardi, Kuskrido dan Ratnawati (2010) "Bahan Bacaan Mata Kuliah Teori Perilaku Politik" Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, FISIPOL-UGM, Yogyakarta.
- A.M Mukhtie Fadjjar. 2010. *Konstitusionalisme Demokrasi*. In-TRANS Publishing. Malang.
- Asfar, Muhammad. 1992. Beberapa Pendekatan Memahami Perilaku Pemilih. *Jurnal Ilmu Politik UI Jakarta*. 16. 46-55.
- Babbie, Earl. 1992. *The Practice of Social Research*. Belmont, California: Wadsworth.
- Bappeda. 1985. *Bukittinggi Dalam Angka 1985*.
_____. 1994. *Bukittinggi Dalam Angka 1994*.

- _____.1998. *Bukittinggi Dalam Angka*. Bukittinggi: Pemda.
- BPS. 2000. *Kantor Statistik Bukittinggi*.
- _____.2001. *Kantor Statistik Bukittinggi*.
- Cahyono, Heru. 1998. *Pemilu dan Pendidikan Politik dalam Mochtar Pabotingi Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Campbell, Angus, . Gurin Gerald dan Miller Waren.1954. *The Voter Decides*. Evanston: Row Peterson.
- Chehabi, Houchang Esfandiar & Juan José Linz, *Sultanistic Regimes* (1988), Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Dahl, Robert. 1966. *Patterns of Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- _____. 1978. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- David, Hagerti. 1997. *Pemilihan Umum di Papua New Guinea*. *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: UI. **13**. 1998.
- Deliar Noer.1977. *Partai Politik Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Deutsch, Karl. 1974. *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Boston: Houghton Mifflin.
- Duverger, Maurice. 1954. *Political Parties*. London: Methuen and Co.
- Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*, Harper, New York.
- Eldersveld, Samuel J, Moris Janowitz.1956. *Political Behavior*. Illionis: The Free Press.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornel University Press.

- Fiorina, Morris P (1981) "Retrospective Voting in American National Elections" dalam Roth, Dieter (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, terjemahan oleh Denise Matindas, Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI, Jakarta.
- _____.1975. The Paradox of Not Voting: A Decision theoretic Analysis, *American Political Science Review*, Nombor 68, hal 523-536.
- FS Swantoro, *Ketua Departemen Politik "Soegeng Sarjadi Syndicated" Jakarta-33i)*
- Gunawan, Bondan S.2000. *Indonesia Menggapai Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hal Hill. 1996. *The Indonesian Economy Since 1966*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haris, Syamsudin. 1988. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: PPW LIPI.
- _____.1997. Pembinaan Politik, Demokratisasi dan Pembentukan Civil Society: Problematik Kepartaian Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Pres.
- _____., Nelson.1994. *Partisipasi Politik, di Negara Berkembang* (terj.). Jakarta Rineka Cipta.
- Irwanto 1994. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Karim, Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia. Sebuah Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kerlinger, F.N. 1973. *Foundations of Behavioral Research*. New York: Halt Renhart and Winston, Inc.

- Kristiadi, J.1996. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia. *Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- KPU. 2000. Lembaga Pemilu. Jakarta.
- _____.2001. Lembaga Pemilu, Jakarta.
- Lazarsfeld, P.B. Berelson, and H. Gaudet (1968). *The People's Choice*. Columbia University Press, New York.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2000. *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Jakarta FISIP UI.
- _____. 2001. Indonesia's Democracy Opening. *Jurnal Commonwealth & Comparative Politics*. **39**. Mac 2001. 94-116.
- Lipset, Seymour Martin. 1960. *Political Man: the Social Bases of Politics*. Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private, Ltd.
- Mashad. 1999. *Korupsi Politik Orde Baru*. Bandung: Erlangga.
- Mar'at. 1992. *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukuran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardjono, Hartono.1998.*Reformasi Politik, Suatu Keharusan*. Jakarta: Gema Insani.
- Mee, Wendy Ting Swee.1997.Urbanisasi dan Perubahan Corak Pengundian Dalam Pilihanraya Parlimen 1982 dan 1990 di Sarawak. *Latihan Ilmiah*. Bangi: Jabatan Geografi UKM.
- Miaz, Yalvema. 1987. Bukittinggi Kota Wisata. Jakarta: *Prioritas* 22 Jun 87.
- _____.1997. Pola Pembauran Maklumat Kesehatan di Kota Bukittinggi. Bangi: Tesis Master of Art. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Milbrath, Lester. 1965. *Political Partisipation, How and Way, Do get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally.

- Miriam Bidiardjo. 1998a. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1998b. *Partisipasi Politik dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mohamad Foad Sakdan. 1999. *Pengetahuan Asas Politik Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Mohamad Salleh Abas. 1987. *Pilihanraya Malaysia*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Mujani, Saiful, "Survei dan Perilaku Pemilih," dalam *Kompas*, Jakarta: Edisi 14 Juni 2004.
- Naim, Muchtar. 1985. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Neumann, Sigmund. 1963. *Modern Political Parties*. London: The Free Press of Glencoe.
- Newcomb, T.M. 1978. *Social Psychology*. Third Impression. New York: Tavistock Publication.
- Nurhasan Syah. 1997. Kualitas Hidup Penduduk Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Upaya Peningkatannya. *Forum Pendidikan IKIP Padang*. 04, 415-437.
- Panitia Pemilihan Daerah Bukittinggi, 1997.
- _____. 1999.
- Purwantana. 1994. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rauf, Maswadi. 1991. Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik* . Jakarta: UI
- _____. 1998. Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia. *Syarahana* Profesor Madya FISIP-Universiti Indonesia Jakarta 1 Nopember 1997.

- _____. 2000. *Arti Penting Pemilu 1999*. Jakarta: FISIP UI dan Mizan
- Roth, Dieter (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, terjemahan oleh Denise Matindas, editor Dodi Ambardi, Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI, Jakarta
- Richard R. Lau & David P Redlawsk (2006). *How Voters Decide: Information Processing during Election Campaigns*, Cambridge University Press, UK.
- Sanit, Arbi. 1995. *Ormas dan Politik*. 1995. Jakarta: LSIP
- _____.1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Radjawali.
- Sastroatmodjo, Sidijono.1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Scates, D.E., C.V. Good. 1954. *Methods of Research Educational Psychological Sociological*. London: Appleton-Century Crofts.
- Sekjen DPP Golkar 1997. Jakarta: Kantor DPP.
- Sherman, Arnold K., Aliza Kolker. 1987. *The Social Bases of Politics*. California: Division of Worswath.
- Sumarno.1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sundhaussen, Ulf. 1996. Sebuah Agenda bagi Demokratisasi di Indonesia. *Prisma* Jakarta. 3. 3-21.
- Taqwa, M. Ridhah. 1996. Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekong, Enrekang 1971-1992. *Prisma* Jakarta.3. 35-46.
- Trelease, S.S 1960. *How to Write Scientific and Technical Papers*. Baltimore: The Williams & Wilkins Co.

Verba, Sidney dan Norman H. Nie. 1972. *Participation in America. Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper and Row.

Majalah Surat Kabar dll:

Gamma.2001. 20 April.

Gatra.1998. 25 Juli.

Kompas.1977. 17 Agustus

Kompas.2000. 28 Jun.

Kompas.2001. 31 Oktober.

Kompas.2002. 19 Januari.

Prisma.1978. 7 Agustus

Utusan Malaysia .1997. 6 Januari.

Tempo.1999. 4 Januari.

<http://www.pks-pusat-jaksel.or.id/Article/hal112.html/> tanggal
16 April 16, 2009/ jam 23.00

BIODATA PENULIS

YALVEMA MIAZ, dilahirkan di Sumani Solok, 22 Juni 1951. Menamatkan pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial FIS Universitas Negeri Padang (dulu IKIP Padang) tahun 1981. Menjadi dosen PGSD FIP UNP sejak tahun 1992 dan mengajar di program Pascasarjana UNP sejak 2010. Melanjutkan pendidikan program S2 dan S3, program Sains Sosial konsentrasi Geografi komunikasi dan politik di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selain berkarir dalam bidang pendidikan, pernah menjadi anggota DPRD kota Bukittinggi (1982-1992), kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi (2003-2010). Banyak menulis artikel dan tulisan ilmiah di media masa (*Haluan, Tribun, dan Singgalang*), dan jurnal pendidikan. Menjadi pembicara pada seminar-seminar nasional dan internasional. Melakukan studi komperasi bidang pendidikan di Amerika (2004), Australia (2010) dan merintis *sisters school* antara kota Bukitinggi dengan kota Seremban Malaysia, kota Savanna Georgia Amerika dan kampus pendidikan di Margaret River Australia.

Sebagai mahasiswa pascasarjana di UKM Malaysia, melakukan penelitian dalam kajian komunikasi sosial (1997) dan geografi politik (2005) dan menjadi *assistant lectural* pada Fakultas Sains Sosial Kemanusiaan dan Kemasyarakatan UKM (1995-1998).

